

# **Inovasi Pendidikan Nonformal**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Inovasi Pendidikan Nonformal

Prof. Dr. Yoyon Suryono  
Dr. Entoh Tohani

*(Dosen Program Studi S2 Pendidikan Nonformal UNY)*



## **Inovasi Pendidikan Nonformal**

@ Yoyon Suryono & Entoh Tohani

Perancang sampul: Digiprint Media

Tata Letak : Andi

Layout : Andi

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:  
Graha Cendekia, 2016, Yogyakarta

## **Inovasi Pendidikan Nonformal**

Yoyon Suryono

Entoh Tohani

Yogyakarta: Graha Cendekia

Cetakan I, November 2016

x + 177 hlm; 14,5x20,5 cm

ISBN: 978-602-6938-61-9

**Penerbit Graha Cendekia**

Cp. 08122718347

# KATA PENGANTAR

Para mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal perlu memahami segala hal yang berkait dan menjadi bagian dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dalam kerangka terintegrasi dari pendidikan nasional. Pemahaman yang dimaksud tidak lain adalah penguasaan keilmuan dan praktek pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal serta bagian-bagian penting yang ada di dalamnya.

Untuk keperluan tersebut, tersedianya buku pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal banyak dinantikan oleh banyak pihak. Satu di antaranya karena masih kurangnya buku-buku pendidikan luar sekolah atau buku pendidikan nonformal untuk keperluan perkuliahan mahasiswa. Penyediaan insentif penulisan buku ajar oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2016 ini merupakan salah satu cara strategis untuk meningkatkan mutu perkuliahan lewat penulisan buku ajar untuk mahasiswa.

Buku serial tentang pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal yang ditulis pada kesempatan ini memfokuskan kajian pada Inovasi Pendidikan Nonformal sebagai bagian terpenting dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dalam rangka menyediakan layanan pendidikan, khususnya layanan pendidikan

bagi kelompok masyarakat yang tidak memperoleh layanan pendidikan persekolahan karena satu dan lain sebab yang dialaminya.

Dengan selesainya penulisan buku ini ucapan terima kasih ingin disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui, memfasilitasi, dan menyediakan dana untuk penulisan buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada dosen Program Studi S2 PLS/PNF yang telah membantu dan memberi kemudahan terlaksananya penulisan buku ini.

Buku ini masih belum sempurna, di sana-sini masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu penulis mengharap masukan dari pembaca buku ini untuk penyempurnaan selanjutnya. Dengan segala kekurangan yang ada semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta, November 2016

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB 1</b>	
PENDAHULUAN.....	1
<b>BAB 2</b>	
PERSPEKTIF PENDIDIKAN NONFORMAL.....	13
A. Konsep Pendidikan Nonformal .....	14
B. Karakteristik Pendidikan Nonformal .....	20
C. Program Pendidikan Nonformal .....	24
D. Sasaran Pendidikan Nonformal .....	28
E. Kebijakan Pendidikan Nonformal .....	34
F. Konteks teori dan praktek pendidikan nonformal .....	42
<b>BAB 3</b>	
KOMPARASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NONFORMAL.....	49
A. Tiongkok .....	50
B. Jepang .....	56
C. Bangladesh dan India .....	57
D. Korea Selatan dan Thailand .....	61
E. Malaysia dan Australia .....	64
F. Indonesia .....	66

## **BAB 4**

INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL.....	87
A. Konsep Inovasi .....	88
B. Urgensi Inovasi .....	90
C. Teori-Teori Inovasi Pendidikan Nonformal .....	95
D. Aspek-Aspek Inovasi Pendidikan Nonformal .....	100
E. Hambatan dan Tantangan Inovasi Pendidikan Nonformal .....	102

## **BAB 5**

PENDEKATAN INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL.....	105
A. Pendekatan Struktural .....	106
B. Pendekatan Kultural .....	111

## **BAB 6**

KASUS INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL.....	119
A. Pengertian dan Tujuan .....	120
B. Tujuan Program .....	120
C. Penyelenggaraan Program Pendidikan .....	121
D. Kendalah yang dihadapi .....	126
E. Dampak yang dihasilkan .....	127

## **BAB 7**

KAPASITAS INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL .....	137
A. Kapasitas Inovasi .....	138
B. Komunitas Praktik untuk Inovasi .....	144
C. Manajemen Pengetahuan untuk Inovasi .....	149

LAMPIRAN

PUSTAKA

INDEK



# Bab 1

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2014, kurikulum program studi S1, S2, dan S3 perguruan tinggi di Indonesia harus mengalami pembaruan berkenaan dengan diterapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada dasarnya, KKNI menetapkan bahwa lulusan S1 berada pada level 6, lulusan S2 berada pada level 8, dan S3 berada pada level 9.

Secara ringkas, perbedaan level ini menunjukkan bahwa lulusan S1 harus memiliki kemampuan pengelolaan dan pengembangan hal-hal yang strategis; memiliki kemampuan pemecahan permasalahan ipteks dengan pendekatan monodisipliner, dan memiliki kemampuan riset untuk menetapkan keputusan pengembangan. Sementara itu, lulusan S2 harus memiliki kemampuan menghasilkan karya inovatif yang teruji

melalui riset berlandaskan ipteks dan praktek professional; memiliki kemampuan pemecahan permasalahan ipteks dengan pendekatan inter atau multidisipliner, serta kemampuan melaksanakan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan baik level nasional maupun internasional.

Di sisi lain, lulusan program studi S3 hendaknya memiliki kemampuan menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji melalui riset berbasis ipteks atau praktek professional, memiliki kemampuan pemecahan permasalahan ipteks dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, serta kemampuan mengelola, memimpin, melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemanusiaan pada lingkup nasional dan internasional.

Berkait dengan pembaharuan kurikulum tersebut, kurikulum program studi S2 Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang kemudian berubah menjadi program studi S2 Pendidikan Nonformal juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan KKNi tersebut di atas. Perubahan yang dimaksud menyangkut capaian hasil pembelajaran yang kemudian dirumuskan menjadi kompetensi lulusan yang menjadi acuan dalam menetapkan mata kuliah, rancangan pembelajaran, dan perangkat pelaksanaan pembelajaran yang lainnya, termasuk pemutakhiran bahan ajar.

Pembaruan kurikulum program studi S2 Pendidikan Nonformal (PNF) berkaitan dengan penerapan KKNi tersebut di atas, memunculkan antara lain satu mata kuliah baru yaitu mata kuliah "Inovasi Pendidikan Nonformal" dengan bobot 2 sks yang memiliki muatan teori dan praktek yang dimaksudkan sebagai bekal untuk menghasilkan berbagai program pendidikan nonformal yang inovatif untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional melalui peningkatan peran dan kapasitas pendidikan nonformal yang ada dan berkembang di masyarakat selama ini dan

kebutuhan pengembangan ke depan dalam konteks pendidikan yang holistik.

Mata kuliah Inovasi Pendidikan Nonformal relevan bagi mahasiswa S2 PNF/PLS karena, seperti dijelaskan di atas, berhubungan dengan kemampuan lulusan yang dihasilkan oleh program studi S2 PNF/PLS yaitu lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan program-program inovatif pendidikan nonformal melalui penelitian dan pengembangan serta kemampuan pemecahan permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan nonformal dengan pendekatan inter atau multidisipliner untuk kemanfaatan masyarakat dan keilmuan baik lingkup nasional maupun internasional.

Melihat peran strategis mata kuliah Inovasi Pendidikan Nonformal dan masih langkanya buku teks yang berkait dengan mata kuliah ini, maka pada tahun 2016 dilaksanakan penulisan buku ajar di program studi S2 PNF Program Pascasarjana UNY berupa buku teks tentang Inovasi Pendidikan Nonformal yang diperuntukan bagi mahasiswa program studi S2 PNF dan mahasiswa program studi lain yang ingin mendalami dan mengembangkan pendidikan nonformal pada ranah teori dan praktik pendidikan nonformal yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam konteks pendidikan nasional dan pemberdayaan masyarakat.

Buku yang ditulis untuk mahasiswa S2 PNF dan bertujuan untuk membekali mahasiswa S2 dengan kemampuan untuk mengembangkan program-program inovatif PNF secara garis besar terbagi dalam dua bagian, yaitu, bagian pertama menjelaskan tentang berbagai hal penting-strategis yang berkait dengan konsep inovasi, dan bagian kedua, menjelaskan ragam konsep, teori, dan praksis pendidikan nonformal dalam kondisi perkembangannya sampai pada tahun 2015 sepanjang sumber-sumber informasi yang tersedia dan terlacak dalam lingkup pengertian pendidikan luar

sekolah, pendidikan nonformal, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan berkelanjutan.

Uraian tentang konsep inovasi yang akan mendasari pembahasan tentang inovasi pendidikan nonformal berpangkal pada dua hal esensial yaitu menyangkut terjadinya perubahan, dan kedua, menyangkut ditemukannya hal “baru” dalam kaitannya dengan pemecahan masalah yang bermanfaat pada meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian inovasi selalu dikaitkan dengan terjadinya perubahan, munculnya hal baru, berkait dengan pemecahan masalah, dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia baik dalam bentuk produk, proses, pemasaran, maupun pengorganisasian. Hal ini bila inovasi diterapkan dalam dunia bisnis, sebagai salah satu contoh.

Pada awal perkembangan, pendidikan nonformal muncul dalam istilah pendidikan sosial (PS) sejalan dengan istilah pendidikan masyarakat (PM) dalam konteks pembangunan masyarakat. Berkembang kemudian, terutama di Indonesia, PS menjadi pendidikan luar sekolah (PLS) yang di dunia internasional praktek PLS hanya ada di Jepang. PLS berubah menjadi pendidikan nonformal (PNF) sejalan dengan hasil kajian UNESCO dan OECD yang lebih menitikberatkan pada konteks pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan. Istilah PNF sendiri banyak ditemui di Negara-negara sedang berkembang dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Dinegara maju PS, PLS, dan PNF kurang dikenal, lebih dikenal istilah pendidikan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan meski masih dalam konteks yang sama pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat.

Perkembangan PNF dimulai awal tahun 1970-an dalam bentuk pendidikan keaksaraan dalam konteks pendidikan dasar, dan pendidikan keterampilan dalam konteks pendidikan kejuruan untuk masyarakat. Bingkainya adalah pendidikan sepanjang hayat untuk membangun masyarakat menjadi masyarakat belajar.

Berkembangnya pemikiran pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan berpengaruh pada pendidikan nonformal yang kemudian mengadaptasi menjadi pendidikan nonformal berbasis pendidikan kecakapan hidup yang berkembang lagi kemudian menjadi pendidikan nonformal berbasis pendidikan kewirausahaan. Maka muncul antara lain, pendidikan kewirausahaan masyarakat. Pada tahap sebelumnya telah berkembang pula pemikiran dan praktek pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekonomi dan sosial-budaya.

Keberadaan pendidikan nonformal, dan istilah lain sebelum dan sesudahnya, dipicu oleh kenyataan bahwa pendidikan formal tidak berhasil sepenuhnya menyediakan kesempatan pendidikan bagi setiap warga Negara dan berdampak pada munculnya pendidikan formal. Kasus-kasus yang muncul berupa masih banyaknya warga Negara yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Kalau terlayanipun, muncul kasus baru, putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan formal di atasnya bahkan bisa memunculkan banyaknya pengangguran lulusan SD dan SMP yang kemudian menjadi tenaga kerja tidak terampil. Di sini berkembang pemikiran berikutnya bahwa pendidikan nonformal merupakan pengganti, pelengkap, dan penambah pendidikan formal dalam dua konteks yaitu meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

Akses pendidikan meningkat melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan. Demikian juga kualitas pendidikan yang berdampak pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Relevansi pendidikan bertambah melalui pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan keterampilan dan kursus yang memungkinkan peserta didik memperoleh keterampilan untuk bekerja dan mendapat

penghasilan. Pendidikan Nonformal berperan dalam mengurangi angka putus sekolah, angka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, dan mengurangi angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja untuk sektor informal yang tangguh terhadap guncangan ekonomi di sektor formal. Seperti di atas dikemukakan pendidikan nonformal dikembangkan atas dasar pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Mengacu pada beberapa pertimbangan pemikiran dan kenyataan tersebut di atas, maka buku yang menyajikan tentang Inovasi Pendidikan Nonformal ini dirancang isinya dalam tujuh bab secara berurutan. Bab I Pendahuluan berisi tentang seputar urgensi buku ini dalam perubahan kurikulum program studi S2 PNF dilihat dari sisi pentingnya inovasi dalam PNF baik dalam konteks perubahan dan menghasilkan sesuatu yang baru; serta pandangan sekilas tentang perkembangan PNF yang esensi dari buku ini, terutama dalam perkembangan teori dan praksis PNF yang dinamik mengikuti perubahan masyarakat yang terjadi. Melalui isi bab I ini diharapkan diperoleh pemahaman utuh dan komprehensif tentang pentingnya inovasi dalam pendidikan nonformal yang memberdayakan masyarakat.

Bab II Perspektif Baru Pendidikan Nonformal. Bab ini menguraikan tentang perkembangan pemikiran konsep pendidikan nonformal mulai dari awal sampai perkembangan terakhir disertai dengan uraian karakteristik masing-masing konsep yang berkembang itu yang memunculkan ragam program pendidikan nonformal yang baku serta program yang baru dikembangkan sesuai sasaran dan tujuan pendidikan nonformal yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Informasi tentang berbagai konsep dan program pendidikan nonformal di berbagai Negara akan disajikan pada Bab III tentang komparasi pendidikan nonformal di berbagai Negara yang

mencakup Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, serta secara khusus Asia Tenggara dan Thailand yang sudah lama berkembang baik dalam konsep pendidikan nonformal, pendidikan orang dewasa, maupun pendidikan berkelanjutan dalam konteks pendidikan holistik dan pengembangan masyarakat atau pembangunan nasional.

Uraian bab ini selain dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pendidikan nonformal di berbagai Negara itu, dimaksudkan pula untuk membandingkan ragam program yang dikembangkan di masing-masing Negara itu sebagai bahan pemikiran dan pemahaman baru atas perkembangan terkini pendidikan nonformal yang semula didasari oleh pemikiran pendidikan sepanjang hayat kemudian bergeser menjadi pemikiran pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks masyarakat belajar yang juga bergeser menjadi dalam konteks masyarakat berpengetahuan.

Bab IV menguraikan tentang inovasi pendidikan Nonformal sebagai tema utama dalam buku ini. Beberapa bagian atau subbab yang akan diuraikan mencakup konsep inovasi pendidikan, urgensi dan teori-teori pendidikan nonformal, termasuk aspek-aspek dan hambatan serta pendukung pengembangan pendidikan nonformal. Tujuan utama bab ini adalah membentangkan dasar-dasar konseptual yang dapat dipakai untuk melatarbelakangi pengembangan inovasi kelembagaan, ketenagaan, kelolaan, keprograman, dan pembelajaran pendidikan nonformal dalam berbagai satuan pendidikan nonformal baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Praksis-praksis pendidikan nonformal yang selama ini berkembang akan disajikan juga sebagai kondisi obyektif program-program pendidikan nonformal yang berhasil.

Ragam pendekatan inovasi pendidikan nonformal akan dibahas juga di Bab V. Dua pendekatan utama akan dijelaskan yaitu

pendekatan struktural dan pendekatan kultural, disamping pendekatan pendidikan, ekonomi, dan sosial sebagai bagian pendekatan komprehensif dari pendekatan inovasi pendidikan nonformal. Pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai akar dari pengembangan pendidikan nonformal akan dikembangkan lebih jauh ke arah yang lebih luas yaitu pendekatan pendidikan nonformal untuk membangun masyarakat berpengetahuan melalui pengembangan manajemen pengetahuan sebagai karakteristik perkembangan kehidupan global yang selalu secara terus menerus mengalami dinamika perkembangan yang memunculkan berbagai rumusan kompetensi umum abad 21.

Bab VI berisi kasus-kasus inovasi pendidikan nonformal. Bab ini menjelaskan tentang berbagai aspek yang perlu dikembangkan melalui kegiatan inovasi pendidikan nonformal seperti kurikulum, metoda dan media pembelajaran terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dijelaskan pula tentang lingkungan pendidikan nonformal yang berubah dengan berpengaruhnya lingkungan dunia maya dalam pendidikan. Ragam pengorganisasian atau kelembagaan pendidikan nonformal akan dibahas pula pada bab ini untuk meningkatkan kapasitas satuan-satuan pendidikan nonformal berbagai pemberdayaan masyarakat.

Buku ini diakhiri oleh bab VII tentang pengembangan kapasitas pendidikan nonformal yang akan menguraikan tentang bagaimana pendidikan nonformal dapat dikembangkan kemampuannya sebagai bagian dari pendidikan nasional yang dirancang untuk pengembangan masyarakat melalui berbagai program pendidikan nonformal yang berbasis pendidikan kecakapan hidup dan program pendidikan nonformal berbasis kewirausahaan masyarakat. Salah satu bentuk dasar inovasi pendidikan nonformal melalui komunitas praktis juga akan dibahas dalam bab ini yang dilengkapi dengan kajian tentang manajemen pengetahuan untuk inovasi pendidikan nonformal. Secara



keseluruhan bab ini akan membekali para mahasiswa S2 program studi PNF dengan kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan pengembangan kapasitas inovasi pendidikan nonformal sesuai dengan kompetensi lulusan S2 PNF untuk dapat menghasilkan berbagai karya inovatif teruji pendidikan nonformal baik pada sisi kelembagaan, ketenagaan, kepengelolaan, keprograman, maupun pembelajaran pada berbagai satuan pendidikan nonformal.

Sebagai penutup dalam uraian pendahuluan ini berikut disajikan informasi seputar visi, misi, profil lulusan, dan capaian pembelajaran program studi S2 PNF yang tertuang dalam Kurikulum Program Studi S2 PNF Tahun 2016.

### **Visi**

Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Nonformal yang unggul di kawasan Asia Tenggara dalam memperkuat kapasitas Pendidikan Nonformal yang berorientasi kewirausahaan sosial menuju masyarakat berbasis pengetahuan berlandaskan nilai-nilai ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

### **Misi**

- a. Mendidik calon sarjana S-2 (Magister) dengan keahlian Pendidikan Nonformal untuk pemberdayaan masyarakat yang kuat dalam inovasi program dan pembelajaran transformative berorientasi kewirausahaan sosial;
- b. Menghasilkan model program dan pembelajaran transformative dalam Pendidikan Nonformal untuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kewirausahaan social melalui penelitian dan pengembangan dengan pendekatan struktural dan kultural;
- c. Memberikan layanan professional sesuai dengan perkembangan masalah, kemajuan ipteks, dan isu-isu mutakhir PNF untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. Membangun kapasitas Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Nonformal dengan mengembangkan modal manusia, sosial, dan cultural sejalan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

### **Profil Lulusan**

Lulusan Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Nonformal sebagai pendidik pada pendidikan nonformal dapat bekerja sebagai:

- a. Dosen S-1 pada Program Studi Pendidikan Nonformal dan program studi yang sejenis di perguruan tinggi;
- b. Peneliti pada lembaga, pusat, atau balai penelitian pendidikan dan pelatihan Pendidikan Nonformal;
- c. Pengembang program dan pembelajaran Pendidikan Nonformal pada satuan pendidikan nonformal;
- d. Konsultasn pemberdayaan masyarakat.

### **Capaian Pembelajaran**

- a. Sikap
  - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
  - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**b. Pengetahuan**

- 1) Menerapkan filosofi, teori, dan metodologi untuk menghasilkan inovasi model program dan praktik pembelajaran Pendidikan Nonformal;
- 2) Menguasai konsep dan teori pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, pendidikan nonformal, pendidikan orang dewasa, dan pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan inovasi model program dan praktek pembelajaran pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan nasional yang holistik dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Menguasai konsep dan teori pengembangan modal manusia, sosial dan modal kultural serta sistem dan kebijakan kewirausahaan sosial sebagai substansi, metoda, dan konteks pengembangan;
- 4) Menguasai teori dan metodologi inovasi model program dan praktik pembelajaran Pendidikan Nonformal untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan;
- 5) Menguasai konsep dan teori untuk melakukan kerjasama sinergis dengan berbagai keahlian untuk menguasai dan memecahkan masalah dalam bidang Pendidikan Nonformal melalui model program dan praktik pembelajaran yang dihasilkan dalam hubungan dialektis dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan nasional dan daerah;
- 6) Menguasai teori dan metodologi untuk menghasilkan, mempublikasikan, dan mendesiminasikan penerapan hasil riset dan inovasi model program dan praktik pembelajaran Pendidikan Nonformal pada tingkat nasional dan internasional.

**c. Keterampilan Umum**

- 1) Mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengelola, mengembangkan, dan melakukan inovasi program dan pembelajaran pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Mengelola informasi dan pengetahuan berbasis penerapan kaidah-kaidah dan etika akademik untuk mengambil keputusan strategik dalam mengembangkan inovasi model

program dan pembelajaran pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat;

- 3) Mengembangkan kemaslahatan bersama berlandaskan kaidah-kaidah dan etika sosial untuk membangun tanggung jawab individu dan kolektif dalam mengembangkan inovasi program dan pembelajaran pendidikan nonformal secara bermartabat;
- 4) Melaksanakan pendekatan lintas dan multidisiplin dalam membangun pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan inovasi program dan pembelajaran pendidikan nonformal yang mendidik.

#### d. Keterampilan Khusus

- 1) Melakukan asesmen evikatif (bermakna) untuk merencanakan pengembangan dan inovasi model program dan pembelajaran pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat;
- 2) Merencanakan pengembangan dan inovasi model program dan pembelajaran pendidikan nonformal dalam bidang pengembangan manusia, pengembangan masyarakat, kewirausahaan sosial, dan pendidikan keluarga dalam konteks pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
- 3) Melaksanakan pengembangan dan inovasi model program dan pembelajaran pendidikan nonformal dalam bidang pengembangan manusia, pengembangan masyarakat, kewirausahaan sosial, dan pendidikan keluarga dalam konteks pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
- 4) Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan, pengembangan, dan inovasi model program dan pembelajaran pendidikan nonformal secara berkesinambungan;
- 5) Menyebarluaskan hasil inovasi program dan pembelajaran pendidikan nonformal dalam berbagai peminatan melalui media publikasi cetak dan elektronik.

# Bab 2

## PERSPEKTIF PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab ini menguraikan berbagai perspektif perjalanan pendidikan nonformal yang mencakup ragam konsep pendidikan nonformal, karakteristik pendidikan nonformal, dan perkembangan program-program pendidikan nonformal. Selain itu akan ditambahkan pula uraian tentang sasaran dan kebijakan pendidikan nonformal di Indonesia. Tujuan dari bab ini adalah meningkatnya pemahaman para mahasiswa dan pembaca terhadap pendidikan nonformal secara komprehensif sebagai bekal konseptual dan praktis untuk mengembangkan program-program inovatif-teruji pendidikan nonformal dan dimensi-dimensi lain dari

pendidikan nonformal dalam praktik di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan nasional yang holistik.

### **A. Konsep Pendidikan Nonformal**

Untuk memahami konsep pendidikan nonformal, sebelumnya perlu dikenalkan konsep lain yang menyertai muncul dan berkembangnya konsep pendidikan nonformal. Konsep yang dimaksud mencakup konsep yang berkembang dalam buku teks lingkup antarbangsa dan konsep yang berkembang secara khusus di Indonesia sebagai respon atas perkembangan konsep dan praksis pendidikan nonformal di dunia.

Beberapa konsep yang berkembang di Indonesia adalah pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan nonformal. Dibarengi di belahan dunia lain berkembang pendidikan dasar (*fundamental education*), pendidikan masyarakat (*mass education*), pendidikan orang dewasa (*adult education*), pendidikan perluasan (*extension education*), pendidikan pascasekolah (*recurrent education*) dan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*). Ragam konsep ini menarik dikaji terlebih dahulu karena di dalamnya terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan (Yoyon Suryono, 2008; Yoko Arai, 2009; Santoso, 1956).

Setiap konsep memiliki konteksnya sendiri-sendiri. Konteks pada tahap awal adalah pembangunan masyarakat (*community development*), berkembang menjadi pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), dan masyarakat belajar (*learning society*). Sisi lain dari konteks itu kini muncul gerakan pendidikan holistik, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*).

Pendidikan Masyarakat berkembang di Indonesia sejak tahun 1946 yang merupakan upaya pendidikan kepada orang dewasa di luar lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memberikan kecakapan baca-tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekelilingnya (Santoso, 1956). Pendidikan Sosial yang memiliki pengertian mirip dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan nonformal sekarang, berkembang di Indonesia sejak tahun 1950an terutama di kalangan perguruan tinggi yang sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan sosial di Jepang yang dikenal dengan istilah "*Shakai Kyouikiu*" (Yoki Arai, 2009). Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Sosial itu dalam praktek di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran pembangunan masyarakat (*community development*) dengan program-program utama dalam lingkup pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, atau pembangunan masyarakat (Santoso, 1956).

Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Sosial di Indonesia berubah nama menjadi Pendidikan Luar Sekolah pada tahun 1982 yang mencakup pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah tidak banyak beda dengan pengertian Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Nonformal yang berkembang kemudian. Esensinya adalah setiap kegiatan pendidikan terorganisasi yang terjadi di luar sistem persekolahan. Sementara itu, konsep pendidikan dasar, pendidikan orang dewasa, pendidikan perluasan, dan pendidikan berkelanjutan mengandung kesamaan sasaran garapan orang dewasa, memberi pengetahuan dasar dan keterampilan hidup serta pengembangan pribadi secara berkelanjutan dalam latar sekolah dan luar sekolah.

Untuk memperkaya wawasan tentang pendidikan nonformal dalam tulisan ini, berikut disajikan penggalan tulisan dari naskah yang berjudul "Politik Pendidikan Nonformal dalam Membangun Masyarakat Belajar yang Demokratis" (Yoyon Suryono, 2008).

Dalam tiga dasawarsa terakhir ini terjadi lonjakan peningkatan kegiatan pendidikan nonformal di masyarakat sebagai akibat dari mulai lunturnya peran pendidikan formal dan tumbuhnya perhatian terhadap pendidikan informal yang mendorong meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap eksistensi pendidikan nonformal. Salah satu yang menarik dilihat dari sudut kisah sukses *unschool learning* seperti pendapat Howard Gardner (Suyata, 2007) adalah keberhasilan mengintegrasikan kegiatan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu bagian dari kajian pendidikan nonformal dan sekaligus menyatukan pengelolaannya yang semula menyebar di beberapa direktorat bahkan departemen ke dalam satu pengelolaan terpadu di satu direktorat di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang disertai dengan penyediaan anggaran yang mulai memadai meskipun masih belum seperti yang diharapkan.

Ke depan, dalam membangun masyarakat belajar yang demokratis, kegiatan pendidikan nonformal masih harus terus menerus ditingkatkan. Kondisi yang ada pada saat ini seperti banyaknya warga sasaran, tingginya tuntutan kebutuhan pendidikan di luar pendidikan formal, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus dan berkelanjutan, serta perlu dipenuhinya kebutuhan pemberdayaan masyarakat, menjadi dasar faktual bagi upaya peningkatan pendidikan nonformal.

Dilihat dari sisi konsep, untuk mengembangkan pendidikan nonformal ke depan, yang mulai dikenal secara akademik sejak awal tahun 1970an, pertama-tama perlulah memperhatikan pemikiran dalam perspektif yang bercorak individualistik yaitu pendidikan seumur hidup yang diperkenalkan oleh Paul Lengrad melalui tulisannya yang berjudul *An Introduction to Lifelong Education* yang kemudian melahirkan konsep pendidikan formal, nonformal, dan informal (Coombs, 1973).

Berbarengan dengan itu perlu pula diperhatikan apa yang dikembangkan kemudian oleh Coombs dan Ahmed (1974) yang meletakkan pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam



perspektif yang bercorak sosialistik dengan meneliti dan membahas kelemahan pendidikan di pedesaan dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat melalui kajian kemiskinan. Karya Coombs dan Ahmed itu ditulis bersama dalam buku yang berjudul *“Attacking Rural Poverty, How Nonformal Education Can Help”*.

Dua perspektif penting yang memiliki kontribusi terhadap kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan nonformal yang perlu dikemukakan di sini adalah, pertama, pendapat Ivan Illich yang berpandangan radikal dan tergolong kaum humanis romantis melalui karyanya *Deschooling Society* (1970). Menurut pendapat Illich diperlukan pendidikan alternatif selain sekolah, karena sekolah dinilainya telah gagal; sekolah dengan segala atribut yang dimiliki telah mengasingkan siswa dari kehidupannya. *Kedua*, pendapat yang termasuk kelompok humanis realistik, Edgar Faure (1972), dalam laporannya yang berjudul *Lifelong Education for To Day and Tomorrow* yang memunculkan *konsep learning to be dan the learning society* (Sutaryat Trisnamansyah, 2008).

Perkembangan berikutnya, perspektif penting lain di bidang pendidikan, secara lebih khusus pendidikan nonformal, dan lebih luas dalam bidang pembangunan masyarakat, dikemukakan oleh Paulo Freire, seorang filsof Brasil yang Kristen-sosialis beraliran realisme-kritis, yang menyatakan bahwa perlu adanya pembebasan masyarakat atas belenggu kekuasaan struktural. Dalam pandangan Freire (Mansour Fakih, 2001) pendidikan itu adalah proses memanusiasikan kembali manusia; sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat menjadikan masyarakat mengalami proses dehumanisasi seperti ditulis dalam salah satu buku Freire yang terkenal *Pedagogy of the Oppressed* (1972).

Peter Jarvis, seorang Profesor *Continuing Education* di Universitas Surrey Inggris yang cenderung berpandangan konstruktivisme, dalam buku pertama yang berjudul *Adult Education & Lifelong Learning* (2004) mengetengahkan perspektif pendidikan nonformal dalam konteks pembelajaran orang dewasa sepanjang

hayat. Pada buku kedua yang berjudul *Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society* (2007) Jarvis berpendapat tentang perlunya menelaah konteks sosial dan struktural dari belajar sepanjang hayat dalam perspektif baru yang disebutnya globalisasi, masyarakat pengetahuan dan informasi, serta masyarakat belajar.

Secara khusus dalam proses pembelajaran, terdapat sejumlah perspektif yang mengemuka selain Freire, yang mengembangkan pembelajaran pendidikan nonformal melalui refleksi dan aksi yang disebutnya praksis dengan konsep *problem posing education* yang menggantikan *banking method*, yaitu Malcolm Knowles (1978) yang tergolong kaum humanis dengan *Andragogi* dan *self-directive learning*; Jack Mezirow (1977) yang berbau konstruktivisme dengan pembelajaran transformasional melalui refleksi pengalaman; Carl Rogers (1969) yang berciri *humanis romantik* dengan pandangan psikologi humanistik yang menekankan pada *self-actualization*, dan tokoh *berpandangan behaviorisme pragmatik*, yaitu Robert M. Gagne (1977) yang mengembangkan pembelajaran pemecahan masalah yang merupakan salah satu dari hirarki model pembelajaran yang dikembangkannya.

Perlu juga dikemukakan dalam kelompok ini adalah perspektif *action knowledge* yang dikembangkan oleh Douglas Barnes (1977) dan perspektif *experiential learning* yang dikembangkan oleh David Kolb (1984) yang juga berpandangan konstruktivisme, David Boud (1991) yang berpandangan kontekstualisme, dan oleh Donald Schön yang berpandangan reflektivisme (Fenwick, 2001; Jarvis, 2004; dan Sodiq A Kuntoro, 2008).

Definisi klasik mengenai pendidikan nonformal dikemukakan oleh Coombs dan Ahmed (1985) bahwa pendidikan nonformal (PNF) adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam

mencapai tujuan belajarnya. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan belajar warga masyarakat dimana kebutuhan pendidikan sangat beragam, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, membangun kehidupan social yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan berpolitik yang partisipatoris.

Istilah pendidikan nonformal sering dipertentangkan dengan pendidikan formal dan pendidikan informal. Kedua konsep ini memiliki persamaan yaitu diselenggarakan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses pembelajaran yang informal tegasnya untuk menggairahkan serta mempermudah beberapa jenis pelajaran tertentu yang bernilai tinggi (misalnya membaca dan menulis) yang kurang mudah dan kurang cepat diperoleh oleh seseorang sendiri dan dengan menampung ajaran dari lingkungan saja. Keduanya memiliki perbedaan dimana program pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal yaitu: tujuan diorientasikan jangka pendek, relatif singkat dan berorientasi sekarang, kurikulum berpusat pada kebutuhan peserta didik, struktur program yang luwes, pembelajaran berpusat pada peserta didik, menggunakan sumber-sumber yang ada, dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama (Sudjana, 2001).

Dalam konteks pembangunan desa, Coombs & Ahmed (1985) menjelaskan kegiatan pendidikan nonformal mencakup program penyuluhan pertanian dan pelatihan kaum petani, program melek-huruf bagi orang dewasa, pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, perkumpulan remaja dengan tujuan pendidikan, dan berbagai program pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, koperasi dan lain sebagainya. Evans (1981) menggolongkan pendidikan nonformal ke dalam klasifikasi: (a) pendidikan

pelengkap yang saling melengkapi dengan kurikulum sekolah, (b) pendidikan penambah yang menambahi kekurangan pendidikan sekolah pada tempat dan waktu yang berlainan, (c) pendidikan pengganti yang menggantikan sama sekali pendidikan sekolah, dan (d) proses pendidikan terintegrasi yang tersedia sepanjang hayat.

## **B. Karakteristik Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal dapat dilihat dari tujuan pendidikannya. Terkait dengan sistem pendidikan formal, Stimkins (Kedyarate, 2012) menyatakan bahwa pendidikan nonformal dilaksanakan untuk menyediakan nilai, pengetahuan dan keterampilan dengan biaya yang terjangkau dan menyediakan alternatif murah untuk menyediakan keterampilan yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi. Tujuan pendidikan ini ingin dicapai dikarenakan pendidikan formal dipandang gagal untuk memenuhi tujuan dimaksud. Evans (1981) menekankan pendidikan nonformal menyediakan kesempatan untuk belajar keterampilan produktif dan suatu cara untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan nonformal dapat berfungsi:

*“to promote an increased awareness among people of the need for substantial social change. From this perspective, nonformal education which includes a strong component of consciousness-raising, and which gradually develops in learners a sense of responsibility and a sense of the need to press for changes, can be an important part of the reform process (Evans, 1980).*

Senada dengan pemikiran di atas, Folley (2000) dalam konteks memahami pendidikan orang dewasa menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nonformal diarahkan pada: 1) peningkatan kemampuan kognitif individu melalui pemberian pengetahuan

yang bermakna; 2) pengembangan kualitas diri menuju pencapaian pribadi yang bahagia dan beraktualisasi diri (*self fulfillment*); 3) memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan (*growth*) pada individu dan memelihara masyarakat demokratis yang baik; individu yang bebas memungkinkan dilihat sebagai pendukung demokrasi yang sehat; 4) merubah dan/atau mempertahankan tatanan sosial dimana pendidikan menjadi sarana untuk melakukan transformasi sosial; dan 5) pendidikan dimaksudkan untuk mencapai keefektifan organisasi dimana pendidikan dipandang sebagai upaya mengembangkan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membantu organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Tujuan yang lain adalah pendidikan nonformal sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*). Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pendidikan nonformal menyediakan kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat memiliki makna bahwa pembelajaran atau pendidikan terjadi selama manusia hidup di alam semesta dan terjadi dimana pun manusia berada. Dengan demikian, pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan Lengrand (Paulston & LeRoy, 1982) berfungsi menyediakan berbagai layanan belajar yang beragam dan massif bagi setiap warga masyarakat yang menginginkan kemajuan dalam diri dan kehidupannya, sekaligus menyadarkan warga masyarakat mengenai urgensi budaya gemar belajar yang mengarahkan pada pembentukan masyarakat yang gemar belajar (*learning society*).

Dalam konteks Indonesia, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman praksis pendidikan nonformal, dalam kotak di bawah ini dikutip beberapa bagian dari tulisan tentang pendidikan nonformal (Yoyon Suryono, 2008).

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, konsep pendidikan nonformal yang dikenal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu juga dicermati dan dipahami untuk dapat mengembangkannya ke masa depan. Secara eksplisit dalam kaitan dengan undang-undang itu, pendidikan nonformal yang didefinisikan sebagai *"jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang"* lebih dipahami dalam lingkup Departemen Pendidikan Nasional dan memiliki bidang garapan pokok yang mencakup: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Meskipun pendidikan nonformal sudah diakui eksistensinya melalui rumusan dalam undang-undang dan berbagai kebijakan, tetapi justru pada tataran undang-undang dan kebijakan itu, pendidikan nonformal menghadapi permasalahan mendasar yang berupa: (a) masih diposisikan sebagai peran "pembantu" bagi pendidikan formal, (b) masih memerlukan proses evaluasi bagi pengakuan kesetaraan antara pendidikan nonformal dan pendidikan formal, dan (c) dibatasi hanya pada aktifitas pendidikan nonformal di dalam lingkup Departemen Pendidikan Nasional. Salah satu contoh aktual semenjak tingkat kelulusan ujian nasional cenderung menurun, adalah kebijakan diperbolehkannya para siswa SMP dan SMA/SMK yang tidak lulus ujian nasional dapat mengikuti ujian kesetaraan Paket B dan Paket C.

Pendidikan nonformal memiliki banyak sasaran warga belajar yang tidak dapat ditangani oleh sekolah secara tunggal seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dilihat menurut Indeks Pembangunan Manusia, banyaknya warga masyarakat miskin dan buta huruf, pengangguran terdidik, anak balita dan anak usia sekolah yang belum terlayani oleh sekolah di samping

banyaknya anak putus sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Di sini pendidikan nonformal menghadapi permasalahan yang berupa keragaman sasaran dan sebaran sasaran secara geografis yang begitu luas.

Telah banyak dikembangkan model-model program pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mencakup kedelapan bidang garapan pendidikan nonformal, tetapi dari pengalaman selama ini diperoleh kesan bahwa program-program yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut bersifat sesaat, insidental, dan bahkan aksidental bergantung pada naik-turunnya program-program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah (Depdiknas) sesuai anggaran yang disediakan, kecuali pelatihan tertentu di tempat kerja. Belum banyak dikembangkan program-program pendidikan nonformal yang betul-betul berbasis pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan secara berkelanjutan dan dilaksanakan dengan tanpa sangat tergantung pada dana pemerintah.

Banyak satuan pendidikan nonformal dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan mutu yang sangat bervariasi. Begitu juga banyak satuan pendidikan nonformal itu didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sendiri dengan jumlah dan kemampuan yang masih terbatas seperti pengelola dan tutor. Selain itu, pengembangan pendidikan nonformal masih menghadapi kendala rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan program pendidikan nonformal yang memiliki tingkat relevansi dan efektifitas yang tinggi.

Implementasi program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Di sisi lain ketergantungan pembiayaan kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap dana-dana yang berasal dari pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan program-program pendidikan nonformal masih sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah melalui mekanisme APBN

dan APBD, termasuk, bila memungkinkan, pinjaman dari negara-negara donor yang selalu mengikat. Masih sangat sedikit sekali tersedia dana bagi pengembangan program pendidikan nonformal yang berasal dari masyarakat.

Pendidikan nonformal selama ini dilaksanakan dengan sarana dan prasarana apa adanya. Prinsip demikian itu di satu sisi ada benarnya, tetapi di sisi lain tidak akan dapat meningkatkan mutu keluaran seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, permasalahan mendasar dalam upaya mengembangkan pendidikan nonformal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dan yang dapat diadakan oleh masyarakat. Banyak dan bervariasinya sasaran warga belajar dan sebaran warga belajar yang sulit dijangkau secara geografis, dalam banyak hal memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana khusus yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat yang memiliki dan mengelola satuan-satuan pendidikan nonformal.

### **C. Program Pendidikan Nonformal**

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, beragam bentuk pendidikan nonformal diselenggarakan sesuai dengan keragaman sosial-ekonomi dari kelompok sasaran yang dilayani. Terkait dengan ini, La Belle (1981) menyatakan bentuk-bentuk pendidikan nonformal adalah pendidikan untuk anak dan pemuda dengan fokus pada pengembangan individual anak sebagai anggota dalam masyarakat baik dalam bentuk program dari pihak swasta maupun pemerintah; pendidikan untuk orang dewasa yang dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas individu dan sosial misal kegiatan pendidikan moral, pendidikan kesenian, pemecahan masalah, pemanfaatan waktu luang, dan literasi; dan mengembangkan kualitas kesehatan dan keselamatan misal kegiatan pendidikan keluarga dan kesehatan mental, dan pelatihan kerja yang dimaksudkan untuk membekali keterampilan untuk bekerja yang mungkin tidak dapat diperoleh dari sekolah.



Hoppers (2006) menyatakan bahwa pendidikan nonformal mencakup pendidikan *para-formal* (*para-formal education*), pendidikan populer, pengembangan pribadi, pelatihan vokasional dan profesional, keaksaraan dengan pengembangan keterampilan, dan program-program suplemen pendidikan nonformal.

Seperti di bagian atas dijelaskan bahwa dalam konteks pembangunan desa, Coombs & Ahmed (1985) menjelaskan kegiatan pendidikan nonformal mencakup program penyuluhan pertanian dan pelatihan kaum petani, program melek-huruf bagi orang dewasa, pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, perkumpulan remaja dengan tujuan pendidikan, dan berbagai program pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, koperasi dan lain sebagainya.

Dengan cara yang berbeda, Evans (1981) menggolongkan pendidikan nonformal ke dalam klasifikasi: (a) pendidikan pelengkap yang saling melengkapi dengan kurikulum sekolah, (b) pendidikan penambah yang menambahi kekurangan pendidikan sekolah pada tempat dan waktu yang berlainan, (c) pendidikan pengganti yang menggantikan sama sekali pendidikan sekolah, dan (d) proses pendidikan terintegrasi yang tersedia sepanjang hayat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia mengklasifikasikan pendidikan nonformal dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dalam tulisan ini perlulah pula program-program pendidikan nonformal yang sekarang dilaksanakan itu dibandingkan dengan program-program pendidikan masyarakat (memiliki arti sama dengan pendidikan nonformal) yang dilaksanakan dan dikembangkan

kan sejak tahun 1946 (Santoso, 1956) yang berupa (ejaan sudah disesuaikan): pemberantasan buta huruf (PBH), kursus kemasyarakatan orang dewasa (KKOD), kursus kader masyarakat (KKM), taman pustaka rakyat (TPR), kewanitaan, kepemudaan, kependuan (sekarang pramuka), dan keolahragaan.

Dari beberapa pendapat tentang program pendidikan nonformal seperti dikemukakan di atas, beberapa butir penting dapat dirangkum (1) sasaran mencakup anak, pemuda, dan orang dewasa, (2) kegiatan bercorak pemenuhan pendidikan dasar dan pendidikan kepetrampilan atau vokasi yang dapat dipergunakan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, (3) mengembangkan semua potensi manusia, dan (4) memenuhi hak dasar manusia akan pendidikan yang tidak dapat dilayani oleh pendidikan persekolahan. Pendidikan keterampilan atau pendidikan vokasi dikemas dalam bentuk yang lebih luas menjadi pendidikan kecakapan hidup. Sementara itu kecakapan untuk berusaha secara ekonomi dikemas dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Apapun bentuk program pendidikan nonformal yang dilaksanakan, pertanyaan mendasarnya adalah apakah program pendidikan nonformal yang dilaksanakan itu mampu meningkatkan kualitas manusia dari sisi upaya pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan manusia yang strategis, terutama menyongsong kehidupan manusia di masa depan. Berikut disajikan gambaran peraan pendidikan nonformal di masa depan (Yoyon Suryono, 2008).

Meskipun pendidikan nonformal selalu dalam posisi terpinggirkan dibandingkan pendidikan formal, namun demikian hendaknya pendidikan nonformal dapat diposisikan perannya secara konsisten dan konsekuen dalam konteks pendidikan nasional sebagai pelengkap (*complementary education*) yang saling melengkapi dengan pendidikan formal, penambah (*supplementary education*) yang menambahi kekurangan pendidikan formal pada tempat dan waktu yang berlainan, pengganti (*replacement*)

*education*) yang menggantikan sama sekali pendidikan formal, dan menyatu (*unified process of education*) yang menyediakan pendidikan sepanjang hayat, secara benar dan utuh dalam membantu mengembangkan potensi manusia dan masyarakatnya (Evans, 1981 dan Sumarno, 2007).

Dalam konteks pembangunan masyarakat dan perubahan sosial diharapkan juga pendidikan nonformal dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk berbagai pilihan: (a) *the basic education approach*, yaitu pendidikan nonformal yang memberikan pengalaman pembelajaran dasar bagi semua seperti literasi dan numerasi dasar, keterampilan vokasional, dan nilai-nilai dasar kewarganegaraan, (b) *merger of formal and nonformal education* ke dalam suatu kesatuan sistem yang dimulai dengan analisis fungsional tujuan-tujuan pembelajaran dan analisis lingkungan dan pendekatan pembelajaran yang paling cocok dengan tujuan dan kondisi warga belajar, (c) *noncompetitive nonformal education* yang bersifat lebih fleksibel dan pendidikan diperlakukan sebagai bagian terpadu dari aktivitas pembangunan nasional (Evans, 1981 dan Sumarno, 2007).

Pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan yang melaksanakan fungsi dan misi pendidikan hendaknya mampu melaksanakan fungsi dan misinya itu dalam mengembangkan segenap potensi manusia dalam kaitannya dengan pengembangan individu dan masyarakatnya secara fungsional baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Beberapa aspek penting dari fungsi dan misi pendidikan yang biasanya "dilupakan" oleh pendidikan formal persekolahan adalah (a) pembentukan karakter, kapabilitas, kredibilitas yang khas, kokoh, dan harmonis, (b) pembentukan orientasi kebangsaan, (c) fasilitasi tumbuhnya *social ethic*, dan (d) pembentukan *ethical society* yang hendaknya menjadi prioritas aktivitas pendidikan nonformal (Sumarno, 2007).

Secara khusus, misi utama pendidikan nonformal harus memiliki keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan

(antara lain terjadi karena proses kemiskinan struktural) dan lingkungan yang semakin rusak, sehingga dengan demikian segenap aktifitas pendidikan nonformal selalu didasarkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia (individu dan masyarakatnya) dan pelestarian sumber daya alam yang dimiliki berbasis pada kebutuhan riil individu dan masyarakat yang terpinggirkan itu, bukan kepentingan proyek.

Pendidikan nonformal, sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional, dapatlah berperan melaksanakan kebijakan pemerataan pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan nonformal yang watak dasarnya adalah populis bukan elitis, dapatlah mampu memberikan kemudahan kepada individu dan masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lebih dari itu, pendidikan nonformal penting untuk mengembangkan keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan tetap memperhatikan pentingnya kualitas pendidikan yang bisa menjawab tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan masyarakat.

Pada tingkat makro pendidikan nonformal dapatlah pula berperan melakukan pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui program dan kegiatan pendidikan nonformal yang tanggap terhadap pembangunan berkelanjutan, pengembangan demokrasi, desentralisasi, dan otonomi dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengurangi sejauh mungkin dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi, menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan yang universal, dan membantu terbentuknya kehidupan masyarakat dengan kemajemukan multidimensional.

#### **D. Sasaran Pendidikan Nonformal**

Sasaran pendidikan nonformal pada awal kelahirannya bercirikan orang dewasa yang memiliki serba keteringgalan: pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tiga ciri utama sasaran pendidikan nonformal ketika itu adalah kemiskinan,

kebodohan, dan ketertinggalan. Konteks pendidikan nonformal adalah Negara yang tertinggal dan Negara sedang berkembang. Itulah sebabnya mengapa pendidikan nonformal melekat pada Negara-negara Asia dan Afrika, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Sejalan dengan perjalanan waktu, sasaran pendidikan nonformal mengalami perluasan mengikuti kegagalan pendidikan persekolahan yang muncul dalam bentuk banyaknya anak yang tidak tertampung di sekolah, anak putus sekolah, anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan lulusan berbagai jenjang pendidikan yang tidak dapat bekerja, menjadi peangguran. Perkembangan ini memperluas sasaran pendidikan nonformal yang mencakup anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan bahkan penduduk lanjut usia. Kelompok penduduk ini pada umumnya tidak terlayani oleh pendidikan formal, dan menjadi sasaran pendidikan nonformal, tepatnya menjadi beban berat pendidikan nonformal. Kenyataan ini memunculkan pendapat bahwa pendidikan nonformal menggarap "sisa-sisa" pendidikan formal. Di sinilah muncul aliran yang disebut "reduksionisme" dalam pendidikan nonformal. Aliran ini sebenarnya tidak saja berlaku untuk pendidikan nonformal, namun juga berlaku bagi pendidikan persekolahan, karena salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal adalah reduksionisme ini.

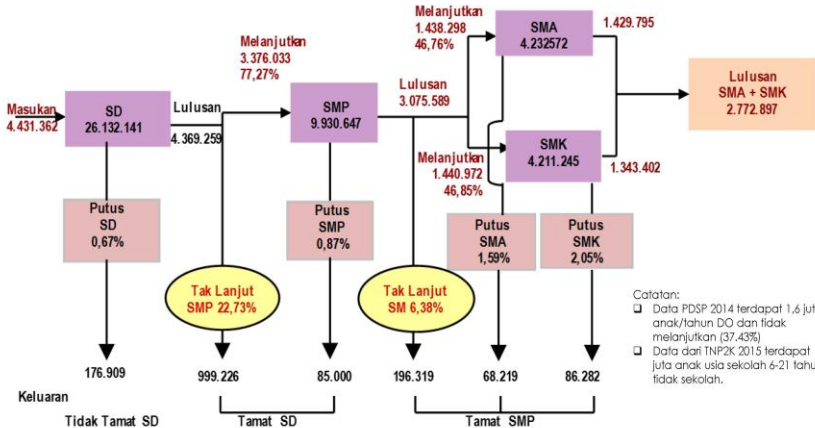
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman yang antara lain dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sasaran pendidikan nonformal mengalami pergeseran dan perluasan yang menginspirasi munculnya konsep pendidikan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan. Pergeseran dan perluasan yang dimaksud menempatkan semua orang: anak, remaja, pemuda, orang dewasa, lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan semuanya adalah sasaran pendidikan nonformal, pendidikan orang dewasa atau pendidikan berkelanjutan sebagai konsekuensi dari

penerapan asas pendidikan sepanjang hayat atau pembelajaran sepanjang hayat. Tentu dalam konteks ini terjadi penggolongan dan pengklasifikasian sasaran pendidikan nonformal.

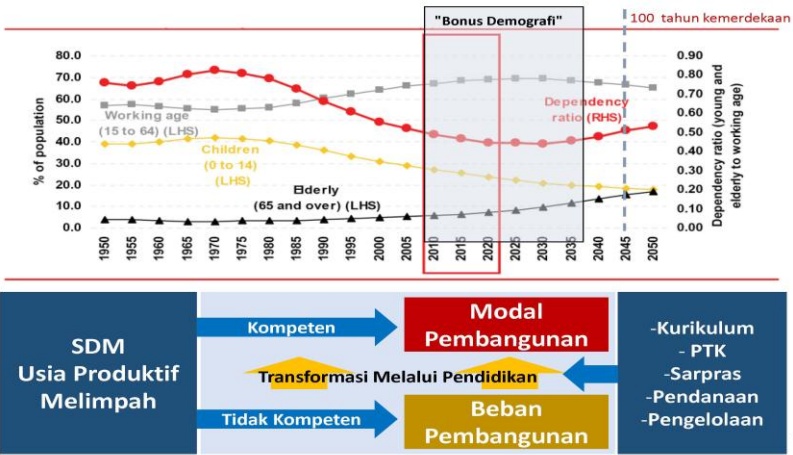
Sebagai ilustrasi sasaran pendidikan nonformal secara kuantitatif saat ini, disajikan data sasaran yang ada di Indonesia sebagai bahan perbandingan untuk memberi gambaran ragam sasaran yang menjadi bidang garapan pendidikan nonformal dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat dan pembelajaran sepanjang hayat dalam bingkai globalisasi pada umumnya dan masyarakat ekonomi ASEAN pada khususnya dimana Indonesia menjadi bagian dari konstelasi regional dan global. Berikut data yang dimaksud untuk Indonesia.

Sasaran pendidikan nonformal di Indonesia dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut. Jumlah putus sekolah (SD) dan tidak tamat SD masih sekitar 0,67% dari seluruh jumlah anak yang masuk SD sebanyak 4.431.362 anak. Dari jumlah ini terdapat pula 22,73% anak lulusan SD tidak dapat melanjutkan ke SMP. Di tingkat SMP terdapat anak putus sekolah sebesar 0,87% dari jumlah anak SMP sejumlah 9.930.647 anak. Sementara anak yang tidak dapat melanjutkan ke SM tercatat ada 6,38% atau 196.319 anak. Di tingkat SMA dan SMK, atas putus sekolah terdapat 1,96% dan 2,65%. Bila digabung, maka jumlah anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK sebanyak 10,01%. Data ini belum termasuk di jenjang Perguruan Tinggi. Dari data ini saja dapat diketahui bahwa sasaran pendidikan nonformal terdiri atas anak tidak tamat SD, anak tamat SD tidak melanjutkan, anak tidak tamat SMP dan anak tamat SMP tidak melanjutkan, anak tidak tamat SMA/SMK, dan anak tamat SMA/SMK tidak melanjutkan. Kelompok ini merupakan potensi tenaga kerja yang tidak terampil dan cenderung menjadi kelompok menganggur. Walaupun bekerja kelompok ini tertampung pada pekerjaan sektor informal. Untuk mencermati lebih rinci hal ini, berikut disajikan Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah.

### Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah



Potensi sasaran pendidikan nonformal dalam jangka waktu 25 tahun ke depan berkaitan dengan tantangan bonus demografi pada tahun 2045 sebagaimana disajikan pada grafik berikut. Kelompok penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun) sejak tahun 2010 sampai 2040 akan mengalami kenaikan persentase antara 65-65% dari jumlah penduduk.. Demikian juga untuk penduduk lanjut usia di atas 65 tahun mengalami kenaikan persentasenya mencapai sekitar 20%, berbeda dengan penduduk anak-anak usia 0-14 tahun yang mengalami penurunan dari sekitar 40% menjadi sekitar 20%. Angka *dependency ratio* berada pada 0,70. Gambaran ini menunjukkan bahwa bonus demografi yang dimaksud harus menjadi modal pembangunan dan oleh karena itu harus diwujudkan melalui ikhtiar pendidikan formal, nonformal, dan juga informal agar bonus demografi tidak menjadi sebaliknya, beban pembangunan. Tugas pendidikan nonformal di sini adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja hingga menjadi tenaga kerja yang produktif dan inovatif, berbarengan dengan upaya lebih menyejahterakan penduduk usia lanjut yang bertambah.



Tugas pendidikan nonformal selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan atau kompetensi tenaga kerja yang tidak terampil menjadi tenaga terampil bahkan menjadi tenaga ahli. Tugas ini muncul karena ternyata struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD/ sederajat yang berjumlah 54 juta orang; tenaga kerja berpendidikan SMP/ sederajat sekitar 20,4 juta; dan tenaga kerja berpendidikan SMA/ sederajat berjumlah 29,1 juta orang. Bandingkan dengan jumlah tenaga kerja lulusan D1/2/3/akademi yang tercatat sebanyak 3 juta orang dan tenaga kerja berpendidikan universitas sejumlah 8,3 juta. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dilihat menurut pendidikan tersebut di atas, seluruhnya berjumlah 114,6 juta orang. Bila dibatasi pada tenaga kerja berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah maka sasaran pendidikan nonformal yang memerlukan peningkatan kemampuan kerja sudah tercatat lebih dari 100 juta orang; suatu jumlah yang amat besar. Variasi jenis pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja itu meliputi bekerja sendiri, berusaha dibantu pekerja lain tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, bekerja bebas dipertanian, bekerja bebas nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.



Pergeseran dan perluasan sasaran pendidikan nonformal akan terus terjadi sesuai dengan tantangan yang dihadapi ke depan. Siapkah pendidikan nonformal menghadapi tantangan yang akan terjadi itu. Berikut cuplikan tulisan yang menggambarkan tantangan yang akan dihadapi oleh pendidikan nonformal (Yoyon Suryono, 2008).

Masyarakat mengalami proses transformasi global. Konferensi internasional yang disponsori oleh UNESCO di Hamburg pada tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa merumuskan isu dan tantangan yang dihadapi dalam konteks transformasi global yaitu tentang (a) kegagalan model pembangunan yang dilaksanakan yang memunculkan jurang semakin lebar antara yang kaya dan miskin, (b) terjadinya transformasi negara-negara sosialis, (c) terjadinya transformasi di lingkungan kerja, (d) terjadinya proses demokratisasi di berbagai dunia, dan (e) munculnya erosi negara-bangsa (CONFINTEA, 1997).

Meskipun fokusnya pada belajar sepanjang hidup, pendidikan nonformal, yang selalu memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lain secara makro, akan menghadapi isu dan tantangan kehidupan global seperti yang dirumuskan juga oleh Jarvis (2004; 2007) yaitu perlu: (a) memperhatikan konteks sosial, struktural, dan global (b) memahami proses globalisasi yang bercirikan masyarakat pengetahuan dan informasi serta masyarakat belajar, (c) meletakkan pendidikan nonformal dalam konsep belajar sepanjang hayat yang membawa implikasi pada perlunya integrasi sosial, memperkuat employabilitas, mengembangkan potensi individu, kewarganegaraan, memperkuat daya-saing sumber daya manusia, memelihara kohesi sosial, dan membangun masyarakat informasi, dan (d) memperluas wawasan pendidikan nonformal ke dalam pengertian pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pendidikan orang dewasa (*adult education*), pendidikan pascasekolah (*recurrent education*), pengembangan sumberdaya manusia (*human resources development*), dan pendidikan masyarakat (*community education*).

Dalam kaitan dengan model pembangunan nasional, kelompok negara selatan-selatan, termasuk Indonesia, dalam policy forum yang diadakan di Jakarta pada bulan April 2008, memosisikan pendidikan nonformal ke depan (dengan makna yang diperluas sebagai belajar sepanjang hayat) dalam konfigurasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai model pembangunan yang dipilih. Oleh karena itu, pendidikan nonformal bertugas untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan melalui proses belajar sepanjang hayat untuk membentuk manusia yang sejahtera di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Ace Suryadi, 2008 dan Jahnsen, 2008 ).

Secara khusus dalam konteks pendidikan nasional dan perubahan lingkungan eksternal, Sumarno (2007) merumuskan tantangan multidimensional yang dihadapi oleh pendidikan nasional secara makro yang mencakup (a) perubahan orientasi politik yang menyangkut nilai-nilai demokrasi, desentralisasi, dan otonomi, (b) perubahan orientasi ekonomi yang didominasi oleh pandangan liberalisasi ekonomi, (c) perubahan orientasi nilai kultural, dan (d) perubahan masyarakat dengan kemajemukan multidimensional.

Dari berbagai pendapat itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan nonformal dalam berbagai aspeknya ke depan akan menghadapi isu dan tantangan yang berupa (a) pilihan model pembangunan yang tepat, (b) merespons terjadinya proses demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya proses desentralisasi dan otonomi, (c) kemungkinan terjadinya disintergrasi bangsa, (d) terjadinya proses globalisasi yang salah satunya ditandai oleh terjadinya liberalisasi ekonomi, dan (e) masyarakat yang multikultural.

## **E. Kebijakan Pendidikan Nonformal**

Untuk melakukan inovasi-teruji program pendidikan nonformal ke depan sebagai tugas utama lulusan S2 PNF, para peneliti dan pekerja pengembang program di bidang pendidikan

nonformal di Indonesia sudah selayaknya para pelaku itu mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah berkait dengan pendidikan dan pendidikan nonformal agar program-program inovatif-teruji itu memiliki relevansi dengan kepentingan pembangunan nasional. Bagian di bawah ini akan menguraikan tentang kebijakan pendidikan dan pendidikan nonformal di Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Sekali lagi telah terjadi pergantian istilah dalam praktek pendidikan nonformal. Di awal kemerdekaan, digunakan istilah pendidikan masyarakat sampai beberapa dekade. Kemudian berubah menjadi pendidikan sosial di ranah keilmuan dan pendidikan luar sekolah di ranah praktek. Pendidikan luar sekolah bertahan cukup lama baik di ranah keilmuan maupun praktek yang diikuti oleh perubahan berikutnya menjadi pendidikan nonformal. Pada tahun 2015 pendidikan nonformal berubah lagi menjadi pendidikan masyarakat di ranah praktek. Inilah pendulum, bandul lonceng kehidupan. Perubahan istilah tidak merubah esensi dan substansi karena di dalam istilah-istilah itu masih terkandung semangat aktivitas pendidikan yang terorganisasi yang terjadi di luar persekolahan. Nama direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal boleh berubah-ubah sepanjang tidak menghilangkan esensi dan substansi tadi. Kini nama direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal telah berubah menjadi Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS. PAUD singkatan dari pendidikan anak usia dini dan DIKMAS singkatan dari pendidikan masyarakat.

Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu dari tujuh kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar dan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan vokasi; pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; pendidikan karakter dan budi pekerti;

serta pendidikan masyarakat. Ketujuh bidang itu diharapkan dapat menghasilkan bangsa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing selaras dengan tema pembangunan pendidikan yang telah dicanangkan yaitu daya saing regional pada tahun 2015-2019 dan daya saing internasional pada tahun 2020-2024 (Wartanto, 2015; Depdiknas, 2016).

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan masyarakat (pendidikan nonformal) sebagai bagian dari pembangunan pendidikan nasional hendaknya berpegang pada komitmen rumusan paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan membangun kebudayaan. Dua rumusan pertama dan kedua merupakan paradigma yang sudah cukup lama berkembang tetapi masih sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Rumusan ketiga merupakan rumusan baru meskipun “pendidikan sebagai suatu gerakan” itu sudah eksplisit tercantum dalam makna pendidikan namun kalah pamor dengan aktualisasi peran sekolah yang terkesan eksklusif, belum menyentuh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah secara sosial dan ekonomi. Maka rumusan berikutnya yaitu sekolah yang menyenangkan berkaitan dengan fenomena persekolahan yang syarat dengan berbagai beban belajar sehingga anak didik merasakan sekolah itu merupakan beban berat yang tidak menyenangkan. Rumusan dua berikutnya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini adalah pendidikan menghasilkan pembelajar dan pendidikan karakter. Semua orang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dan harus memiliki karakter (baik) yang kuat. Di sinilah pentingnya rumusan berikut bahwa pendidikan harus membangun kebudayaan, tentu kebudayaan yang berakar pada jati-diri bangsa Indonesia sendiri.

Kebijakan pendidikan masyarakat dikembangkan atas dasar pemahaman terhadap kondisi yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan orang dewasa, dua ranah utama dalam pendidikan masyarakat. Ranah pendidikan anak usia dini menekankan pada peningkatan akses, penegasan komitmen pengembangan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, regulasi dan standarisasi, Ranah pendidikan orang dewasa menekankan pada peningkatan keaksaraan dan kesetaraan, penurunan angka niraksara, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan kursus, regulasi dan standarisasi. Pendidikan orang dewasa di sini merupakan pendidikan orang dewasa dalam pendidikan nonformal yang memiliki kekhususan sasaran peserta didik usia 15 tahun ke atas, dengan program utama: pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keorangtunaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif. Dibanding dengan bidang-bidang pendidikan nonformal sebelumnya, pada rumusan sekarang terdapat dua hal yang berbeda yaitu pendidikan keorangtunaan dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif.

Dalam upaya pengembangan program inovatif-teruji pendidikan nonformal yang selaras dengan pengembangan pendidikan nasional hendaknya mengacu pada kondisi lingkungan strategis yang terjadi saat ini dan ke depan seperti tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, daya saing Indonesia di dunia internasional, perkembangan demografi Indonesia, spektrum tenaga kerja Indonesia, perkembangan kondisi sosial masyarakat, dan kondisi serta jati diri bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa program inovatif-teruji pendidikan nonformal yang dikembangkan itu dapatlah memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan

perkembangan demografi, spektrum tenaga kerja, perkembangan kondisi masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan jati-diri bangsa.

Program-program pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal seperti apa yang perlu dikembangkan saat ini untuk menjawab tantangan masa depan agar bermakna pada peningkatan mutu kehidupan manusia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi beberapa program pendidikan masyarakat yang perlu dikembangkan yaitu pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus, dan peningkatan mutu pendidikan orang dewasa seperti pendidikan keluarga. Tentu di luar program prioritas itu terdapat juga jenis program baru yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan individu dan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat yang mencakup peningkatan: kualitas pendidikan keaksaraan, kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, akses dan kualitas layanan pendidikan orangtua/keluarga serta memperkuat peran orangtua.

Keberhasilan melaksanakan dan mengembangkan program-program inovatif-teruji pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat peran dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal penting sekali. Oleh karena itu upaya peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal penting untuk dilakukan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional minimal 37% untuk pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan 15% untuk pendidik

dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat. Berbarengan dengan memenuhi jumlah yang diperlukan tentu perlu pula meingkatkan profesionalismenya melalui berbagai program peningkatan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat.

Salah satu program andalan pendidikan masyarakat yang prospektif dikembangkan ke depan adalah kursus dan pelatihan, maka perlu dirumuskan berbagai kebijakan penguatan kursus dan pelatihan ini. Beberapa kebijakan yang telah dirumuskan untuk peningkatan kursus dan pelatihan mencakup: memperbanyak standar kualifikasi dan kompetensi lulusan, penguatan kelembagaan, menetapkan kursus dan pelatihan rujukan, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, penguatan uji kompetensi, meningkatkan kursus yang berorientasi pasar internasional, meningkatkan peran unit pelaksana teknis dalam menyiapkan standar nasional kursus, memperkuat data, dan memperbanyak akreditasi institusi dan program. Kesemuanya ini bermuara pada kebijakan strategik yang berupa penguatan pelaku pendidikan, perluasan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan tata kelola dan pelibatan publik.

Apakah kebijakan yang telah ditetapkan seperti diuraikan itu memiliki dukungan kajian akademik? Untuk bahan banding yang sederhana, berikut disajikan salah satu hasil kajian pilihan kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal yang perlu dipertimbangkan (Yoyon Suryono, 2008).

### **Pilihan kebijakan**

Agar pendidikan nonformal memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal, diperlukan perumusan peraturan pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang lebih memiliki keberpihakan pada pendidikan nonformal. Prinsip penyeteraan pendidikan nonformal terhadap pendidikan formal melalui evaluasi hendaknya tidak

memposisikan pendidikan nonformal sebagai subordinasi dan *residual* dari pendidikan formal. Kata "evaluasi" hendaknya dimaknai prinsip kesetaraan, tanpa melemahkan posisi salah satunya.

Diperlukan juga suatu kebijakan yang memberi ruang bagi pengembangan kemampuan individu dan kebutuhan pendidikan dasar dalam berbagai aspek kehidupan yang komprehensif dan diposisikan sebagai program prioritas pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan nonformal sebagai bagian dari pendidikan nasional yang memiliki fungsi yang fleksibel dan setara dengan pendidikan formal.

Tugas besar pendidikan nonformal adalah membangun masyarakat belajar atau masyarakat pengetahuan dan informasi dalam konteks proses globalisasi yang salah satunya ditandai oleh derasnya liberalisasi ekonomi. Dalam kaitan dengan ini, pilihan model pembangunan berkelanjutan yang menguat karena gagalnya model pertumbuhan ekonomi, menjadi acuan dan pedoman bagi pengembangan pendidikan nonformal.

Misi pendidikan nonformal diwarnai pula oleh implementasi demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan nonformal hendaknya memiliki muatan demokrasi berbarengan dengan implementasi demokrasi itu sendiri dalam dunia pendidikan dan khususnya pendidikan nonformal. Pemerataan kesempatan pendidikan dapatlah ditempatkan sebagai salah satu bentuk implementasi dari proses demokrasi.

Muatan implementasi demokrasi (termasuk di dalamnya proses desentralisasi dan otonomi) dalam berbagai aspek kehidupan itu hendaknya menjamin terpeliharanya keutuhan bangsa (NKRI) dan kepentingan kebangsaan yang menutup peluang terjadinya disintegrasi bangsa yang mulai menggejala serta berkembangnya paham dan praktek primordialisme atau lebih luas separatisme. Program pendidikan nonformal seyogyanya mampu memberi kesadaran dan pemahaman baru yang benar tentang proses demokrasi yang sedang berjalan yang dalam banyak kasus muncul ke permukaan dalam berbagai bentuk kekerasan.



Pendidikan nilai-nilai kultural dalam bingkai multikultural dapatlah pula menjadi misi utama dari pendidikan nonformal. Program pendidikan nonformal dapatlah memberi warna baru dari nilai-nilai kultural yang berkembang serba paradoks (seperti tidak boleh korupsi, tapi praktek korupsi tumbuh subur) pada proses transformasi saat ini selaras dengan berkembangnya masyarakat dengan kemajemukan multidimensional: etnis, budaya, bahasa, dan agama. Di sinilah letak peran pendidikan nonformal dalam pendidikan multikultural.

Perluasan wawasan pendidikan nonformal perlu dilakukan ke arah yang lebih luas dalam pengertian dan konsep *adult education*, *continuing education*, *recurrent education*, *human resources development*, dan *community education* dalam perspektif pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*) dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), yang tidak terbatas pada satuan individu tapi juga masyarakatnya.

Untuk mengatasi keragaman sasaran dan keluasan sebaran warga belajar, perlu dikembangkan kebijakan strategis pelaksanaan pendidikan nonformal yang mengutamakan kondisi dan kebutuhan warga belajar dalam konteks kelompok masyarakat terpinggirkan serta keharmonisan lingkungannya. Kelompok masyarakat terpinggirkan dan tidak mampu secara ekonomi menjadi prioritas sasaran warga belajar pendidikan nonformal.

Untuk mengurangi ketergantungan pelaksanaan program-program pendidikan nonformal pada program-program pemerintah, hendaknya para pengelola pendidikan nonformal di tingkat bawah (meskipun menghadapi kendala kuatnya budaya uang dalam masyarakat) lebih mengutamakan penggalan kebutuhan pendidikan warga belajar setempat yang memungkinkan proses pembelajaran berjalan atas inisiatif dari warga belajar sendiri. Pendekatan kebutuhan warga belajar menjadi prioritas dalam mengembangkan pendidikan nonformal.

Sejalan dengan pengembangan program pendidikan nonformal pada bidang-bidang yang ditetapkan oleh undang-undang, perlu dikembangkan secara luas berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat pendukungnya apakah itu pengelola, tutor, pamong belajar, tenaga teknis, atau ketenagaan lain dalam bentuk peningkatan kemampuan (*capacity building*) individu dan masyarakat dengan konsep dan praktek yang benar.

Pengembangan program-program pendidikan nonformal memerlukan tersedianya dana yang tidak sedikit. Kemampuan pemerintah selalu akan ada batasnya dan tergantung juga pada komitmen politik yang selalu berubah sesuai kepentingannya. Oleh karena itu, perlu dicari terobosan baru pembiayaan pendidikan nonformal yang dilakukan secara bersama-sama, meski dengan tetap menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk membiayai program-program pendidikan nonformal lebih-lebih bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Untuk mengurangi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan yang dipergunakan dalam melaksanakan pendidikan nonformal, dapatlah diatur secara sinergis pemanfaatan secara bersama sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pendidikan persekolahan. Tidak ada batas lagi antara sarana prasarana yang dimiliki oleh pendidikan persekolahan dan yang dimiliki pendidikan nonformal. Prinsip *merger of formal and nonformal education* dalam satu kesatuan sistem sudah waktunya untuk dilaksanakan secara bertahap dan sungguh-sungguh.

## **F. Konteks teori dan praktek pendidikan nonformal**

Buku ini diberi judul inovasi pendidikan nonformal, maka materi yang dibahas dalam buku ini berkaitan dengan bagaimana inovasi dilakukan untuk mengembangkan program-program pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal perlu dikembangkan agar segala bentuk aktivitas pendidikan nonformal yang ada di dalam masyarakat dapat memberi sumbangan bagi peningkatan

pendidikan dan peningkatan aspek-aspek kehidupan manusia yang lainnya antara lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan budaya. Pendek kata, misi utama pendidikan nonformal itu adalah membangun kesejahteraan hidup manusia baik hidup individu maupun hidup masyarakat. Pandangan ini menempatkan pendidikan nonformal dalam konteks dasar membangun masyarakat melalui pengarusutamaan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.

Uraian selanjutnya akan menjelajahi berbagai konteks pendidikan nonformal dalam ranah konsep atau teori dan ranah praksis atau praktek pendidikan nonformal sepanjang perjalanannya di Indonesia dan beberapa Negara lain atas dasar informasi yang dapat ditelusuri dan ditemukan sumber-sumbernya, dalam beberapa hal berikut: ragam istilah, konsep atau teori, karakteristik dasar, dinamika program, sasaran bidang garapan, pilihan kebijakan, dan bagian terakhir ini, konteks peran dan fungsi pendidikan nonformal.

Bahasan di atas memberi informasi bahwa terdapat banyak istilah yang mendampingi istilah pendidikan nonformal, seperti di tahap awal dalam praktek di Indonesia muncul istilah pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan nonformal, dan pendidikan orang dewasa. Pada sisi kajian keilmuan telah berkembang ilmu pendidikan masyarakat, salah satu guru besarnya adalah Prof. M. Sadarjoen Siswomartoyo di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Bandung pada tahun 1950-an. Kemudian berkembang ilmu pendidikan sosial di beberapa perguruan tinggi kependidikan (khususnya IKIP ketika itu) yang memiliki jurusan pendidikan sosial; berganti menjadi “ilmu” pendidikan luar sekolah pada sekitar tahun 1982, dan kini muncul gerakan mengganti pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan nonformal mulai tahun 2014 di sejumlah jurusan/program studi PLS di “eks IKIP” dengan muatan “ilmu pendidikan sosial/pendidikan luar sekolah/pendidikan

nonformal” yang sebenarnya masih dalam perdebatan panjang untuk “berani” mengatakan terdapat *body of knowledge* ilmu pendidikan nonformal atau sejenisnya dalam istilah-istilah yang berbeda sebagai bagian dari “pohon ilmu pendidikan”. Di tataran kebijakan pendidikan di Indonesia, muncul kembali penggunaan istilah pendidikan masyarakat, pendidikan nonformal, dan pendidikan orang dewasa secara bersamaan dalam lingkup kerja tingkat direktorat jenderal, selain istilah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diposisikan berdiri sendiri, tidak lagi tercakup dalam pengertian tiga istilah itu. Dalam teks UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Perubahan istilah, konsep, dan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal berpengaruh pada perubahan nama direktorat jenderal yang sudah terjadi berkali-kali.

Di beberapa Negara, dalam konsep dan praktek pendidikan nonformal, berkembang istilah atau konsep yang berdekatan dan memiliki kaitan dengan istilah dan konsep pendidikan nonformal. Istilah atau konsep yang dimaksud, seperti di atas telah disampaikan, adalah pendidikan orang dewasa, pendidikan perluasan, pendidikan berkelanjutan, pendidikan dasar, pendidikan pascasekolah, dan pengembangan sumber daya manusia. Istilah atau konsep-konsep itu selalu memiliki keterkaitan kontekstual dengan beberapa istilah atau konsep lainnya yaitu pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat, masyarakat belajar, transformasi global, dan masyarakat pengetahuan dan informasi, serta beberapa istilah lain yang selalu berkembang. Di Indonesia sendiri secara internal muncul pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup dan pendidikan nonformal berbasis kewirausahaan sebagai contoh konteks pendidikan nonformal terhadap peningkatan kualitas manusia.

Konteks pendidikan nonformal di Indonesia, bila dirunut ke belakang secara garis besar, *pertama*, dimulai dari pendidikan nonformal untuk pembangunan masyarakat, *kedua*, pendidikan nonformal dan pendidikan untuk semua, *ketiga*, pendidikan nonformal untuk pendidikan sepanjang hayat, *keempat*, pendidikan nonformal untuk pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, *kelima*, pendidikan nonformal untuk pembelajaran sepanjang hayat, *keenam*, pendidikan nonformal untuk membangun masyarakat belajar, *ketujuh*, pendidikan nonformal untuk memerdekakan (membebaskan) manusia dari serba keterbelakangan, *kedelapan*, pendidikan masyarakat untuk transformasi global, dan *kesembilan*, pendidikan nonformal untuk membangun masyarakat pengetahuan dan informasi.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan pendidikan nonformal memiliki keterkaitan dengan upaya-upaya lain yang lebih luas dan merupakan pekerjaan besar yang dapat memunculkan pertanyaan pesimistis apakah pendidikan nonformal mampu mengemban tugas berat seperti itu. Pekerjaan pendidikan nonformal memang tidak semudah seperti dibayangkan secara garis lurus bahwa untuk dapat penghasilan (uang) orang perlu punya pekerjaan, dan untuk punya pekerjaan orang perlu punya keterampilan, dan untuk punya keterampilan maka orang harus mengikuti pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, maka buatlah berbagai program keterampilan yang dapat membekali orang untuk bekerja. Ternyata dalam kenyataan tidak sesederhana itu, perlu dibekali dengan berbagai hal lain yang kini disebut dengan istilah "*soft-skill*" mendampingi "*hard-skill*". Disamping itu, tentu fenomena pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja perlu menjadi pertimbangan juga dalam merancang aktivitas pendidikan nonformal yang berkait dengan penyiapan tenaga kerja terampil. Dalam konteks ini kemudian digunakan pendekatan "pasar" untuk

merancang kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apakah cara ini efektif, bandingkan dengan pendapat dalam kotak berikut.

### **Kerangka Rencana Aksi**

Pengembangan pendidikan nonformal ke depan dalam membangun masyarakat belajar yang demokratis memerlukan perangkat peraturan pelaksanaan dan formulasi kebijakan pendidikan nasional yang lebih membuka ruang dan akses bagi pengembangan pendidikan nonformal yang sejajar dengan pendidikan formal.

Untuk keperluan tersebut, antara lain diperlukan upaya pengembangan opini publik yang menempatkan dan menghargai pendidikan nonformal sejajar dengan pendidikan formal dan bahkan merupakan pendidikan alternatif yang mampu memecahkan rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, di sisi sebaliknya, hendaknya program-program pendidikan nonformal itu sendiri mampu membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat akan pendidikan yang selama ini cenderung menurun karena rendahnya mutu dan kegagalan pendidikan formal; dan menunjukkan pencitraan yang lebih positif sebagai pendidikan alternatif yang ke depan lebih dapat diharapkan.

Pengembangan pendidikan nonformal sebagai bentuk pendidikan alternatif ke depan, memerlukan pengembangan program-program pendidikan nonformal (yang tidak terbatas pada delapan bidang garapan PNF) yang memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam satu komunitas melalui berbagai program pemberdayaan (istilah yang lebih halus dari *liberation* seperti pendapat Freire) pada aspek-aspek kehidupan secara komprehensif. Dapat disebut di sini dua contoh yaitu pendidikan politik tentang demokrasi, perdamaian, kebangsaan, dan HAM serta pendidikan ekonomi yang lebih manusiawi dan tidak mengedepankan monopoli, kerakusan, liberalisasi, serta mendewakan uang.

Sejalan dengan itu, “pendidikan kecakapan hidup” sebagai salah satu bagian dari delapan bidang garapan pendidikan nonformal dapatlah mendasari tujuh bidang pendidikan nonformal lainnya

yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan latihan kerja, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, baik dalam arti mengembangkan *soft-skill* maupun *hard-skill*.

Bagian penting dari pengembangan pendidikan nonformal dalam konteks pemberdayaan individu dan masyarakat adalah pengembangan pendidikan karakter yang mengedepankan pentingnya pengembangan nilai-nilai luhur seperti watak terpuji, kejujuran, dan rasa malu yang semakin hari semakin langka serta pendidikan multikultural yang menghormati keragaman etnis, budaya, bahasa, dan bahkan agama yang dilaksanakan dalam format pendidikan nonformal melalui pengembangan delapan bidang garapan pendidikan nonformal.

Di sisi kelembagaan dan satuan pendidikan, untuk pengembangan pendidikan nonformal ke depan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan dan satuan pendidikan nonformal (seperti PKBM dan sejenisnya) baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan nonformal dalam berbagai komponen penting.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal seperti yang dimaksud itu antara lain sangat diperlukan upaya meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan (penyelenggara, pengelola, dan pendidik) dalam merancang, mengelola, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program pendidikan nonformal yang berbasis kebutuhan sasaran pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam pengertian ini tercakup juga upaya pengembangan kemampuan (*capacity building*) bagi individu dan masyarakat pada umumnya.

Masih berkenaan dengan mutu program pendidikan nonformal ke depan, diperlukan juga suatu pendekatan pengembangan pendidikan nonformal yang berorientasi pada pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) dalam arti yang

sebenarnya, yang tidak terbatas pada merasionalkan berbagai pungutan dana dari orang tua atau masyarakat.

Sehubungan dengan masalah pendanaan, pihak yang harus bertanggung jawab dan berkewajiban membiayai pendanaan pendidikan nonformal adalah pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan bukti nyata dari komitmen dan kemauan politik pemerintah yang tidak sebatas berhenti pada bunyi pasal dalam undang-undang menyisihkan 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan, tetapi agar lebih peduli dan memposisikan pendidikan nonformal sejajar dengan pendidikan formal (termasuk dalam hal pendanaannya) dalam mengemban visi dan misi pendidikan nasional melalui alokasi anggaran bagi pendidikan nonformal yang lebih proporsional.

Membangun jaringan kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, antarsektor dan antarpelaku, sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan nonformal. Untuk keperluan tersebut perlu dikembangkan berbagai program pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara antarsektor dan antarpelaku secara berkesinambungan.



# BAB 3

## KOMPARASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab ini membahas komparasi implementasi pendidikan nonformal di beberapa negara yang telah melaksanakan pengelolaan pendidikannya dengan menggunakan pendekatan pendidikan nonformal atau istilah lain yang sejenis, sebagai bagian dari pendidikan nasional masing-masing negara itu secara menyeluruh dalam konteks pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi atau penyiapan tenaga

kerja yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional di negara masing-masing. Beberapa negara yang dimaksud adalah Jepang, Tiongkok, dan Indonesia sendiri.

### **A. Tiongkok**

Salah satu buku terbitan Bank Dunia pada tahun 2007 berjudul *“Enhancing China’s Competitiveness Through Lifelong Learning”* yang menggambarkan bagaimana China (baca: Tiongkok) mempersiapkan negaranya memasuki percaturan global, khususnya dalam persaingan ekonomi global, dengan menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui strategi pendidikan dan pelatihan: pembelajaran sepanjang hayat. Frannie Leautier, *Vice President The World Bank Institute*, mengatakan (dikutip secara tidak langsung) antara lain bahwa China telah membuat langkah yang mengesankan dalam memperluas kesempatan pendidikan pada semua tingkat, meningkatkan literasi orang dewasa, menyediakan pelatihan dan pelatihan-ulang untuk para migran dan pekerja. Dalam lingkungan ekonomi global yang sangat kompetitif saat ini, China mempertimbangkan untuk mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat sebagai sistem yang efektif, baik sebagai alat meningkatkan daya saing maupun meningkatkan kohesi sosial dan kesejahteraan. Merujuk kutipan tidak langsung dari pernyataan itu, penulis berpendapat tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran sepanjang hayat telah dilakukan oleh China untuk memajukan negaranya.

#### **1. Latar belakang**

Mengapa China melakukan hal seperti itu? Pertama, diidentifikasi karena berbagai faktor seperti kemajuan IT yang dramatik; ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh gagasan, keterampilan, dan nama merek; meningkatnya kodifikasi

pengetahuan; cepatnya kreasi dan diseminasi pengetahuan; mudahnya biaya transportasi dan komunikasi; dunia menjadi pasar terbuka; persaingan pasar; dan terjadinya inovasi, telah memicu terjadi revolusi pengetahuan yang berimplikasi pada perlunya sistem pendidikan dan pelatihan mengerjakan sesuatu untuk merespons terjadinya revolusi pengetahuan itu.

Kedua, munculnya kecederungan global dalam pendidikan dan pelatihan yang mencakup: pendidikan merupakan sumber keunggulan kompetitif dan partisipasi sosial, jumlah pendaftar di perguruan tinggi yang semakin tinggi, banyak mahasiswa di atas usia 24 tahun, meningkatnya partisipasi pekerja untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, meningkatnya penyedia pendidikan dan pelatihan swasta, meningkatnya kompetisi para penyedia pendidikan dan pelatihan, internasionalisasi pendidikan tinggi dan pelatihan, dan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan.

Ketiga, nilai investasi pendidikan dan pelatihan yang meningkat berupa meningkatnya pendapatan; studi OECD menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara pencapaian tingkat pendidikan dengan rata-rata pendapatan, demikian juga bila dilihat dari tingkat pengembalian pribadi, finansial, dan sosial terdapat perbedaan. Selain itu, investasi pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja dengan pendidikan lebih tinggi pada umumnya lebih produktif. Beberapa analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal yang positif antara capaian pendidikan dengan kesehatan fisik dan mental; serta terdapat juga pengaruh positif terhadap kohesi sosial; sama dengan itu terdapat hubungan positif antara literasi dengan dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat sukarela serta antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi warga

negara. Di sisi lain diketemukan juga bahwa terdapat bukti kalau investasi pelatihan dapat meningkatkan pendapatan para pekerja dan meningkatkan produktivitas di tingkat perusahaan, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, untuk memasuki dan mengatasi berbagai masalah di era ekonomi berbasis pengetahuan, China mulai menyesuaikan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan melalui tiga strategi prioritas: universalisasi wajib belajar, meningkatkan pendidikan vokasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sebagai bagian kritical dari pembelajaran sepanjang hayat yang perlu dilaksanakan dengan institusi, kurikulum, dan reformasi pedagogikal yang tepat. Selain hal tersebut di atas, beberapa kondisi di bawah ini mendorong China untuk melakukan penguatan pendidikan dan pelatihan, yaitu: tekanan kompetisi masuknya China ke ekonomi global, jumlah penduduk yang sangat besar, tingkat capaian pendidikan pada umumnya rendah, disparitas daerah yang luas, transisi ke ekonomi pasar, perubahan struktural yang massif, restrukturisasi, dan naiknya pengangguran, dan hambatan finansial pemerintah untuk menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan.

Data berikut dapat dipergunakan untuk melihat dan memahami betapa besar, dan tentu kompleks, masalah pendidikan dan pelatihan yang dihadapi oleh China antara lain berkenaan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,3 milyar orang yang terbagi ke dalam penduduk yang sudah mengikuti pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mencapai angka sekitar 260 juta orang, termasuk di sisi yang gagal dan putus sekolah. Angkatan atau tenaga kerja yang memerlukan peningkatan keterampilan sekitar 770 juta orang, ditambah penduduk dewasa yang memerlukan pendidikan dan pelatihan sekitar 68 juta, ditambah penduduk di luar usia pensiun; juga penduduk yang

mengganggu yang memerlukan pelatihan. Bagaimana China merancang pendidikan dan pelatihan untuk memecahkan masalah yang dihadapi seperti digambarkan di atas?

## 2. Sistem Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pilihan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan melalui “pembelajaran sepanjang hayat” dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa pendidikan dan pelatihan harus diperlakukan sebagai sistem pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan efisiensi, performan, dan persamaan. Sistem pembelajaran sepanjang hayat mencakup belajar sepanjang kehidupan manusia mulai anak sampai dewasa, dalam bentuk pembelajaran formal, pembelajaran nonformal, dan pembelajaran informal. Pembelajaran formal dan pelatihan mencakup program-program yang terstruktur yang dikenal dengan sistem pendidikan formal dan dimaksudkan untuk memperoleh ijazah atau sertifikat. Pembelajaran nonformal dan pelatihan berupa program-program terstruktur yang diakui secara tidak formal oleh sistem nasional seperti pelatihan magang dan pelatihan dalam jabatan. Sementara itu, pembelajaran informal dan pelatihan mencakup belajar yang tidak terstruktur yang dilakukan dimana saja, di rumah, masyarakat atau tempat kerja. Di sini termasuk pelatihan dalam jabatan yang tidak terstruktur, pada umumnya dalam bentuk belajar di tempat kerja.

Sampai uraian di sini, dapat diketahui bahwa China sedang melaksanakan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat posisi dan peran dalam memasuki pasar ekonomi global. Pendekatan pembelajaran sepanjang hayat digunakan oleh karena di dalamnya mengandung ciri-ciri sebagai berikut: cakupan sangat komprehensif, mulai dari anak sampai dewasa, kebutuhan keterampilan baru yang tidak saja baca-tulis-hitung, melainkan

juga keterampilan teknologi dan ilmu, keterampilan berbahasa asing, keterampilan memecahkan masalah, berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim serta belajar dari pengalaman; selain itu dapat belajar secara formal, nonformal, dan informal; belajar dari banyak penyedia layanan belajar, menggunakan teknologi baru dalam belajar, serta merupakan bentuk baru dalam pembiayaan, penjaminan mutu, sertifikasi, dan pengakuan pencapaian.

Implementasi pembelajaran sepanjang hayat dilihat dari dua sisi: permintaan berupa kebutuhan pasar seperti literasi dan numerasi, sains, teknologi, dan bahasa, keterampilan umum baru: memecahkan masalah, komunikasi, kerja tim, kreativitas, belajar untuk belajar, dan kebutuhan keterampilan fungsional dan okuvasional baru. Sisi penawaran berupa hasil pelatihan baik publik (pembelajar dewasa), pribadi (persyaratan dan kualifikasi), pelatihan industri (tersertifikasi), pengembangan karir, nonformal, dan lainnya.

Butir-butir penting yang dapat dirangkum dari uraian di atas untuk pengayaan pembahasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut: (1) memasuki persaingan pasar bebas sebagai implikasi dari ekonomi berbasis pengetahuan dan ekonomi global, pilihan meningkatkan kapabilitas SDM merupakan kebijakan strategis yang dilakukan oleh China (Tiongkok), (2) pilihan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan dan ekonomi global merupakan pilihan strategis kedua yang perlu mendapat apresiasi, (3) pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat yang berorientasi pada kebutuhan pasar (kesesuaian antara permintaan dan penawaran) merupakan pilihan strategis ketiga yang perlu diikuti oleh banyak negara lain, (4) implementasi pembelajaran sepanjang hayat dengan penguatan

pendidikan formal, nonformal, dan informal secara terpadu, serta pelibatan institusi pendidikan pemerintah, swasta, dan nonpemerintah yang dikelola dengan prinsip: peran baru pemerintah, kerjasama dengan pihak nonpemerintah, penjaminan mutu, asesmen, akreditasi, dan sertifikasi, kualifikasi vokasional, informasi, serta pembiayaan, memunculkan harapan akan keberhasilan rencana yang dirancang dengan sangat baik ini, dan (5) memperhatikan kebutuhan sosial yang berupa mengedepankan identitas nasional dan barang publik, serta kebutuhan pasar yang menekankan pada perlunya literasi baru, ipteks dan bahasa, serta keterampilan umum baru, membuka jalan China masuk di persaingan ekonomi global.

Kelanjutan dari butir-butir rangkuman itu, perlu dikemukakan beberapa butir tambahan sebagai konsekuensi yang perlu dikerjakan pada tahap berikutnya yang berupa: (1) memastikan kualitas, relevansi, efisiensi, dan ekuiti, (2) merancang aturan main kemitraan yang efektif dengan pelaku nonpemerintah yang mencakup: manajemen sistem publik, koordinasi penyedia publik, nonpublik, dan swasta, regulasi, penjaminan mutu, asesmen nasional, akreditasi, sertifikasi, dan kualifikasi vokasional, (3) menyediakan informasi yang terbuka, (4) sistem pembiayaan, (5) memanfaatkan potensi belajar jarak jauh, (6) sistem pembelajaran sepanjang hayat berkelanjutan, dan (7) bergerak ke depan. Secara keseluruhan, bila belajar dari China tentang merancang kesiapan memasuki persaingan ekonomi global dengan mempersiapkan SDM yang diperlukan melalui upaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam bingkai pembelajaran sepanjang hayat, maka beberapa hal perlu direnungkan dan dikerjakan yaitu perlu: (1) memiliki kemampuan berkompetisi di pasar ekonomi global, (2) memiliki SDM dengan kapasitas kerja sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja dan memenuhi standar internasional, (3) memiliki kemampuan teknis vokasional atau keahlian serta menguasai

keterampilan umum yang diperlukan, dan (4) mendapat pengakuan internasional. Kesemuanya merupakan hasil dari upaya pembelajaran sepanjang hayat yang memenuhi standar kualitas, relevansi, akreditasi, sertifikasi, dan lisensi internasional.

Program pendidikan nonformal yang telah dilaksanakan di Tingkok (China) beberapa tahun yang lalu, salah satunya, berkait dengan pengurangan kemiskinan melalui proyek sains dan teknologi yang dikombinasikan dengan pendidikan dasar dan vokasi untuk orang dewasa para petani lokal agar mampu meningkatkan produksi pertanian dan kehidupan sehari-hari seperti yang dilaksanakan di Gaichazui Village, Provinsi Shansi, dan Chaichang di pegunungan Taihang, Provinsi Hebei.

Program lain yang dilaksanakan di Tingkok adalah program pengentasan kemiskinan yang berupa pelatihan untuk wanita melalui penggunaan bantuan-kecil bagi kemandirian kelompok. Disiapkan materi lokal tentang belajar literasi, pelatihan keterampilan, dasar strategik hidup dan perlindungan hak-hak wanita melalui pembelajaran partisipatif untuk mengenali masalah, membuat rencana, berbagi pengalaman, dan saling membelajarkan.

## **B. Jepang**

Beberapa catatan tentang Jepang yang perlu dikemukakan di awal kajian ini untuk dapat lebih memahami kehidupan masyarakat Jepang yaitu tentang kondisi geografis, pergerakan penduduk yang melambat, perubahan situasi ekonomi dan tenaga kerja yang menimbulkan kesenjangan kondisi kehidupan, meningkatkan penduduk miskin, dan kecemasan penduduk yang ditunjukkan oleh tingginya angka bunuh diri, serta kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks pendidikan nonformal, Jepang menggunakan istilah pendidikan sosial yang sebenarnya menunjuk pada kegiatan pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat, baik pada sisi



yuridis, institusi, maupun kebijakan pemerintah, juga dalam teori dan prektek. Pendidikan di Jepang dikelompokkan secara konvensional dalam tiga kategori yaitu: pendidikan rumah (keluarga/informal), pendidikan sekolah (formal) dan pendidikan sosial atau kegiatan pendidikan di masyarakat di luar kategori pertama dan kedua. Kegiatan pendidikan sosial ini merupakan kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan institusi pendidikan sosial seperti *kominkan* (pusat pembelajaran masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kota), perpustakaan publik dan museum, berbagai kegiatan belajar volunteer, dan sejenisnya (Yoko Arai, 2009).

Kegiatan pendidikan sosial yang menunjuk pendidikan nonformal dan pendidikan orang dewasa dilaksanakan atas dasar beberapa perspektif yaitu: gender, tenaga kerja (pekerja), etnik minoritas, kebutuhan khusus, pendidikan dasar, lanjut usia, perdamaian, kesehatan, keaksaraan (literasi), pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan atau pengembangan masyarakat. Atas dasar berbagai perspektif ini dapat diketahui bahwa sasaran dan arah pelaksanaan pendidikan sosial atau pendidikan nonformal dan pendidikan orang dewasa memiliki banyak keragaman yang tentu memerlukan model pembelajaran dan teknis edukatif yang satu sama lain berbeda.

### **C. Bangladesh dan India**

Dua Negara di Asia Selatan ini akan dikaji secara sepintas dalam melaksanakan pendidikan nonformal di masing-masing negara bertetangga itu, Bangladesh melaksanakan berbagai program pendidikan nonformal, khususnya keaksaraan fungsional untuk mengurangi kemiskinan. India melaksanakan pendidikan nonformal untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, di antara keduanya, dilihat esensi pentingnya pendidikan

nonformal memiliki karakteristik yang sama, tetapi dalam tampilan menunjukkan ada perbedaan.

Bangladesh (UNESCO, 2002) diperkirakan memiliki jumlah penduduk sekitar 160 juta-an; pada tahun 1999 tercatat sekitar 128 juta. Rata-rata penambahan penduduk berada di sekitar 1,6%. Angka partisipasi murni jenjang sekolah dasar untuk laki-laki 97%, perempuan 94,1%, angka total berada pada angka 95,6% untuk tahun 1999. Pendapatan per kapita rata-rata tumbuh setiap tahun sekitar 3,7%. Posisi indeks pembangunan manusia (IPM) sekitar 0,44 pada tahun 1999 dan tentu mengalami kenaikan selama kurun waktu dua dekade berikutnya. Dilihat dari sisi status pendidikan dasar, Bangladesh mencapai persentase “keliterasian” orang dewasa untuk laki-laki 51% dan perempuan 27%, perbandingan guru dan murid 61, pengeluaran publik untuk pendidikan dasar dan menengah 88,6%, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sekitar 2,9% dari GDP.

India (UNESCO, 2002) memiliki jumlah penduduk sekitar 1 milyar orang dengan tingkat kelahiran berada pada angka 2,1%; pendapatan per kapita rata-rata per tahun tumbuh sekitar 7,8% dan posisi indeks pembangunan manusia (IPM) pada skor 0,545. Status pendidikan dasar dilihat dari literasi orang dewasa berusia 15 tahun ke atas untuk laki-laki 35%, perempuan 62%, persentase angka partisipasi murni pendidikan dasar untuk laki-laki 98,5%, perempuan 81,5%, persentase total 90,3%. Perbandingan guru murid berada pada angka 42; sementara itu pengeluaran publik untuk pendidikan dasar dan menengah berada pada angka 66% dan persentase pengeluaran pemerintah terhadap GDP sebesar 3,4%. Angka-angka itu (tahun 1995) sampai dengan tahun ini (2016) diperkirakan meningkat.

Bangladesh dan India (UNESCO, 2002) merupakan dua Negara yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal, khususnya untuk memenuhi pendidikan dasar melalui pendidikan

keaksaraan fungsional dalam konteks pendidikan untuk semua anak-anak dan orang dewasa untuk mengurangi kemiskinan. Model ini dilaksanakan antara lain di Bangladesh dan China. Model pendidikan nonformal untuk pembangunan berkelanjutan di dilaksanakan antara lain oleh India, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Sementara Australia, Malaysia, dan Korea Selatan mengembangkan model pendidikan nonformal untuk pembelajaran sepanjang hayat. Dengan kata lain konteks pendidikan nonformal dapat berupa pengurangan angka kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana telah pula diuraikan pada bahasan halaman-halaman depan.

Pendidikan nonformal tumbuh pesat di Bangladesh atas inisiatif sembilan lembaga swadaya masyarakat yang memainkan peran untuk mengambil pendekatan-pendekatan inovatif dalam mengembangkan literasi fungsional untuk mengurangi kemiskinan. Maka berkembanglah program-program literasi dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti program kredit mikro dalam bentuk 16 proyek yang dilaksanakan oleh delapan dari sembilan lembaga swadaya masyarakat yaitu: *Bangladesh Association for Community Education (BACE)*, *Bangladesh Rural Advancement Community (BRAC)*, *Centre for Mass Education in Science (CMES)*, *Dhaka Ahsania Mission (DAM)*, *Friends in Village Development Bangladesh*, *Proshika*, *Swanirvar Bangladesh (SB)*, dan *Underprivileged Children's Educational Programme (UCEP)*.

India mengembangkan program-program pendidikan nonformal melalui proyek-proyek lokal dengan sasaran kelompok etnik minoritas antara lain berupa keterampilan baca dan tulis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Ada empat penyedia program inovatif yang melaksanakan program pendidikan dasar untuk anak putus sekolah, terutama anak perempuan. Dalam melaksanakan program ini lembaga swadaya masyarakat setempat mengambil inisiatif penting seperti *The Centre for Education and*

*Development for Rural Women (CEDRW)* yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan pendidikan dan status ekonomi.

Perlu dikemukakan di sini bahwa CEDRW merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1993 untuk mengembangkan sistem baru pendidikan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan agar menjadi agen transformasi dan perubahan ekonomi di lingkungan masyarakatnya. Proyek ini didasari pemikiran Paulo Freire yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip Gandhi dalam membangun pendidikan untuk memberdayakan penduduk pedesaan. Sasaran utama proyek ini adalah tekanan stimulatif yang direfleksikan terhadap kondisi kehidupan sehingga melahirkan tindakan-tindakan untuk terjadinya perubahan melalui partisipasi masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan memandirikan wanita dan kelompoknya, program-program vokasional untuk anak perempuan putus sekolah dan wanita usia 15-45 tahun, kelompok untuk kesehatan, nutrisi, dan pengembangan pribadi, pelatihan bagi petani lokal melalui kelompok petani, dan kegiatan pusat rekreasi untuk anak dan orangtua sebagai bentuk pengembangan anak secara terintegrasi melalui pendidikan anak usia dini.

Selain itu ada juga program pengenalan dasar teknologi untuk masyarakat dengan populasi penduduk sekitar 10.000 yang bertujuan untuk membuka akses teknologi modern di antara penduduk itu dan memberikan keterampilan manajemen kepada kelompok ini. Prinsip dasar pendidikan nonformal di sini berkaitan dengan upaya pembelajaran sepanjang hayat, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Proyek pendidikan nonformal ini bertujuan pula untuk meningkatkan partisipasi anak putus sekolah di pendidikan dasar seperti yang dilaksanakan di

*Rajasthan* sebagai bagian dari program yang lebih luas dari pendidikan untuk semua yang dikenal dengan *Lok Jumbish*. Program ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan memiliki di antara anak dan orangtua untuk mengurangi angka putus sekolah di pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal yang berbeda dengan pendidikan sekolah. Karakteristik lain dari pelaksanaan pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan dasar untuk semua di India adalah kekhasan sasaran pada penduduk kelompok marginal dalam masyarakat.

#### **D. Korea Selatan dan Thailand**

Negara berikutnya yang dibahas adalah Korea Selatan dan Thailand; dua Negara yang melaksanakan pendidikan nonformal yang menjadi bagian dari studi kasus dalam buku ini. Korea Selatan termasuk Negara maju di kawasan Asia memiliki penduduk sekitar 55 juta, dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun berada pada angka 1,0% dan pendapatan per kapita diperkirakan tumbuh setiap tahun sekitar 4% dan posisi indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 1999 dengan skor 0,85. Dilihat dari sisi pendidikan dasar, Korea Selatan berada pada peringkat di atas negara-negara lain dalam studi kasus ini. Persentase literasi orang dewasa mendekati 99% untuk laki-laki dan 97% untuk perempuan, demikian juga untuk angka partisipasi murni pendidikan dasar mendekati 100%, perbandingan guru dan murid sekitar 30, dan pengeluaran publik untuk pendidikan mencapai 83% serta pengeluaran untuk pendidikan dibanding GNP menunjuk angka sekitar 4% lebih.

Thailand salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam peringkat indeks pembangunan manusia (IPM); memiliki penduduk sekitar 70 juta, rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun sekitar 1,2%,

pendapatan per kapita tumbuh sekitar cenderung naik, demikian juga persentase pengeluaran untuk pendidikan. Secara umum, status pendidikan dasar di Thailand naik membaik, dilihat dari persentase literasi orang dewasa laki-laki dan perempuan, angka partisipasi murni di tingkat pendidikan dasar di atas 92%, perbandingan guru dan murid sekitar 21, pengeluaran publik untuk pendidikan di atas 73% dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan setiap tahun cenderung meningkat di atas 4,1%.

Korea Selatan sejak tahun 1990-an sangat serius menggarap pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia memasuki abad 21 melalui gerakan reformasi pendidikan yang bertujuan agar penduduknya memiliki akses pendidikan kapan saja dan di mana saja sesuai asas pembelajaran sepanjang hayat yang hasilnya berupa *Credit Banking System*, suatu system pendidikan terbuka yang mengakui pengalaman belajar yang berbeda tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah. Bilamana seseorang telah memiliki *CBS* yang dipersyaratkan, maka yang bersangkutan akan dapat pengakuan seperti dalam pendidikan formal.

Sejak 1998, *CBS* telah dijalankan, hasilnya baik secara kuantitatif antara lain standarisasi kurikulum 151 program, 1.717 silabus kursus, dan 323 akreditasi lembaga, serta pada tahun 2000 telah terdaftar 12,630 peserta didik; dan secara kualitatif telah memajukan pendidikan di Korea Selatan dalam bentuk meningkatnya kemampuan belajar dan meningkatkan kemampuan perolehan pendapatan penduduknya. Melalui sistem ini status sosial lembaga-lembaga pendidikan meningkat melalui aktivitas pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan komtetitif dengan pendidikan formal dan berdampak signifikan terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh di Korea Selatan.

Thailand menyelenggarakan salah satu program pendidikan nonformal yang berupa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran para penduduk pedesaan melalui suatu rancangan kursus manajemen pertokoan dalam konteks pedesaan. Program ini menunjukkan suatu pendekatan yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan melalui tindakan-tindakan partisipatori.

Program ini dilaksanakan berkaitan dengan munculnya krisis ekonomi di Thailand berbarengan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan gerakan wajib belajar sembilan tahun dalam rangka pendidikan untuk semua menuju kualitas kehidupan masyarakat yang lebih meningkat. Untuk keperluan itu, departemen pendidikan nonformal melaksanakan eksperimen membentuk pusat perdagangan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh departemen perdagangan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan itu dinamai "*Community Trading Centre Suphanburi*".

Program kursus tersebut di atas, mencirikan bahwa pendekatan pengembangan keterampilan vokasional berarti pula peningkatan pendapat bagi masyarakat secara fleksibel, dan pada giliran berikutnya tidak saja dapat memecahkan masalah ekonomi masyarakat tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ciri berikut menunjukkan pula pentingnya kolaborasi antardepartemen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan ekonomi penduduk pedesaan melalui pengembangan pendidikan nonformal yang biasanya dilaksanakan secara tidak lintas departemen. Keberhasilan pendidikan nonformal dalam kegiatan ini dicirikan pula oleh tumbuhnya partisipasi organisasi lokal dalam melaksanakan dan mengelola program yang perlu didukung pula oleh partisipasi lembaga masyarakat lokal yang selama ini belum bertindak.

### **E. Malaysia dan Australia**

Studi kasus inovasi pendidikan nonformal selanjutnya di kawasan Asia Pasifik adalah program pengembangan pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh Malaysia dan Australia. Secara umum, Malaysia memiliki penduduk sekitar 30 juta orang, rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% per tahun, rata-rata pendapatan per kapita tumbuh sekitar 5,2%, dan memiliki skor indeks pembangunan manusia sekitar 0,768 pada tahun 1999 saat studi kasus ini dilaksanakan. Pada tahun 2016 ini tentu gambaran umum Malaysia seperti disampaikan di atas, mengalami perkembangan positif seiring laju pembangunan yang dilaksanakan oleh Malaysia. Dilihat dari sisi pendidikan dasar, Malaysia telah mencapai penurunan angka literasi penduduk dewasa yang luar biasa; kini tercapat masih sekitar 11% untuk laki-laki dan 22% untuk perempuan lebih rendah dari beberapa Negara lain yang melaksanakan studi kasus ini; angka partisipasi murni pendidikan dasar telah mencapai 95%; perbandingan guru-murid 19, pengeluaran publik untuk pendidikan dasar mencapai 76% dan pengeluaran publik untuk pendidikan dari GNP sebesar 5,2% jauh di atas Indonesia.

Australia, Negara di selatan Indonesia, termasuk juga dalam studi kasus ini, memiliki penduduk sekitar 20-an juta; rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun sekitar 1,2%; GNP per kapita rata-rata setiap tahun tumbuh 1,8%, skor indeks pembangunan manusia 0,922 paling tinggi di antara Sembilan Negara yang menjadi lokasi studi kasus ini. Gambaran pendidikan dasar dilihat dari angka literasi penduduk mencapai 100%, angka partisipasi murni pendidikan dasar sudah 101%, perbandingan guru-murid 18 baik sekali, pengeluaran public untuk pendidikan dasar sekitar 69,5% dan persentase pengeluaran publik terhadap GDP sebesar 5,6% paling tinggi di antara sembilan Negara lainnya dalam studi ini.



Program pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh Malaysia dan menjadi sampel dalam studi ini adalah proyek pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kemampuan pemuda dan orang dewasa di pedesaan. Setelah berhasil meningkatkan pendidikan dasar penduduknya, dalam beberapa tahun terakhir ini Malaysia fokus pada peningkatan keterampilan dan kemampuan belajar seluruh penduduk pedesaan melalui program massif pelatihan literasi komputer untuk orang dewasa agar para penduduknya mengenal dan terbiasa menggunakan computer.

Pada tahun 1996 Kementerian Pengembangan Pedesaan memperkenalkan program untuk seluruh negeri yang disebut “Rural Vision Movement” untuk meningkatkan “self-reliance” dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan masyarakat di daerah pedesaan dengan mengurangi bantuan pihak penguasa. Bagian penting dari program ini adalah kesempatan pendidikan lanjutan melalui kursus-kursus yang terorganisasi dengan salah satu programnya berupa kursus penggunaan komputer dasar yang dikelola oleh *The Institute for Rural Advancement (INFRA)*. Untuk yang pertama program ini dilaksanakan di Peringat, Kelantan pada bulan September 1997. Program ini kemudian berjalan selama tiga tahun (1998, 1999, 2000) dengan rata-rata kelas mencapai 26 partisipan, 57 kursus telah dilaksanakan dan memiliki peserta sekitar 1482 orang.

Australia melaksanakan program pendidikan nonformal inovatif dalam bentuk program pendidikan yang bertujuan meningkatkan keterampilan para petani Queensland dalam merencanakan bisnis strategik. Metoda yang dipergunakan dalam program ini berupa pembelajaran eksperiensial dan belajar tindakan untuk membantu para peserta memahami situasi yang dihadapi dan dapat mengendalikan masa depan.

Untuk mengetahui keberhasilan program tersebut telah dilakukan kajian dalam bentuk studi kasus yang bertujuan mengenali pengalaman berharga dari pelaksanaan model pembelajaran orang dewasa yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat pada empat aspek yaitu kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik, keterlibatan fasilitator dan peserta untuk dapat berpikir yang berbeda, kesesuaian peserta didik orang dewasa dengan proses pembelajaran, dan manfaat kegiatan pembelajaran terhadap perubahan, keadilan dan pemberdayaan.

Hasil analisis menemukan perubahan positif dalam menghasilkan peningkatan kualitas hidup, usahatani lebih menguntungkan, dan meningkatkan sumber-sumber alam dan tanah. Partisipan program telah menunjukkan motivasi yang meningkat dalam mencari keuntungan, berimplikasi juga pada perubahan aspirasi dalam mengelola sumber-sumber alam dan manusia, serta mengelola bisnis pertanian dan produksi. Telah terjadi juga peningkatan wawasan, kepercayaan-diri dan hubungan sosial dalam kelompok. Secara keseluruhan program ini memacu pemberdayaan petani dan anggota keluarganya karena proses pembelajaran memperkuat kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki dalam membuat pilihan strategik.

## **F. Indonesia**

Bagian akhir Bab III ini menjelaskan beberapa program pendidikan nonformal yang telah dikembangkan di Indonesia. Uraian menyeluruh tentang pendidikan nonformal di Indonesia telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sisi konsep, teori, praktek, konteks, dan sejarah perkembangannya. Oleh karena itu, pada bab ini khusus akan menjelaskan tentang program-program pendidikan nonformal dalam bidang-bidang pendidikan nonformal sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yaitu: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Tidak semua bidang-bidang pendidikan nonformal itu program-programnya dijelaskan pada bab ini. Beberapa program inovatif dari bidang-bidang pendidikan nonformal itu dijelaskan berikut ini.

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini digencarkan gerakan PAUD terpadu namun dalam kenyataannya pengembangan program PAUD masih bertumpu pada pandangan PAUD formal, nonformal, dan informal dalam bentuk satuan pendidikan seperti yang banyak terdapat di masyarakat yaitu taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak (TK) dan satuan pendidikan sejenis (SPS), dengan berbagai model pengelolaan kelembagaan dan pembelajarannya seperti model *Hightscope*, *Montessori*, *Froebel*, dan sejenisnya.

Kerangka pengembangan PAUD berkembang secara beragam, fokus pada: keluaran seperti meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial anak; proses pembelajaran seperti pengembangan model Montessori, pengembangan metoda, pada media pembelajaran, sampai pada pengembangan faktor-faktor masukan dan lingkungan yang lain seperti guru, kurikulum, sarana dan prasarana, serta belajar memanfaatkan lingkungan sekitar baik dalam bentuk formal, informal, maupun nonformal; di kota dan juga di pedesaan. Tak ketinggalan berbagai model pengasuhan dengan sasaran orang juga dikembangkan untuk memperkaya khasanah PAUD.

Beberapa contoh inovasi program PAUD terutama yang dilakukan melalui penulisan tesis oleh mahasiswa program studi S2 PLS dan PAUD serta beberapa penelitian dosen dapat dikemukakan berikut ini.

Salah satu inovasi pembelajaran PAUD yang agak komprehensif dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan model-model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program PAUD dilakukan oleh Yoyon Suryono, Sugito, dan Puji Yanti Fauziah selama tiga tahun mulai tahun 2013-2015, mulai dari model pembelajaran yang sifatnya umum (sebagai payung penelitian) yaitu model Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Taman Indria, Highscope, dan BCCT yang kemudian dilanjutkan dengan model pembelajaran turunannya yang diteliti oleh mahasiswa S2 PLS konsentrasi PAUD menjadi tesis S2 dalam tema atau judul penelitian yang berbeda. Hasil tesis mahasiswa S2 tersebut beberapa dikemukakan dalam buku ini.

Kreatifitas anak perlu dikembangkan agar anak memiliki kemampuan kreatif dalam kehidupannya. Oleh karena itu Baiq Roni Indira Astria dan Sodik Azis Kuntoro (2015) melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk pengembangan kreativitas dan minat belajar anak melalui permainan konstruktif yaitu permainan bermain balok dan *play dough* dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak yang ditunjukkan oleh kemampuan anak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya membuat bangunan dengan cukup rapi lebih dari 6 ragam bantuk dan ukuran balok, mengungkapkan ide sebelum bermain balok maupun *play dough*, menceritakan bangunannya secara detil, membuat bangunan dengan ide dan cara sendiri serta mampu membuat lebih dari 7 bentuk dari adonan tepung dengan ide dan cara sendiri, juga menggunakan 5-6 cetakan kue beragam, menghiasnya dengan hiasan kue dan menceritakan semua hasil karyanya. Demikian juga memunculkan minat belajar anak lebih

menyenangkan, bersemangat, dan aktif; memperhatikan penjelasan dan mendengar perintah, arahan dari guru, mencari tahu kegiatan belajar, dan masuk kelas atas keinginan sendiri dan mandiri serta mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai.

Masih tentang kreativitas, penelitian tindakan kelas sejenis dilakukan oleh Sri Hardiningsih dan Sujarwo (2015) dengan memanfaatkan media barang bekas untuk meningkatkan kreativitas anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran anak TK dan meningkatkan kreativitas anak melalui pemanfaatan barang bekas di TK Negeri Pembina Kota Bima. Barang bekas yang dimaksud berupa barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam mainan seperti anak yang disukainya seperti kapal-kapalan dan mobil-mobilan yang memacu tumbuhnya kreativitas anak dalam bentuk kelancaran, keluwesan, keaslian, keterperincian, dan kepekaan.

Penelitian lain di kelompok PAUD berkaitan dengan pengelolaan kelas pada kelompok bermain seperti dilakukan oleh Rinelsa R, Husein dan Sugito (2015) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja pendidik, pengalaman mengajar pendidik, kepemimpinan pendidik, dan fasilitas kelas terhadap pengelolaan kelas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari motivasi kerja, pengalaman mengajar, kepemimpinan pendidik, dan fasilitas kelas terhadap pengelolaan kelas. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisbet Simanjuntak (2005), memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nard (2007) dan penelitian Hagger dan McLntyre (2000).

Beberapa penelitian lain tentang PAUD dilakukan oleh Dian Wahyuningsih dan Slamet Suyanto (2015) tentang implementasi kearifan lokal melalui model *Beyond Center and Circle Time (BCCT)* untuk pengembangan kemampuan sosial anak dini. Kearifan lokal

yang dilaksanakan dalam penelitian ini berupa rasa syukur, tidak sombong, keras kepala, kebersamaan, berpikir kritis, cermat, *legowo*, silaturahmi, kesabaran, ketelitian, kreativitas, produk lokal, dan tata krama. Implementasi kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam bentuk lagu tradisional, permainan, lingkungan sekitar, makanan, pakaian, serta bahasa jawa. Perkembangan sosial anak meliputi kooperasi, toleransi, empati, memahami lingkungan sekitar, memahami diri sendiri, dan bersahabat. Perilaku sosial anak dalam bermain berubah dari tahap asosiatif menjadi tahap kooperatif pada sentra persiapan, balok, bahan alam, main peran, pesir-air, dan sentra eksplorasi.

Penelitian pembelajaran anak usia dini dilakukan juga oleh Muzakki dan Puji Yanti Fauziah (2015) tentang pembelajaran berbasis budaya lokal di PAUD *full day school*. Budaya lokal dalam penelitian ini menunjuk pada nilai agama, nilai budaya, permainan, tari dan lagu. Pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan perencanaan antara lain menganalisis kebutuhan anak dan budaya lokal yang ada, pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi pada setiap proses pembelajaran mulai dari awal sampai penutup dalam rentang waktu pukul 07.15-10.00 kegiatan persiapan dan pembelajaran di kelas bersifat pendidikan formal; pukul 10.00-16.00 berupa kegiatan pembiasaan dan pengasuhan dalam bentuk kegiatan pendidikan nonformal; dan penilaian dengan menggunakan lembar observasi (catatan anekdot dan daftar cek), unjuk kerja dan portofolio. Meskipun tidak eksplisit ditulis dalam laporan tesisnya, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran anak usia dini berbasis budaya lokal dapat dilaksanakan pada PAUD *full day school*.

Masih dalam tema inovasi pembelajaran anak usia dini, penelitian lain dalam warna yang berbeda dilakukan oleh Santi M.J. Wahid dan Slamet Suyanto (2015) tentang peningkatan keterampilan proses sains melalui percobaan sederhana pada anak

usia 5-6 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains melalui percobaan sederhana dilakukan melalui penelitian tindakan kelas dengan tema pembelajaran air, udara, api, dan alam semesta. Kegiatan percobaan sederhana dilakukan meliputi: (a) menduga, anak membuat dugaan sementara benda-benda terapung dan tenggelam, menyerap dan tidak menyerap air, larut dan tidak larut, roket balon, magnet I dan magnet II; (b) mengamati, anak diminta memasukkan semua benda-benda tersebut ke dalam air dan mengamatinya satu per satu berdasarkan ciri-ciri benda terapung dan tenggelam, ciri-ciri benda yang dapat menyerap dan tidak menyerap, dan ciri-ciri benda-benda yang larut dan tidak larut dalam air, ciri-ciri roket balon yang meluncur paling jauh dan paling dekat, dan ciri-ciri benda yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak dapat ditarik; (c) mengklasifikasikan benda-benda pada percobaan I sampai VI, dan (d) menceritakan kembali secara lisan oleh anak-anak hasil-hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa percobaan sederhana yang dilakukan oleh anak-anak dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan keterampilan proses sains anak yang meliputi keterampilan membuat dugaan, mengamati, mengklasifikasi, dan mengkomunikasikan.

Fokus inovasi pendidikan nonformal dalam lingkup PAUD lebih menitikberatkan pada inovasi isi dan proses pembelajaran, khususnya pada metoda dan media pembelajaran seperti pengembangan metode bermain peran untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak dilakukan oleh Sumanti M. Saleh dan Sugito (2015), pengembangan model pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan kualitas proses belajar anak dilakukan oleh Betty Yulia Wulansari dan Sugito (2015), pengembangan media video CD untuk peningkatan kemampuan membaca permulaan oleh Elisabeth Eka Sulistyowati dan Sujarwo (2016),

pengembangan media pembelajaran *big book* untuk pembentukan karakter anak usia dini oleh Ivone Hafidlatil Kiromi dan Puji Yanti Fauziah (2016), dan pengembangan media dongeng dalam pendidikan karakter anak yang dilakukan oleh Sidiq Nuryanto dan Rita Eka Izzati (2016). Kesimpulan umum dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan pentingnya selalu mencari materi dan cara-cara baru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini.

Selain itu, penelitian di sisi agak ke hilir berupa evaluasi program dilakukan oleh Herdi Handoko dan Wuradji (2015) berupa evaluasi program pendidikan dan pengembangan anak usia dini, sebagai salah satu proyek nasional untuk meningkatkan kapasitas PAUD yang diselenggarakan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa program pengembangan PAUD yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo telah dapat menaikkan angka partisipasi kasar sebagai indikator naiknya akses layanan berbarengan dengan naiknya kualitas layanan PAUD.

Penelitian evaluasi yang menekankan pada evaluasi hasil belajar, khususnya pembelajaran keterampilan membaca permulaan dilakukan oleh Syarifatul Fitria dan Suparno (2016) di taman kanak-kanak kelas A *Fastrack Funshool*, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan membaca permulaan dengan indikator mampu menyebutkan karakter huruf, bunyi huruf, mencocokkan huruf besar dan kecil, menyebutkan tulisan sederhana dengan simbol yang melambangkannya, secara umum dikategorikan "berkembang sangat baik", sebesar 93,33%. Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa metoda pembelajaran membaca permulaan yang diterapkan mampu meningkatkan antusiasme dan keaktifan anak-anak pada pembelajaran membaca permulaan dengan kategori "berkembang sesuai harapan".

Penelitian lain untuk mengembangkan inovasi program PAUD dapat dikemukakan di sini yaitu pengembangan *team*



*teaching* pendidik untuk pengembangan program PAUD dilaksanakan oleh Benny Erifiani dan Puji Yanti Fauziah (2014); kerjasama antara pendidik dan orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak oleh Daning Kusniapuantari dan Yoyon Suryono (2014); pemahaman kompetensi *parenting* terhadap perkembangan sosial anak dilakukan oleh Haryanti dan Sumarno (2014); pendidikan perspektif gender pada anak usia dini oleh Roziqoh dan Suparno (2014); implementasi pembelajaran terpadu terhadap perkembangan anak usia dini oleh Avanti Vera Risti Pramudyani dan Sugito (2014); peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin anak usia dini oleh Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono (2014). Berikutnya penelitian penggunaan media pembelajaran plastisin untuk meningkatkan kreativitas anak (Kartini dan Sujarwo, 2014); peningkatan keterampilan berbicara anak usia dini melalui permainan sandiwara boneka (Mila Faila Shofa dan Suparno, 2014); serta penggunaan media pembelajaran berbasis alam untuk mengembangkan kognitif anak usia 5-6 tahun (Susmiyati Jiwaningrum dan Yoyon Suryono, 2014). Inovasi lain dilakukan melalui penelitian model pendidikan karakter bagi anak melalui "sekolah ibu" nonformal di pedesaan (Yoyon Suryono dan Puji Yanti Fauziah, 2014).

## 2. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

Pendidikan kecakapan hidup (PKH) merupakan bagian dari pendidikan nonformal selain pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, dan bentuk-bentuk lain dalam lingkup pendidikan nonformal mengacu pada UU No. 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 dan 28. PKH dapat diselenggarakan secara tersendiri dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan bentuk-bentuk program PNF

lainnya. Kebijakan yang ditetapkan beberapa tahun terakhir ini oleh kementerian di bidang pendidikan dan kebudayaan berupa pelaksanaan PKH bersama dengan bentuk PNF lain, seperti pendidikan keaksaraan berbasis pendidikan kecakapan hidup atau pendidikan kesetaraan berbasis pendidikan kecakapan hidup.

Program PKH ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membekali warga belajar orang dewasa dengan berbagai kecakapan yang diperlukan untuk kehidupannya antara lain berupa kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional sebagaimana telah diteliti, salah satunya, oleh Muhammad Adil Arnady dan Iis Prasetyo (2016) yang mencoba melakukan evaluasi pelaksanaan program kecakapan hidup di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun judul penelitiannya menyangkut pendidikan kecakapan hidup, namun sesungguhnya bila dilihat dari empat aspek penting dari pendidikan kecakapan hidup itu, penelitian ini lebih spesifik ke pendidikan vokasional yang berupa kursus tata rias pengantin, kursus menjahit, dan kursus komputer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kursus tata rias pengantin dan kursus komputer memiliki "hasil" jangka panjang dan menengah bagi pesertanya, tetapi tidak pada peserta kursus menjahit. Demikian juga dalam hal "proses" dan "masukan" telah menunjukkan sumbangan berarti bagi tercapainya "keluaran" seperti yang diharapkan, kecuali faktor sarana dan prasarana serta pendanaan dalam melaksanakan tiga kegiatan yang diteliti ini.

Penelitian inovatif lain tentang PKH dapat dikemukakan di sini yaitu penelitian evaluasi untuk mengembangkan model evaluasi pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah dilakukan oleh Sofyan Hadi dan Yoyon Suryono (2014). Penelitian sejenis dilakukan juga oleh Trisanti dan Yoyon Suryono (2014) tentang evaluasi program PKH bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. Masih tentang evaluasi

program, pengembangan model evaluasi program dilakukan oleh Yoyon Suryono, Al Setyo Rohadi dan RB Suharto (2009) berkait dengan pendidikan kecakapan hidup dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. Hasil penelitian yang terakhir ini kemudian disunting dalam bentuk versi jurnal oleh Yoyon Suryono dan Entoh Tohani (2014). Ketiga penelitian ini menekankan pada pengembangan model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup atau program pendidikan nonformal dalam berbagai bentuk program pembelajaran, khususnya program pembelajaran kecakapan vokasional.

Pengembangan program pendidikan kecakapan hidup sebagai bagian penting dari pendidikan nonformal, di sisi *content* telah dicoba dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model 4-H (*Head, Hand, Heart, and Health*) berbasis kewirausahaan melalui model pembelajaran *experiential learning* untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan (Iis Prasetyo, Entoh Tohani, dan Sumarno, 2014). Secara umum, hasil penelitian dan pengembangan model 4-H menunjukkan bahwa tiga dari empat kelompok sasaran pada penelitian ini terjadi peningkatan pada aspek pendidikan kecakapan hidup 4-H. Hal ini membuktikan bahwa model 4-H telah dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di pedesaan dan mendukung pengembangan kewirausahaan.

Pada tahap awal pengembangan model 4-H dalam pendidikan kecakapan hidup dikembangkan oleh Yoyon Suryono, Sumarno, dan Entoh Tohani (2010) dalam penelitian dan pengembangan pendidikan nonformal dan pengurangan kemiskinan di pedesaan melalui pendekatan pengembangan model pendidikan kecakapan hidup di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu hasil penelitian dan pengembangan tersebut menunjukkan bahwa

serangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pendidikan kecakapan hidup dengan model 4-H meliputi pelatihan vokasional, pemberian pengalaman belajar melalui observasi lapangan, pelaksanaan pelatihan nonvokasional, serta evaluasi. Serangkaian kegiatan ini berperan dalam peningkatan keluaran pendidikan kecakapan hidup dengan model 4-H ini.

### 3. Pendidikan Keaksaraan (PK)

Pendidikan keaksaraan di Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak gerakan pemberantasan buta huruf (PBH) pada awal kemerdekaan sampai sekarang masih terus digencarkan dengan nama dan bentuk yang berbeda sebagai proses dan hasil dari inovasi terus menerus di bidang pendidikan nonformal dalam konteks yang satu ke konteks berikutnya. Perkembangan terkini di bidang "keaksaraan" yang diinspirasi oleh konsep "literasi" berkembang pendidikan keaksaraan dalam tiga kelompok yang tidak bermakna tingkatan: pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjut, dan pendidikan keaksaraan usaha mandiri dibarengkan dengan konsep pendidikan kesetaraan: program Paket A (setara SD), program Paket B (setara SMP), dan program Paket C (setara SMA). Pendidikan keaksaraan dasar disetarakan dengan kelas III SD, dan pendidikan keaksaraan dirancang setara dengan program Paket A berikutnya sehingga "materi" bahan ajar pendidikan keaksaraan dasar mengacu pada kurikulum sekolah formal (SD) yang sesuai. Selain itu, pendidikan keaksaraan lanjut dan pendidikan keaksaraan usaha mandiri didasari pula oleh pemikiran perlunya kecakapan hidup diberikan kepada warga belajar orang dewasa pendidikan keaksaraan secara berbarengan dalam konteks menumbuhkan semangat kewirausahaan yang dikemas dalam pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

Konsep "literasi" yang disampaikan di atas memiliki keluasan cakupan dan kedalaman materi agar orang dewasa tergolong pada masyarakat "literate", yang tidak sekedar baca-tulis-hitung, tetapi juga memiliki kemampuan literasi di segala aspek kehidupan manusia yang mendasar sampai ke yang lanjut dengan mengedepankan kemampuan hidup dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah, penuh ketidakpastian, dan juga perlu selalu secara terus menerus diperbaharui. Di sinilah kemudian muncul konsep "kecakapan umum" yang perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya.

Untuk memperoleh gambaran perkembangan pemikiran, kebijakan, dan praktek pendidikan keaksaraan, disajikan di bawah ini kutipan dari buku Pendidikan Kaaksaraan yang ditulis oleh penulis yang sama dengan buku ini (Yoyon Suryono, 2016).

### **Rancangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 mengembangkan model pendidikan keaksaraan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dalam tiga model yaitu pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri dengan sedikit modifikasi menjadi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri, dan pendidikan multikeaksaraan. Ketiga model itu bersifat berkelanjutan tetapi tidak berjenjang. Secara sederhana, pendidikan keaksaraan dasar menekankan pada kemampuan "calistung", pendidikan keaksaraan usaha mandiri menekankan pada kemampuan awal untuk berusaha mandiri, dan pendidikan multi keaksaraan menekankan pada pengembangan peran warga belajar dalam masyarakat. Ketiga model itu dilaksanakan dengan pendekatan fungsional yang disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan warga belajar setempat.

Hal menarik dari ketiga model pendidikan keaksaraan itu, khususnya untuk pendidikan keaksaraan usaha mandiri dan pendidikan multikeaksaraan dirancang setara dengan Paket A setara SD kelas 1-3 sehingga dengan demikian para warga belajar pendidikan keaksaraan dapat berlanjut terus ke pendidikan kesetaraan Paket A setara kelas 4, dan seterusnya ke program Paket B dan Paket C tahap berikutnya.

Agar pendidikan keaksaraan yang dimaksud di atas memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka untuk pendidikan keaksaraan dasar telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Sementara itu untuk pendidikan keaksaraan usaha mandiri masih sedang dirancang peraturannya dan setelah itu akan dirancang juga peraturan menteri yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan pendidikan multikeaksaraan sejalan dengan rancangan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan butir-butir penting bagi inovasi pendidikan keaksaraan agar selalu dapat mengikuti kebutuhan orang dewasa dan kebutuhan kecakapan hidup karena kemajuan dan perubahan kehidupan dan masyarakat. Ketiga model pendidikan keaksaraan tersebut di atas perlu secara terus menerus dikaji dan dikembangkan substansinya, selain berbagai model pembelajaran, penguatan metoda pembelajaran, pemilihan media belajar yang tepat dan fungsional, serta tentu pula disiapkan kemampuan pendidiknya yang secara khusus harus memiliki kemampuan substansi dan metodologi pembelajaran. Pemahaman yang tepat dan komprehensif atas karakteristik warga belajar orang dewasa dan pemahaman kondisi dan kebutuhan setempat karena beda ciri-ciri geografisnya akan membantu tercapainya program-program pendidikan keaksaraan secara lebih bermakna dan bertanggung jawab. Jauh di atas itu, perlu pula selalu dibangun

komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberi prioritas bagi pemenuhan pendidikan dasar warga masyarakat lewat pendidikan keaksaraan, sehingga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas hidup warga negara yang termasuk kelompok kurang beruntung secara ekonomi dan sosial.

Dibanding program pendidikan nonformal lain, inovasi di bidang pendidikan keaksaraan jarang dilakukan oleh kalangan peneliti di perguruan tinggi, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, juga oleh para dosen di jurusan Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Nonformal). Badan-badan penelitian dan pengembangan seperti pusat atau balai penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini sudah melakukan banyak kajian, penelitian atau pengembangan tetapi tidak sebanyak program-program pendidikan nonformal lain. Di sinilah letak tantangan untuk melakukan inovasi berbagai model pembelajaran pendidikan keaksaraan yang memacu tercapainya tujuan pendidikan dasar untuk semua. Penulis mengundang para mahasiswa dan dosen PLS/PNF untuk memperbanyak penelitian di bidang ini, terutama dalam bentuk tesis atau disertasi serta penelitian para dosen. Berikut gambaran pembelajaran pendidikan keaksaraan (Yoyon Suryono, 2015) yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (kini, nama direktorat mengalami perubahan).

### **Pembelajaran Keaksaraan**

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar beberapa kebijakan teknis telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2014 yang mencakup beberapa hal berikut ini: standar kompetensi lulusan, test kemampuan awal dan akhir, pendekatan pembelajaran fungsional, beberapa contoh pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi keaksaraan.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan keaksaraan dasar secara singkat dideskripsikan sebagai berikut: (1) dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia minimal 3 kalimat sederhana, (2) dapat mendeskripsikan lingkungan, jati diri, dan gambar, (3) dapat melakukan operasi perhitungan (tambah, kurang, kali, dan bagi) minimal 3 digit, (4) dapat mengoperasikan uang dalam kehidupan sehari-hari, dan (5) dapat melakukan operasi perhitungan jarak, isi, waktu, dan berat.

Kebijakan teknis kedua berkaitan dengan pelaksanaan tes pada proses pembelajaran pendidikan keaksaraan yang mencakup tes kemampuan awal dan tes akhir dengan evaluasi berbasis kompetensi. Ada tiga kondisi yang dirancang dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan. Kondisi pertama, awal, warga belajar tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung kemudian dilaksanakan pembelajaran huruf, suku kata, kata, dan kalimat serta belajar angka dan menghitung (tambah, kurang, kali, dan bagi) dengan pengantar bahasa Ibu untuk memudahkan mengenal huruf, suku kata, kata, kalimat, dan angka.

Kondisi kedua, warga belajar bisa membaca, menulis, dan berhitung tapi tidak lancar, maka dilakukan proses pembelajaran membuat kalimat dan deskripsi serta belajar berhitung sampai 3 digit. Warga belajar dilatih membuat kalimat atau mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Ibu dan lanjut ke bahasa Indonesia dan diajarkan berhitung. Kondisi ketiga, warga belajar sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar kemudian dilanjutkan pembelajaran perhitungan uang, jarak, waktu, isi, dan berat. Warga belajar dilatih menghitung yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.

Setelah berlangsung proses pembelajaran keaksaraan pada tiga kondisi tersebut kemudian dilakukan penilaian berbasis SKL atau berbasis kompetensi dan kepada peserta yang telah selesai dan dinyatakan lulus diberi surat keterangan melek aksara (SUKMA).



Pendekatan fungsional dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (2014) menyebut pendekatan fungsional sebagai materi, media, dan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, masalah, dan kebutuhan serta minat warga belajar. Pendekatan fungsional ini berdampak pada dua hal yaitu materi yang diajarkan mudah diikuti dan dipahami karena terkait dengan kondisi dan dirasakan manfaatnya oleh warga belajar serta apapun yang ada di sekitar warga belajar dapat digunakan sebagai sumber, bahan dan media pembelajaran. Dengan demikian maka dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar atau “calistung”, materi pembelajarannya disusun dari kondisi, masalah, kebutuhan, keinginan dan minat warga belajar yang mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL).

Dalam hubungannya dengan mengembangkan contoh-contoh pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengidentifikasi beberapa contoh pembelajaran pendidikan keaksaraan yang selama ini telah dilaksanakan dan perlu dikembangkan. Pembelajaran pendidikan keaksaraan yang pertama dilaksanakan dengan model klasikal seperti anak sekolah yang ternyata dari pengalaman selama ini proses pembelajaran dengan cara klasikal ini kurang menarik, kaku, suasana belajar menjadi formal, hasil belajar kurang fungsional, dan proses pembelajaran memerlukan waktu lama untuk mencapai standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar.

Pembelajaran kedua yang dilaksanakan adalah model pembelajaran kelompok dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Pembelajaran dalam bentuk kelompok belajar ini ternyata lebih menarik, pembelajarannya dinamis, suasana kekeluargaan, warga belajar cepat menguasai kemampuan calistung, hasil belajar lebih fungsional dan pembelajaran bisa lebih cepat mencapai SKL. Model kedua ini pada akhir-akhir ini banyak dilakukan dibanding dengan model pembelajaran klasikal. Model kelompok belajar ini merupakan model pembelajaran yang diharapkan banyak dilakukan dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.

Model pembelajaran lain yang dilakukan adalah model pembelajaran dengan muatan keterampilan dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dipadukan dengan pembelajaran kelompok. Hasilnya ternyata jauh lebih baik bila pembelajaran kelompok tidak dilaksanakan dengan keterampilan. Pembelajaran dengan keterampilan ini sesuai dengan karakteristik kebutuhan warga belajar orang dewasa. Beberapa tahun terakhir ini banyak dilaksanakan dan dikembangkan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar yang disertai dengan pendidikan keterampilan.

#### 4. Kursus dan Pelatihan

Banyak program dan kegiatan pendidikan nonformal diwadahi dalam bentuk "kursus dan pelatihan" sebagai kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan keterampilan vokasional kepada peserta didik orang dewasa yang tergolong usia produktif sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk hidup layak sebagai warga negara yang berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Proses pembelajaran pada umumnya diselenggarakan secara khusus dalam rentang waktu yang tidak terlampau lama, bisa hitungan jam, hari, minggu dan bahkan beberapa bulan sesuai kemampuan atau kompetensi yang ingin dibelajarkan kepada peserta didik orang dewasa. Magang dan pelatihan kerja merupakan metoda dan sekaligus media pembelajaran keterampilan sesuai prinsip belajar eksperiensial dan belajar kontekstual dalam salah satu bentuk yang dikenal "belajar dengan bekerja". Dalam konteks ini, beberapa standar telah ditetapkan: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, serta standar evaluasi. Siapapun penyelenggara kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar-standar yang telah ditentukan ini. Tentu tidak semua jenis kursus dan pelatihan telah dibuat standarnya, namun beberapa jenis kursus dan pelatihan

telah memiliki standar-standar yang ditetapkan ini. Hal ini diperlukan untuk dapat mengendalikan dan menjaga mutu kursus dan pelatihan. Demikian juga untuk beberapa lembaga kursus dan pelatihan diwajibkan untuk mengikuti dan memiliki akreditasi lembaga dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Nonformal.

Pihak yang berwenang di kementerian pendidikan dan kebudayaan selain merumuskan berbagai regulasi kursus dan pelatihan juga telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan kursus dan pelatihan melalui lembaga yang ditugasi untuk keperluan ini semisal PP-PAUDNI, BP PNFI, dan BPKB (dulu, kini nama-nama ini telah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tidak ketinggalan lembaga kursus dan pelatihan itu sendiri, baik secara swadana maupun bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai bentuk skema pendanaan yang ada.

Beberapa bentuk inovasi di bidang kursus dan pelatihan dapat disebut di sini sebagai ilustrasi atau gambaran kondisi nyata kursus dan pelatihan yang berkembang di masyarakat, dilaksanakan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga-lembaga lain sepanjang pengetahuan dan informasi yang dapat diketahui atau dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulisan buku ini yang tentu dengan sendirinya masih terbatas.

Salah satu penyelenggara kursus dan pelatihan adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terdapat di kabupaten/kota. Beberapa SKB telah melaksanakan kursus dan pelatihan misalnya SKB di Jawa Tengah (Ika Rizki Meilya dan Ibnu Syamsi, 2015) yang meneliti tentang keberhasilan pelatihan peningkatan kompetensi tutor Paket C; dan SKB di Ujung Pandang, Kota Makasar (Ihwan Ridwan dan Yoyon Suryono, 2015) yang meneliti tentang keberhasilan program pendidikan vokasi dalam tiga bentuk yaitu kursus menjahit, hantaran, dan tata rias pengantin. Hasil kajian

kedua bentuk kursus dan pelatihan di SKB ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan pelatihan berperan dalam meningkatkan kemampuan warga belajar orang dewasa melalui penguasaan vokasi yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan dan mendapat penghasilan secara finansial.

Inovasi model kursus dan pelatihan telah banyak dilakukan oleh lembaga pelatihan atau masyarakat sendiri. Tercatat misalnya pelatihan keterampilan dan motivasi kerja dalam kaitan dengan tingkat pendapatan ibu rumah tangga yang diselenggarakan oleh *Luthfi Craft* yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2007 sampai 2011 dan hasilnya telah diteliti oleh Sudaresti dan Yoyon Suryono (2015) menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan dan motivasi kerja tinggi memberi sumbangan positif bagi perolehan pendapatan ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan tersebut di atas.

Pelatihan lain sebagai bentuk inovasi pendidikan nonformal dalam wadah kursus dan pelatihan antara lain pelatihan pengolahan bahan pangan lokal dalam rangka pemberdayaan perempuan (Wildan Saugi dan Sumarno, 2015) dan pelatihan kesiapan bencana bagi masyarakat kawasan rawan bencana (Puri Bhakti Renatama dan Yoyon Suryono, 2015). Penelitian agak berbeda tetapi menunjang keberhasilan pelaksanaan kursus dan pelatihan dilakukan oleh Yudan Hermawan dan Yoyon Suryono (2015) tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang di dalamnya mengandung berbagai program kursus dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan.

Inovasi program kursus dan pelatihan yang lebih kolektif di tingkat desa dilakukan melalui program desa vokasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan

program ini telah dilakukan penelitian oleh Abdul Malik dan Siti Irene Astuti Dwiningrum (2014). Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program desa vokasi dapat meningkatkan perkembangan kelompok usaha, ekonomi masyarakat, status sosial, dan perubahan budaya dalam masyarakat.



# BAB 4

## INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab IV membahas inovasi pendidikan nonformal yang difokuskan pada konsep, urgensi, teori, aspek, dan hambatan serta pendukung ikhtiar inovasi pendidikan nonformal dalam berbagai konteks: pendidikan holistik, pengembangan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan dari berbagai perspektif pemikiran dan pengalaman praktis-teruji yang selama ini berkembang di Indonesia.

## A. Konsep Inovasi

Secara umum, inovasi sering disamakan dengan kata reformasi atau perubahan. Kata inovasi berasal dari bahasa Latin *innovatio*, yaitu yang diperbaharui atau direnovasi, didasarkan pada *novus* yang berarti baru sebagai suatu yang berharga. Inovasi tidak harus diawali dengan invensi sebagai tindakan yang terkait dengan kreativitas mutlak dan penemuan (*discovery*). Inovasi merupakan tindakan yang *positional*, dimana suatu tindakan dipandang sebagai tindakan inovatif tergantung latar sosial dimana tindakan ini diarahkan; suatu inovasi tidak perlu sesuatu “baru” bagi individu yang menerapkan tindakan terkait atau bagi konteks sosial. Bailye dan Ford menyatakan bahwa inovasi terjadi ketika individu menghasilkan solusi yang bermakna dan anggota-anggota yang dalam lingkungannya atau domainnya mengadopsi solusi dimaksud sebagai tindakan bernilai dari aktivitas sekarang (OECD, 2009).

Oslo Manual (2005) menyatakan inovasi sebagai suatu implementasi dari ide baru atau produk berupa layanan atau barang yang sangat penting/baik, atau proses yaitu suatu metode pemasaran yang baru, atau metode organisasional yang baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja, atau relasi eksternal. Ia menyatakan bahwa definisi inovasi mengandung aspek: (1) kebermaknaan (*novelty*), (2) membawa manfaat, dan (3) mengandung kekomplekan. Selanjutnya Oslo Manual menjelaskan bahwa inovasi dapat dilakukan terhadap produk, proses, pemasaran, dan organisasi. Pendapat ini, menurut penulis, lebih ke pemikiran ekonomi atau bisnis.

### 1. Inovasi produk.

Inovasi produk merupakan pengenalan dari barang atau layanan yang merupakan sesuatu yang baru atau ditingkatkan secara signifikan yang disesuaikan dengan kegunaan yang



diharapkan. Hal ini mencakup peningkatan signifikansi dalam spesifikasi teknis, komponen dan material, atau karakteristik fungsional dari produk. Peningkatan signifikan dapat dilakukan dengan mengubah material, komponen, atau karakteristik lain untuk meningkatkan kinerja. Inovasi pada layanan jasa dapat mencakup bagaimana mereka dapat disediakan (misal efisiensi, kecepatan), tambahan fungsi baru pada layanan yang ada, dan pengenalan layanan baru.

## 2. Inovasi proses.

Inovasi proses merupakan implementasi produksi yang ditingkatkan secara signifikan atau produksi baru atau metode pengantaran/pengiriman. Hal ini mencakup perubahan-perubahan yang penting dalam teknik, peralatan, dan perangkat lunak. Inovasi dapat bertujuan untuk menurunkan unit biaya produksi atau pengantaran/pengiriman, meningkatkan mutu, atau menghasilkan atau menghantarkan produk yang ditingkatkan secara signifikan atau baru.

## 3. Inovasi pemasaran.

Suatu inovasi pemasaran adalah implementasi dari metode pemasaran yang baru atau metode pengantaran. Ini mencakup perubahan signifikan dalam desain atau pengemasan, penempatan produk/layanan, promosi produk/layanan, atau harga. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kebutuhan konsumen yang terbaik, membangun atau membuka pasar baru, atau posisi produk atau pasar yang baru.

## 4. Inovasi organisasi.

Inovasi organisasi adalah implementasi dari suatu metode organisasi yang baru dalam praktik usaha organisasi, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. Inovasi ini dapat

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga melalui penurunan biaya administrasi atau transaksi, peningkatan kepuasan tempat kerja dan produktivitas pekerja, mencapai akses terhadap sumber daya yang belum terakses seperti pengetahuan eksternal yang belum dikodifikasi, atau menurunkan biaya pengiriman.

## **B. Urgensi Inovasi**

*Praktik-terbaik.* Studi kasus yang dilakukan oleh UNESCO (2002) di beberapa negara terpilih di kawasan Asia Pasifik tentang pendidikan nonformal menyimpulkan sebuah rumusan praktik-terbaik untuk dijadikan dasar bagi inovasi pendidikan nonformal ke depan dalam tujuh hal strategi sebagai berikut: perlunya perluasan definisi dan cakupan pendidikan nonformal, keterlibat komunitas untuk keberhasilan, pendidikan nonformal harus didasarkan pada kebutuhan lokal, dukungan pemerintah berkelanjutan, keterkaitan literasi dengan kegiatan ekonomi, peran pendidikan dasar dalam mengatasi kemiskinan, pendidikan nonformal merupakan kegiatan multi-sektor.

Perlu ada perubahan pandangan terhadap pendidikan nonformal pada saat ini, definisi dan lingkupnya. Secara tradisional PNF merupakan pengganti pendidikan dasar bagi mereka yang tidak memperoleh kesempatan atau keberuntungan dari pendidikan formal, maka kegiatan PNF di sini sebagian besar menekankan pada literasi dan numerasi dasar bagi penduduk produktif dan orang tua. Mengikuti perubahan yang terjadi, diperlukan perluasan definisi, lingkup dan program PNF pada pascaliterasi, pendidikan berkelanjutan, dan pembelajaran sepanjang hayat PNF perlu dikembangkan ke *tertiary education*, belajar ICT, serta kemampuan mengembangkan bisnis dan pemasaran.

Pengalaman lapang yang diperoleh menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PNF perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor kritikal bagi keberhasilan program PNF. Oleh karena itu, maka inovasi pendidikan nonformal harus mencakup juga inovasi yang mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program PNF. PNF berhasil jika mendapat dukungan dan keterlibat masyarakat. Di sini kemudian muncul pandangan program PNF berbasis komunitas. Kajian lapang di awal munculnya PNF oleh Coombs dan Ahmed (1974) menunjukkan bahwa PNF memiliki keamatan hubungan dengan masalah-masalah kemiskinan dan pedesaan.

Temuan berikut dari kajian lapangan oleh Coombs dan Ahmed menunjukkan juga keberhasilan program-program PNF harus didasari oleh kebutuhan lokal. Demikian juga temuan studi kasus yang dilakukan oleh UNESCO (2002) atas beberapa program PNF di kawasan Asia dan Pasifik memunculkan suatu prinsip kerja PNF berbasis pada kebutuhan lokal, baik dari sisi fasilitas pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan program, evaluasi program maupun manfaat dan dampaknya bagi masyarakat lokal.

Dukungan pemerintah secara berkelanjutan terhadap program-program PNF diperlukan agar misi utama PNF tercapai dengan baik dan memiliki sumbangan positif untuk memberdayakan masyarakat; pemerintah pusat, daerah, dan bahkan di tingkat lokal perlu membantu secara teknis dan finansial manakala program PNF yang dikembangkan bersentuhan dengan upaya pendidikan masyarakat dan pengentasan kelompok masyarakat miskin di pedesaan agar lebih berdaya dengan kemampuan sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Temuan berikut dari kajian lapang yang dilakukan melalui studi kasus berupa kesimpulan perlunya keterkaitan literasi dengan aktivitas ekonomi dalam semua program-program

pendidikan nonformal. Program-program keaksaraan/literasi dan numerasi tidak berdiri sendiri, tetapi perlu dikaitkan dengan berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat; tentu dengan maksud agar masyarakat juga memiliki kemampuan literasi dalam segala aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dengan demikian para warga belajar orang dewasa itu memiliki keterampilan berusaha dan memperoleh pendapatan serta sedikit demi sedikit kesejahteraan hidupnya meningkat atas dasar kemampuan diri sendiri.

Di atas sudah dijelaskan bahwa program PNF harus bersinggungan dengan aktivitas ekonomi dan aktivitas ekonomi bersinggungan dengan persoalan pengentasan kemiskinan. Jadi program PNF dengan sendirinya harus berkait dengan pengurangan penduduk miskin melalui pengembangan program pendidikan dasar untuk mengurangi angka kemiskinan. Ini strategi dasarnya yang memerlukan implementasi pada sisi teknis edukasi dan kaitan sisi ekonomi dan kemiskinan.

Pelaksanaan program PNF dalam berbagai pemikiran di atas, keberhasilannya memerlukan dukungan kegiatan multisektor, tidak saja sektor pendidikan itu sendiri tetapi juga sektor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, tenaga kerja, pariwisata, teknologi komunikasi dan informasi serta berbagai sektor lainnya. Dengan demikian, aktivitas PNF itu, dilihat dari sisi keilmuan, merupakan aktivitas multidisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, khususnya persoalan masyarakat yang pemecahannya memerlukan pendekatan pendidikan, terutama pendidikan nonformal. Pemecahan masalah di sini dapat meliputi sisi substansi, strategi, metodologi, dan teknik edukatif.

*Tuntutan kompetensi sumber daya manusia abad-21.* Inovasi pendidikan nonformal didorong pula oleh berkembangnya pendapat tentang kompetensi sumber daya manusia abad-21 dalam dua

dekade terakhir ini yang menuntut untuk direalisasikan melalui berbagai upaya pendidikan, tak terkecuali pendidikan nonformal dalam perspektif pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat berbasis pengetahuan. Pendapat tentang kompetensi sumber daya manusia abad-21 dikemukakan berikut ini.

Dalam mempersiapkan diri agar memiliki kemampuan kompetitif dalam memasuki pasar bebas melalui strategi pembelajaran sepanjang hayat, Tiongkok merumuskan kompetensi kunci bagi sumber daya manusianya dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja yang mencakup: kemampuan literasi dan numerasi, kemampuan penguasaan sains, teknologi dan bahasa, serta kompetensi keterampilan (*skill*) umum baru yang berupa kemampuan: pemecahan masalah, komunikasi, kerja tim, kreativitas, belajar untuk belajar; serta memiliki keterampilan fungsional dan okuvasional baru sesuai yang dipersyaratkan (Dahlman, Zeng, dan Wang, 2007).

Sementara itu, masyarakat Eropa merumuskan kompetensi kunci (European Communities, 2007) yang mencakup: komunikasi dalam bahasa ibu, komunikasi dalam bahasa asing, kompetensi matematikal dan kompetensi dasar dalam sains dan teknologi, kompetensi digital, belajar untuk belajar, kompetensi sosial dan kewarganegaraan, inisiatif dan kewirausahaan, kesadaran dan ekspresi kultural. Kompetensi di sini dimaknai sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan konteksnya. Kompetensi kunci merupakan kebutuhan individu untuk pemenuhan diri dan pengembangan, kewarganegaraan aktif, inklusi sosial, dan pekerjaan/jabatan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Trilling et.al. (Richardus Eko Indrajit, 2011) yang merumuskan kompetensi SDM abad-21 sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
2. Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak.
3. Kemampuan mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif.
4. Kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari.
5. Kemampuan melaksanakan aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi.
6. Kemampuan memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan berbagai pihak.

Selain itu, dalam konteks manusia secara individu diharapkan memiliki karakter dan perilaku manusia abad ke-21 yang meliputi (a) kepemimpinan yaitu sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan, (2) sikap bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri, (3) etika yaitu menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial bersama, (4) keterampilan manusia, memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan sosial, (5) mampu beradaptasi dan adopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu, (7) kondisi dimana seorang individu memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan, (8) memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan kehidupan maupun

komunitas yang ada di sekitarnya, dan (9) mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktifitas dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

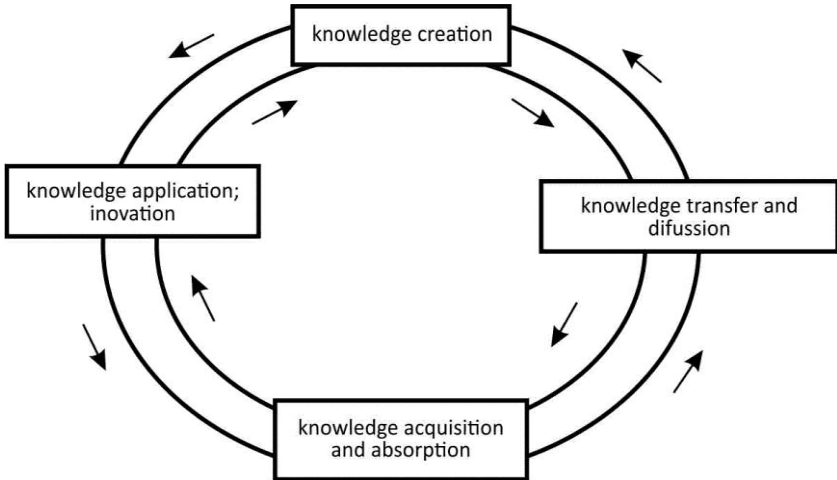
Selain keahlian dan karakter tersebut, dibutuhkan pula kemampuan individu untuk menghadapi permasalahan sosial yang dihadapi pada abad-21, berkait dengan kesadaran global yaitu kemampuan melihat kecenderungan dan tanda-tanda jaman terutama dalam kaitan akibat globalisasi; literasi finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan, yaitu keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya untuk meningkatkan kemandirian berusaha; literasi kewarganegaraan yaitu kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam; dan kesadaran lingkungan, yaitu kemauan dan keperdulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar, demikian dikemukakan oleh Banks (Richardus Eko Indrajit, 2011).

Dari beberapa kutipan tersebut di atas, para mahasiswa dan pembaca buku ini dapat memilih dan memilah secara kritis berbagai rumusan itu untuk dijadikan panduan dalam mengembangkan program pendidikan nonformal ke depan agar lebih terasa nuansa inovatifnya atas dasar substansi kompetensi SDM abad-21 dalam konteks yang harus dihadapinya, dilihat dari sisi individu, masyarakat, dan negara pada tataran lokal, regional, nasional dan bahkan global.

### **C. Teori-Teori Inovasi Pendidikan Nonformal**

OECD mengemukakan beberapa teori mengenai bagaimana inovasi dapat dihasilkan yaitu teori *circular flow*, teori empat tahap, model *chain-link*, dan model siklus inovasi kesehatan. Teori *circular flows* dikembangkan oleh Dankabaar (2004) yang memandang bahwa ilmu dan teknologi adalah penting, tetapi tidak cukup, sumber pengetahuan adalah inovasi (OECD, 2009). Model

ini menggambarkan bagaimana aliran pengetahuan baik dalam arah atau tujuan (*directions*) dan usaha-usaha untuk menggambarkan hubungan dinamis ini. Model inovasi ini dapat digambarkan berikut:



Source: Dankbaar (2004) in OECD (2004)

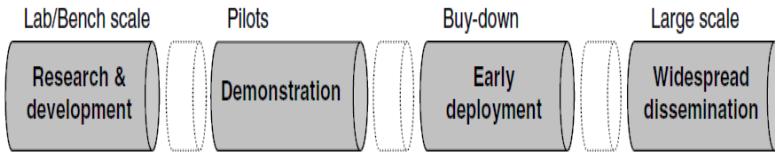
Pendapat tersebut di atas menggambarkan bahwa pengetahuan memerlukan kreasi, transfer, dan penyebarluasan. Pengetahuan perlu juga untuk dimiliki dan diserap serta pengetahuan itu perlu diterapkan dan inovasi secara berkelanjutan dan terus menerus atau sebaliknya. Kreasi pengetahuan perlu dilanjutkan dengan penerapan dan inovasi, terus dimiliki dan diserap, serta ditransfer dan disebarluaskan. Proses kreatif, kemampuan transfer dan penyebarluasan, penyerapan dan pemilikan serta proses inovatif memerlukan informasi eksistensi, posisi, dan peran dari ilmu masing-masing secara monodisiplin dan multidisiplin.



## 1. Model Empat Tahapan Inovasi

Model empat tahap inovasi dikembangkan NEA (2007) yang menyatakan bahwa kegiatan inovasi sebagai semua tahapan ilmiah, teknologis, organisasi, finansial, dan komersialitas yang secara aktual atau diharapkan untuk, mengarahkan pada implementasi inovasi. NEA (2007), memberikan gambaran proses inovasi sebagai mana dalam gambar di bawah. Menurutnya, aktivitas inovasi mencakup:

- a. *Research and development.* Penelitian dasar dan pengembangan konseptual, tahapan dimana idea-idea inovatif dan konsep-konsep dihasilkan.
- b. *Demonstration.* Tahapan ini terdiri dari suatu bangunan atau beragam sistem target dari peningkatan skala untuk mencapai visiabilitas teknologi secara komersial dan teknis. Ini merupakan suatu titik tolak “inovasi”, yang kemudian mengarah pada transisi bagi inovasi.
- c. *Early deployment.* Tahap ini melibatkan penskalaan kapasitas-kapasitas manufaktur dan pembelajaran untuk mereduksi biaya (manufakturing, sistem instalasi, dan operasi dan pemeliharaan) untuk menjadi kompetitif dengan teknologi konvensional. Istilah “early deployment buy-down” merujuk pada proses pembayaran untuk perbedaan antara biaya teknologi inovatif dan biaya dari para kompetitornya. Ini merupakan titik tolak dimana suatu kasus usaha dapat divalidasi dan mungkin memulai untuk menarik modal yang cukup untuk mengembangkan produk awal dan pemasaran.
- d. *Widespread dissemination.* Pengembangan skala luas produk, para investor menginginkan untuk melihat awal pengembalian dari investasinya.

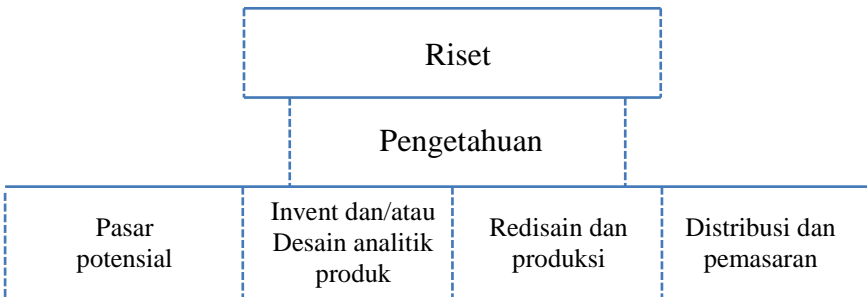


Gambar Tahap simpel inovasi (NEA, 2007)

2. Model Inovasi Rantai Jaringan (*The Chain-link Model of Innovation*)

Model inovasi rantai jaringan ini dikembangkan oleh Kline dan Rosenberg (1986, dalam OEDC, 2009). Model ini selain mengutamakan adanya proses penemuan yang mendahului inovasi, adalah proses ini pun membentuk pemecahan masalah yang terkait pada setiap tahapan inovasi. Model ini menekankan pada interaksi antara kesempatan pasar dan dasar/kepemilikan pengetahuan dan kapabilitas-kapabilitas perusahaan atau organisasi. Outcome dari setiap fungsi yang luar/besar adalah tidak pasti, dan sepanjang proses inovasi ini perlu untuk kembali ke langkah-langkah awal. Pemeliharaan link yang efektif antara tahapan-tahapan ini adalah krusial untuk berhasilan proyek inovasi.

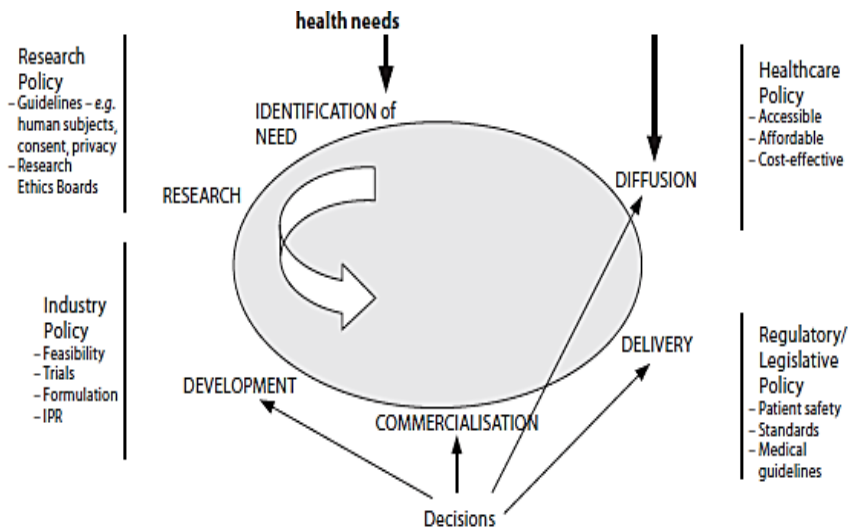
Berikut ini digambar bagaimana model rantai jaringan dikembangkan:



Gambar *the chain-link model of innovation* (OECD, 2009).

### 3. Model Siklus Inovasi Kesehatan (*The Health Innovation Cycle*)

Model yang lebih kompleks dikembangkan oleh OECD (2007) yang disebut sebagai model *The health innovation cycle* (OECD, 2009), dimana model ini dikembangkan dalam dunia kesehatan. Model ini menggambarkan bahwa proses inovasi bukan suatu hal yang sederhana, namun melibatkan berbagai hal yang terkait baik aktor maupun institusi. Model ini pun menekankan pada kerja sama antara mereka dalam proses inovasi. Model ini memberikan gambaran bahwa proses inovasi mencakup tahapan yang terdiri dari: identifikasi kebutuhan dan kesempatan, penelitian, pengembangan, ujicoba teratur, komersialisasi, difusi, dan imbas (*uptake*). Dalam hal ini, inovasi dipandang sebagai proses interaktif, dinamis, nonlinear; dan mencakup proses ketidakpastian dan resiko yang ada didalamnya. Proses yang secara berkelanjutan dikuatkan dan diperbarui kembali oleh pandangan (*loops*) umpan balik.



Gambar Siklus Inovasi Kesehatan (OECD, 2009)

#### **D. Aspek-Aspek Inovasi Pendidikan Nonformal**

Uraian di bab-bab depan telah menjelaskan berbagai hal tentang pendidikan nonformal dalam konteks perspektif historis, konsep dan teori, serta metodologi dan teknik pembelajaran atau dalam konteks institusi, organisasi, manajemen, program pendidikan dan proses pembelajaran. Juga penjelasan tentang inovasi dalam konteks perkembangan pengetahuan. Bab ini melengkapi uraian pada bab-bab sebelumnya itu, menguraikan tentang beberapa aspek dalam kaitan dengan inovasi di bidang pendidikan nonformal yang secara khusus merupakan kewajiban mahasiswa program studi S2 (magister) untuk dapat mengembangkan program pendidikan nonformal secara inovatif-teruji dalam bentuk tugas akhir tesis. Tentu secara lebih luas, informasi dalam buku ini dapat menjadi pegangan para pelaku dan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan PNF sebagai bagian dari pendidikan yang holistik dan pembelajaran sepanjang hayat.

Dari sisi struktur dan postur, PNF dapat dikembangkan di aspek kelembagaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengembangan program, dan di hilir pada pengembangan aktivitas pembelajaran. Dilengkapi pengembangan aspek-aspek itu dengan memutakhirkan pandangan-pandangan filosofi, konsep dan teori, metodologi, dan teknis edukatif atau teknis pembelajaran. Mengikuti pemikiran dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, PNF hendaknya dikembangkan juga dalam hal pemenuhan mutu sesuai standar yang terus meningkat pada aspek kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajara, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta evaluasinya yang tentu berbeda dengan substansi dan praktek dalam pendidikan formal.

PNF perlu memiliki lembaga dan/atau organisasi yang ramping namun lincah dalam bekerja, selalu tanggap atas fenomena perubahan yang cepat, model pengelolaan atau manajemen yang

berbasis kebutuhan masyarakat lokal, yang tidak perlu model pengelolaan yang berorientasi terlampau mengejar keuntungan finansial, program-program yang memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan pendekatan yang memerdekakan dan menyadarkan (Freire, Ki Hadjar Dewantoro, Amartya Sen, dan Romo Mangun) dilihat dari sisi filosofi pendidikan yang memunculkan paradigma pendidikan kritis (*critical education*). Secara konsep dan teori, PNF perlu mengacu pada pandangan-pandangan baru seperti konsep pendidikan orang dewasa (Engesbak, Tonseth, Fragoso & Villegas, 2010) pendidikan berkelanjutan, pembelajaran sepanjang hayat (Roxana Ng dan Hongxia Shan, 2010; Jin-Hee Kim, 2010) dan sejenisnya dalam konteks PNF untuk globalisasi, masyarakat pengetahuan dan informasi, serta masyarakat belajar (Yoyon Suryono, 2008).

Sejalan dengan itu, pengembangan pendidikan nonformal harus menyentuh aspek pengayaan program-program PNF yang memiliki banyak orientasi; tidak sebatas memenuhi pendidikan dasar lewat jalur pendidikan nonformal, tetapi lebih daripada itu pascaliterasi dan kebutuhan pendidikan nonformal lain untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spriritual masyarakat; pengembangan dan aktualisasi-diri, serta kesadaran lingkungan, perubahan iklim dan lingkungan serta di atas itu semua adalah pendidikan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan derajat manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai berbagai kelebihan untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan nonformal hendaknya mampu memfasilitasi kebutuhan pengetahuan tentang hidup dan untuk kehidupan manusia.

Khusus dalam inovasi pembelajaran, penekanan pada penerapan model-model terkini pembelajaran perlu juga untuk dilakukan seperti mengembangkan *problem posing education*, *self-directed learning*, *self-determained learning*, *self-actualization*,

*action knowledge, experiential learning, contextual learning*, dan sejenisnya untuk memperkaya khasanah pembelajaran pendidikan nonformal yang lebih memposisikan sesama manusia agar dapat saling membelajarkan, meski dalam aliran yang berbeda-beda: konstruktivisme, kontekstualisme, maupun reflektivisme (Yoyon Suryono, 2008; Sodiq A.Kuntoro, 2008).

Dari sisi teknis-empirik, pengembangan PNF perlu merespons hasil temuan studi kasus yang dilaksanakan di kawasan Asis Fasifik beberapa tahun yang lalu berupa rumusan sebagai berikut: memperluas definisi dan cakupan PNF, meningkatkan dukungan masyarakat, program yang sejalan dengan kebutuhan lokal, dukungan pemerintah berkelanjutan, keterkaitan program literasi dengan aktivitas ekonomi, pendidikan dasar yang berperan dalam mengatasi kemiskinan, serta membangun program PNF yang didukung secara multisektor (UNESCO, 2002).

Dimensi teknis-metodologis perlu dipahami dan ditingkatkan kemampuan untuk menggunakannya agar inovasi pendidikan nonformal berjalan baik, selain pemahaman tentang aspek-aspek filosofis, konsep dan teori, kelembagaan, organisasi, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas pembelajaran juga alat yang digunakan dalam melaksanakan inovasi tersedia dan terasah untuk siap dipergunakan. Dalam hal ini penguasaan dimensi metodologi menjadi penting baik dalam bentuk penelitian tindakan ataupun penelitian dan pengembangan yang dilandasi oleh butir-butir prinsip dalam melakukan sesuatu yang sifatnya inovatif, apalagi inovatif-teruji.

### **E. Hambatan dan tantangan inovasi pendidikan nonformal**

Inovasi pendidikan nonformal dengan sendirinya akan menghadapi hambatan dan tantangan struktural, kultural, finansial, individual, sosial-etikal, dan bisa jadi juga timbulnya perbedaan pendapat sampai konflik sosial atau penentangan masyarakat yang

kesemuanya tentu berpulang pada ada tidaknya nilai positif, manfaat ekonomi dan sosial dari inovasi pendidikan nonformal yang dilakukan itu.

Seperti di atas disampaikan bahwa inovasi pendidikan nonformal harus memperoleh dukungan kekuasaan secara struktural dari tingkat tertinggi sampai terendah; mampu memelihara dan mengembangkan sisi budaya di tingkat lokal, regional, nasional, dan bisa jadi global atas dasar nilai manfaat secara sosial-budaya; memperoleh dukungan finansial yang tidak berorientasi keuntungan finansial semata; mengandung niatan membangun manusia secara individu dan sosial dalam dimensi keetika-sosialan masyarakatnya; dilandasi oleh kemitmen bersama semua pemangku kepentingan, terhindar dan tidak memicu konflik sosial apalagi memunculkan penentangan masyarakat; dan oleh karena ini inovasi pendidikan nonformal itu harus memberi manfaat secara ekonomi dan sosial; mengurangi eksploitasi kekayaan yang sudah sangat lama dilakukan dengan buah yang dihasilkan berupa kerusakan alam dan bencana terjadi di mana-mana: banjir bandang, tanah longsor, sampai fenomena kabut asap yang setiap tahun selalu berulang, ibaran penyakit akut dan kronis.





# BAB 5

## PENDEKATAN INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab V ini berusaha mendeskripsikan mengenai pendekatan struktural dan pendekatan kultural yang dapat digunakan dalam melaksanakan penerapan inovasi pendidikan nonformal. Dua pendekatan diperkenalkan dalam tulisan ini yang mana dalam penggunaannya tidak memandang salah satu pendekatan merupakan pendekatan yang paling terbaik, namun perlu pemahaman bahwa keduanya memiliki sifat efektif.

## A. Pendekatan Struktural

Inovasi pendidikan nonformal yang dipahami sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Untuk ini, pendekatan struktural dapat digunakan dalam rangka penerapan inovasi pendidikan. Pendekatan struktural (*structural approach*) dimakni sebagai proses penyampaian inovasi kepada kelompok sasaran agar mereka dapat menggunakan atau menginternalisasi inovasi. Pendekatan ini menekankan pada struktur organisasi atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan inovasi pendidikan nonformal.

Pendekatan struktural menekankan pada adanya struktural organisasi yang dibangun untuk memfasilitasi inovasi agar menyebarluas ke kelompok sasaran. Pendekatan ini lebih mengutamakan pada pelaksanaan kegiatan inovasi dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, proses inovasi direncanakan, dikelola, dan dievaluasi oleh pihak lain yang mana mereka memiliki kewenangan lebih baik atas kepemilikan sumber daya atau kewenangan pengambil keputusan. Salah satu hal yang paling penting adalah pengguna kekuatan "*power*" dari pengembang pendidikan nonformal untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran. *Power* digunakan untuk dua tujuan yaitu sebagai alat untuk mengarahkan keputusan agar diterima atau didukung oleh para pengikut dan sebagai alat untuk memasukan pengaruh kepada orang lain agar bertindak sesuai dengan harapan individ atau kelompok (Korten,1996).

Pendekatan struktural dilakukan dengan melakukan tindakan yang mencakup: pertama, terlebih dahulu mempertimbangkan inovasi pendidikan nonformal yang akan dilakukan. Dalam hal ini, inovasi apa yang tepat bagi kelompok sasaran harus terlebih dahulu ditentukan terutama dalam pertimbangan bahwa inovasi pendidikan memiliki manfaat dan dapat dilaksanakan; kedua, perumusan rencana rencana atau mekanisme penerapan pendekatan ini yang mana berimplikasi pada ketersediaan sumber daya baik pendanaan,

manusia, maupun fasilitas. Semua ini perlu dipikirkan bagaimana alokasi penggunaan, sistem penentuan, dan sistem *deliverinya*. Dalam tahap ini pun, perubahan struktur organisasi pendidikan beserta tugas fungsinya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penerapan inovasi pendidikan. Ketiga, selanjutnya dilakukan kegiatan penerapan pendekatan ini kepada kelompok sasaran sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pendekatan ini. Dalam tahapan ini dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara rencana penerapan inovasi dengan implementasinya disertai dengan muncul ketidakharmonisan atau konflik dari pihak yang terlibat. Terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan inovasi pendidikan yang dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kelompok sasaran sesuai dengan tujuan inovasi.

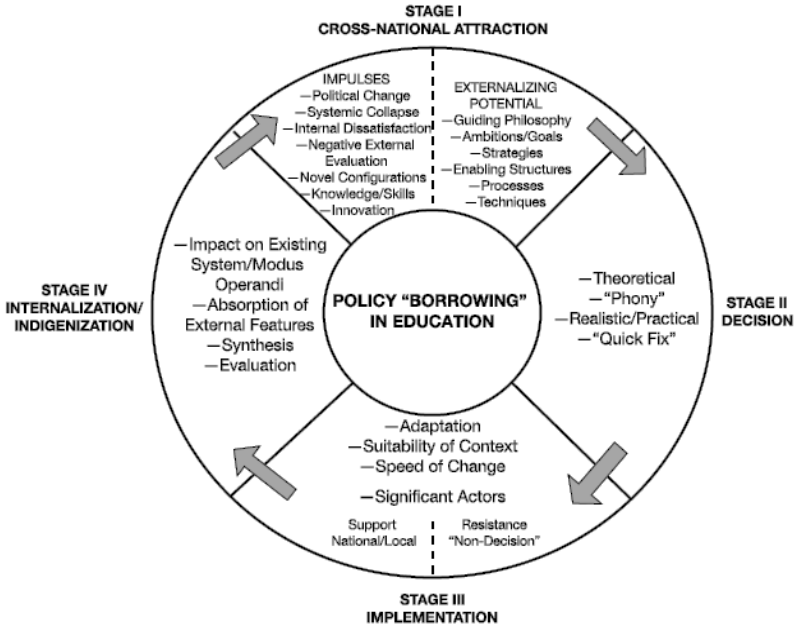
Sebagai contoh penerapan pendekatan ini adalah pada suatu lembaga pemerintah yang mana salah satu bidang dalam lembaga tersebut menyelenggarakan suatu program inovatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan dalam produksi pembibitan ternak sapi. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh keadaan yang menunjukkan bahwa bibit sapi masih sangat terbatas diproduksi dan dari segi kualitas pun sangat kurang. Melihat ini, seorang pimpinan berani mengembangkan program *pengapkiran* bibit sapi. Akhirnya, program ini dapat menyakinkan pimpinan dimana pimpinan bersedia menyediakan berbagai fasilitas untuk menyukseskan program dimaksud. Pimpinan memberikan sumber daya berupa anggaran pendanaan yang memadai, disertai dengan kebijakan tertulis atas program yang dikembangkan. Pada perkembangannya, inovasi yang dilakukan ini mendapat dukungan dari semua pihak terutama para pegawai lembaga pemerintah ini, dan para pihak yang langsung menggunakan bibit. Akhirnya, apa yang diharapkan walau belum sebesar yang diinginkan.

Salah satu model penerapan pendekatan ini adalah model pendekatan struktural yang telah banyak dilakukan di dunia

pendidikan menganut pada pemikiran bahwa sistem pendidikan yang ada dalam suatu masyarakat dapat dikembangkan dengan terlebih dahulu mencontoh atau menelaah sistem pendidikan yang telah atau sedang dikembangkan di masyarakat lain. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan dapat mengarah pada model yang sudah ada sebagaimana dikenal dengan istilah "***borrowing***". Kata "***borrowing***" dapat mengarah pada (1) aplikasi atau replikasi dari sumber diimpor (*parent*) kepada domain fokal (penerima), dimana perubahan yang besar terjadi atau tidak, (2) pengembangan teori (konsep) dari domain lokal berdasarkan pada idea-idea yang diperoleh dari sumber import (*parent*), dan (3) transformasi ide atau konsep dalam domain *parent* yang didasarkan pada apa yang dipelajari dari pengembangannya kedalam domain fokal (penerima) (Fyold, 2009). Definisi yang terakhir menunjukkan bahwa konsep yang dipinjam pun akan mempengaruhi kehidupan dari pihak yang dipandang sebagai *parent* (pemberi).

Pemikiran penting meminjam konsep pendidikan didasarkan pada dua alasan yaitu terdapat pandangan bahwa dunia atau organisasi pendidikan terjadi dan terbentuk dalam lingkungan yang lebih luas dan adanya harapan bahwa dengan penerapan konsep baru yang berasal dari pihak luar dapat meningkatkan kinerja dari organisasi atau pendidikan.

David dalam Khamsi (2004) memandang bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat mencontoh dari *best practice* penyelenggaraan pendidikan yang ada di masyarakat lain melalui tahapan: 1) melihat apa yang ada atau terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di masyarakat lain, 2) menentukan pilihan untuk memutuskan, 3) mengimplementasikan apa yang dipandang baik sebagai hasil dari penentuan untuk meminjam, dan 4) melakukan internalisasi dari apa yang diterapkan sebagai hasil dari peminjaman. Keempat tahap ini dapat dilihat dari bagan di bawah.



Gambar Kebijakan *Borrowing* dalam Pendidikan

Apa yang dipinjam atau *diimport* sebagai suatu inovasi pendidikan dapat dikelompokkan dalam suatu filosofi atau ideologi pendidikan, tujuan pendidikan, strategi pendidikan, struktur kelembagaan pendidikan, proses dan teknik pendidikan, dimana semua ini dapat berhubungan. Dalam mengimpor hal-hal ini, sudah tentu dibutuhkan pertimbangan mengenai ketepatan antar apa yang akan diimpor dengan apa yang ada. Kondisi yang perlu dipertimbangkan dimaksud yaitu;

- a. Lingkungan dalam wilayah atau lembaga “home” yang menciptakan kebutuhan untuk menentukan pengalaman di tempat lain yang memungkinkan dipinjam, yaitu prekondisi bagi atraksi (*best practice*)

- b. Karakteristik dari *inquiry* yang menandakan ciri-ciri dimaksud dalam suatu negara “target” yang mungkin dapat menginformasikan kebijakan di wilayah “home” (asal).
- c. Konteks di dalam negara/masyarakat “target” yang telah menciptakan ciri-ciri dimaksud mengenai sistem pendidikan yang menarik perhatian
- d. Kompatibilitas konteks negara/masyarakat “target” dan “home”
- e. Sumber daya yang denganya aspek eksternal dari penyediaan pendidikan dapat diinternalisasikan
- f. Efikasi dari aspek yang diinternalisasikan

Pandangan mengungkapkan bahwa apa yang dipinjam dari suatu negara, masyarakat, atau organisasi dapat diarahkan pada dua hal yaitu: berdimensi horizontal dan vertikal (Wetten, Felin & King, 2009). Pemikiran peminjaman horizontal mengandung pengertian bahwa proses menggunakan konsep yang dirumuskan dalam konteks sosial yang berbeda “*involves the use of concepts that were formulated in a different social context*”. Sedangkan peminjaman vertikal memandang bahwa peminjaman terjadi melibatkan penggunaan konsep yang dirumuskan dalam konteks sosial yang tunggal. Peminjaman vertikal menggunakan konsep-konsep yang dirumuskan pada level yang berbeda.

Pendekatan struktural memiliki beberapa kekuatan. Pertama, pendekatan ini lebih cocok diterapkan dalam suatu sistem masyarakat yang terbuka terhadap penerimaan suatu pembaharuan. Keterbukaan masyarakat akan memudahkan penerapan pendekatan sehingga kemampuan dan kualitas kelompok sasaran dimana mereka akan mudah memahami apa yang direncanakan dalam penerapan suatu inovasi pendidikan. Kedua, akan terjadi keseragaman dalam pelaksanaan penerapan inovasi pendidikan dimana ukuran keberhasilan yang dicapai

menandakan suatu capaian yang tidak berbeda-beda dan implikasinya hasil yang dihasilkan dapat diterima secara lebih luas. Hasil inovasi kemungkinan dapat diwujudkan dalam bentuk yang homogen. Ketiga, dampak yang lebih besar dimungkinkan terjadi apabila hasil penerapan inovasi dapat dilakukan secara massif. Selain kekuatan, pendekatan ini pun memiliki kelemahan yaitu: pertama, penerapan pendekatan ini membutuhkan sumber daya yang cukup banyak, kedua, pelaksanaan penerapan ini dapat terhambat karena kurang dukungan kelompok sasaran dari inovasi pendidikan nonformal, ketiga, pendekatan ini lebih mengutamakan pendekatan mekanistik yang pada akhirnya memosisikan manusia bukan sebagai individu yang memiliki kebebasan dan harapan-harapan, dan keempat karena sifatnya yang massif, kegagalan penerapan inovasi pendidikan nonformal akan mengakibatkan kerugian yang besar yang mana menunjukkan suatu ketidakrelevanan dalam mencapai tujuan pendidikan nonformal.

## **B. Pendekatan Kultural**

Pendekatan kultural adalah pendekatan lain yang digunakan dalam rangka menyebarluaskan inovasi PNF. Pendekatan ini dapat dimaknai bagai transfer dan transformasi kebaruan kepada kelompok sasaran dengan mengutamakan keterlibatan mereka. Pendekatan ini memandang bahwa proses penerapan inovasi pendidikan sekaligus pemerolehan sesuatu yang inovatif dilakukan berdasarkan pada budaya (kultur) kelompok sasaran. Pada pokoknya, pendekatan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi budaya dari kelompok sasaran baik yang bersifat material maupun non material. Kebudayaan sendiri dapat dimaknai sebagai apa yang dimiliki oleh suatu masyarakat baik berupa nilai-nilai dan keyakinan, perilaku yang sudah disepakati dan menjadi milik bersama, dan berbagai bentuk hasil produk fisik. Kebudayaan yang

dimiliki suatu masyarakat akan membentuk kepribadian seorang individu, sehingga individu akan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat sebagai makhluk sosial.

Pendekatan budaya berusaha memahami bahwa individu, organisasi atau masyarakat yang dipandang perlu melakukan perubahan adalah entitas yang memiliki harapan, keinginan, kemampuan, dan keterbatasan yang mana mereka memiliki daya untuk menentukan jalan hidupnya. Pandangan humanis sangat kuat dalam proses penerapan inovasi ini. Sebagaimana pemikiran Geertz (1973) bahwa untuk memahami masyarakat dapat ditinjau dari perpektif yang luas, yang menekankan bahwa *the individual has a right to choose whether or not they will be included in a certain group--including the work group. This right to choose comes from their own ways of knowing about the world.* Pendekatan ini pun menekankan pada proses pengembangan inovasi harus dapat dilakukan dengan membangun kesadaran dan pemahaman bersama melalui proses interaksi yang humanis dan dialogis, dan tidak mendasarkan pada menggunakan pendekatan berbasis mekanisme, aturan formal maupun petunjuk teknis. Dalam hal ini, tiada pandangan bahwa suatu pemikiran merupakan pemahaman yang dominan dari individu atau kelompok. Hal lain adalah nilai bersama baik nilai instrumental maupun nilai *ending* (ideal) harus dibangun atas kesadaran bersama yang mengarahkan pada perilaku organisasi dalam mencapai tujuan.

Pemikiran yang hampir sama dikemukakan oleh Freire (1972) yang memberikan gambaran bahwa upaya untuk memajukan masyarakat harus dimulai dengan penyadaran "*concizatiou*". Menurutnya, segala pembaharuan atau inovasi pendidikan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membangun kesadaran masyarakat atau kelompok sasaran atas dunianya. Kata dunia dimaknai sebagai sesuatu yang ada di sekitar kelompok



sasaran yang dapat berpotensi sebagai kekayaan atau sebaliknya sebagai sesuatu yang dipandang menghambat. Dunia pun dimakna sebagai pandangan kelompok sasaran atas apa yang terjadi dalam kehidupannya, harapan-harapannya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana memperoleh suatu solusi untuk mengembangkan dirinya. Dunia pun dimaknai sebagai proses sosial yang mereka jalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik dalam lingkungan sosial maupun dengan lingkungan alam semesta. Lebih jauh, Freire menekankan bahwa kelompok sasaran harus menyadari akan dunia yang selama ini mengekangnya sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan potensinya. Oleh karenanya, perlu dikembangkan kesadaran kritis dari masyarakat akan dunia melalui pembelajaran yang berorientasi pada kehidupannya yaitu pembelajaran berbasis masalah (*problem solving based learning*).

Penerapan inovasi pendidikan nonformal yang telah direncanakan dengan menggunakan pendekatan ini tidak mensyaratkan suatu mekanisme yang kaku, namun lebih fleksibel sesuai dengan kondisi kelompok sasaran. Pendekatan ini dilakukan dengan tahapan: *pertama*, pembaharu sebagaimana individu yang ditugaskan untuk mengembangkan pendidikan nonformal atau memberikan pemahaman yang berguna bagi kelompok sasaran terlebih dahulu memiliki keinginan dan kesadaran untuk dapat melaksanakan suatu pembaharuan. Pembaharu harus memiliki pemahaman yang baik mengenai substansi inovasi yang akan disebarkan, mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikannya, dan sekaligus memahami karakteristik kelompok sasaran yang akan dikembangkan baik mereka yang ada di organisasinya maupun yang ada di luar organisasinya.

*Kedua*, pembaharu melakukan hubungan dan komunikasi secara humanis dengan kelompok sasaran. Dalam hal ini, pembaharu masuk ke lingkungan kehidupan kelompok sasaran dengan tidak membawa pemikiran bahwa dirinya sebagai seorang

yang memiliki kemampuan tertentu, dan tetap memiliki keyakinan bahwa kelompok sasaran adalah mereka yang memiliki kemampuan yang harus dihargai. Pembaharu melakukan interaksi yang didasarkan pada kesederajatan, terbuka, dan selalu menjunjung harkat dan martabat mereka. Melalui proses ini, pembauran gagasan atau konsep yang dimaksudkan untuk terinternalisasi oleh kelompok sasaran akan dengan mudah diterima tanpa menimbulkan gejolak penolakan yang mungkin kuat terjadi. Pada tahap ini pun, gagasan pembaharuan diperkenalkan secara baik dan tidak merubah tatatan sistem yang ada di dalam kehidupan.

Tidak menutup kemungkinan, dalam proses interaksi ini, inovasi apa yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran membutuhkan bukti atau hasil langsung yang dirasakan. Oleh karenanya, pembaharu harus dapat berfungsi sebagai figur yang dalam memberikan contoh atau pengalaman nyata kepada kelompok sasaran. Sebagai contoh, tanaman sorgum (sejenis tanaman padi/jagung) yang dikembangkan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari peranan seorang wanita yang berasal dari luar wilayah, yang mana dirinya memandang bahwa sorgum merupakan suatu tanaman yang baik dibudidayakan di kawasan dimaksud karena daya tahan akan kekeringan. Dirinya tergerak untuk mengembangkan masyarakat setempat yang dipandangnya sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus ketergantungan pada beras dan sayannya, tanaman pagi tidak dapat tumbuh setiap tahun di wilayah timur Indonesia. Ia, memberanikan diri untuk mengajak masyarakat sekitar agar menanam sorgum. Pada awalnya, apa yang dilakukannya tidak secara otomatis diikuti oleh warga masyarakat, namun dengan penerapan langsung yaitu membudidayakan sendiri sorgum dan hasilnya memuaskan akhirnya apa yang dilakukannya dicontoh dan ditiru oleh warga masyarakat. Sampai saat ini,

pemahaman mengenai budidaya tanaman ini dikembangkan dan terbukti mampu mensejahterakan warga masyarakat.

*Tahap selanjutnya*, pembaharuan yang telah ditularkan kepada kelompok sasaran akhirnya harus dapat diketahui apakah mampu memberikan suatu manfaat yang berhasil atau sebaliknya tidak memberikan suatu yang positif pada kemajuan kelompok sasaran. Sebagaimana dipahami bahwa titik tolak kebermaknaan dari pendekatan ini adalah terbangunnya kesamaan nilai, persepsi, dan tindakan, maka dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan inovasi pendidikan harus dilakukan dengan tetap perpedoman pada pemahaman bahwa keberhasilan pembaharuan ada pada persepsi kelompok sasaran. Oleh karena, penanyakan pendapat mereka mengenai aktivitas penerapan inovasi pendidikan dengan mekanisme saling berbagi pengetahuan, pendapat dan pengalaman dapat dilakukan. Dalam hal ini, kelompok sasaran dan pembaharu harus membangun kesempatan untuk melakukan refleksi bersama.

Pemikiran lain menjelaskan bahwa penerapan pendekatan kultur dalam suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan pembaharu (biasanya pemimpin organisasi) yang ada di dalamnya. Kotter (1997) memberikan gambaran mengenai mekanisme pembaharuan dilakukan dalam suatu organisasi yaitu:

- a) menetapkan makna urgensi
- b) membentuk koalisi pengarah,
- c) mengembangkan visi dan strategi,
- d) mengkomunikasikan visi perubahan,
- e) memberdayakan banyak orang untuk melakukan tindakan,
- f) menghasilkan keuntungan jangka pendek,
- g) mengkonsolidasikan pencapaian-pencapaian dan menghasilkan lebih banyak perubahan, dan
- h) mencanangkan pendekatan-pendekatan baru ke dalam kultur.

Hal lain adalah seorang pembaharu harus dapat berfungsi sebagai penggerak hati kelompok sasaran untuk melakukan perubahan dengan cara:

- a) menetapkan standar-standar yang jelas,
- b) membangun harapan agar melakukan sesuatu yang terbaik,
- c) memberikan perhatian,
- d) memberikan pengakuan,
- e) menceritakan sesuatu yang berguna atau berhasil,
- f) membuat perayaan bersama-sama atas keberhasilan, dan
- g) memberikan sebuah contoh

(Kouzes & Posner, 2008)

Syarat penerapan pendekatan ini adalah antara pembaharu dan kelompok sasaran harus terbangun suatu keterbukaan dalam komunikasi dan interaksi sehingga diperoleh pemahaman yang sama, terjadi klarifikasi nilai yang belum dipahami bersama sehingga standar nilai menjadi satu atau tunggal, terbangun suatu kesepakatan (*aggreement*) bersama, dan adanya peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penerapan inovasi pendidikan nonformal.

Pendekatan kultural memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah menekankan pada keterlibatan penuh kelompok sasaran. Kelompok sasaran dipandang sebagai entitas yang dapat menentukan dirinya melalui keterlibatan penuh dalam penerapan inovasi pendidikan sehingga terhindari dari perlakuan yang tidak humanistik dan cenderung mekanistik. Kelompok sasaran dipandang sebagai individu atau kelompok masyarakat yang dapat memahami kebutuhan dirinya, memahami masalah yang dihadapi, dan mengetahui bagaimana mencari solusi serta dapat melaksanakan tindakan untuk mengatasi masalahnya. Dalam hal ini, ada keyakinan bahwa kelompok sasaran adalah subyek aktif yang memiliki keinginan

berkembang, dan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sehingga pengembang masyarakat akan memosisikan mereka sebagai mitra dalam mencapai tujuan kehidupannya. Hasil penerapan inovasi dipandang cukup bermakna karena ukuran keberhasilan dirasakan atas apa yang terjadi sebagai suatu dampak dari penerapan konsep inovasi yang disetujui dan didukung oleh para pihak yang terlibat.

Keuntungan lain adalah kegagalan dalam penerapan inovasi sedini mungkin dapat dipahami karena adanya keterlibatan bersama serta tanggung jawab atas kegagalan menjadi milik bersama. Kelompok sasaran akan memiliki pandangan positif terhadap kegiatan inovasi pendidikan nonformal dimana mereka dapat memiliki persepsi dan harapan-harapan yang baik guna mengembangkan diri dan lingkungannya. Akibat persepsi yang baik ini, tidak menutup kemungkinan mereka akan dengan suka rela mendukung dan terlibat langsung dalam proses pengembangan. Hasil akhirnya adalah terjadi kebersamaan dan komitmen yang kuat terhadap tindakan pengembangan.

Kelamahan dari pendekatan ini adalah pertama, memerlukan waktu yang lebih lama mengingat perubahan kultur pada dasarnya merubah pola perilaku dan keyakinan yang mungkin perubahan pada hal-hal ini tidak dengan mudah terjadi dan dalam waktu yang singkat. Budaya yang sudah mendarahdaging dalam perilaku kelompok sasaran tidak dengan sendiri akan memudar atau melemah sehingga hal ini dapat menghambat terjadinya proses perubahan. Kedua, tidak adanya prinsip umum yang berlaku pada semua kelompok sasaran sehingga sifat generalitas dari inovasi ini masih lemah karena penerapan dengan pendekatan ini lebih menekankan pada karakteristik yang khusus kelompok sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran aktivitas pembaharuan tidak akan terjadi secara massal dan dalam waktu yang cepat, namun terjadi secara perlahan dengan mekanisme

suatu pembaharuan akan digunakan oleh kelompok sasaran lain yang memiliki kepentingan dan/atau karakteristik yang tidak jauh berbeda. Ketiga, kemungkinan terjadi konflik kepentingan dengan kelompok sasaran dapat terjadi. Konflik dapat terjadi dalam setiap kegiatan pengembangan disebabkan perbedaan persepsi, kekhawatiran terjadi peralihan yang tidak pasti, dan bahkan ada perasaan merasa terganggu akan status sosial dari kelompok sasaran.

# BAB 6

## KASUS INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab VI berusaha membahas kasus dalam dunia pendidikan nonformal yang dipandang sebagai bentuk inovasi pendidikan yang telah dan sedang berjalan di Indonesia. Kasus dimaksud mengenai sebuah program pendidikan nonformal yaitu Program Pendidikan Desa Vokasi yang dikembangkan oleh pemerintah, dan sebagai inisiasi dari pemerintah dalam konteks mengembangkan warga masyarakat agar lebih produktif. Melalui pemahaman pada kasus-kasus dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna dengan melihat *best practice* inovasi dalam pendidikan nonformal.

## **A. Pengertian dan Tujuan**

Berbagai program pendidikan nonformal banyak dikembangkan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Salah satu program pendidikan nonformal yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghasilkan sebuah program pendidikan yang dipandang baru yaitu program Pendidikan Desa Vokasi yang mana program ini menekankan pada keterlibatan semua aktor yang ada di suatu masyarakat lokal. Program ini yang menjadi pilot projek yang mana implementasinya sudah diterapkan oleh penyelenggaraan pendidikan nonformal. Projek rintisan yang berhasil adalah yang dikembangkan di di wilayah desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

Program pendidikan Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan kawasan yaitu kawasan perdesaan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program pendidikan ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi dan terbentuk kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang terdapat di wilayahnya sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat (Ditbinsuslat, 2013:2).

## **B. Tujuan Program**

Program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Gemawang. Masalah yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat Desa Gemawang adalah berupa tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan pemanfaatan



potensi lokal yang belum optimal oleh masyarakat. Program pendidikan ini, bersama-sama dengan Desa Vokasi Getasan, Kecamatan Getasan, merupakan inisiatif awal atau pionir kegiatan pengembangan pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup dan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional 2 Ungaran, Kabupaten Semarang sebagai salah satu satuan penyelenggara pendidikan nonformal yang memiliki fungsi pengembangan pendidikan nonformal.

### **C. Penyelenggaraan Program pendidikan**

Penyelenggaraan Program Desa Vokasi diawali dengan proses pengidentifikasian kebutuhan pendidikan, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses identifikasi ini dilakukan oleh tim P2PNFI yang berkoordinasi, bekerjasama, dan berdiskusi atau berdialog dengan para wakil pemuda dan tokoh masyarakat Desa Gemawang, Kecamatan Jambu yang mana mereka dipandang memahami karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Melalui diskusi, dihasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat terutama wakil masyarakat dan tim pengembang P2PNFI mengenai program pendidikan yang akan dilakukan. Kegiatan *rembugan* ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan atau kebutuhan pendidikan agar program pendidikan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat Gemawang dan menghindari ketidakcocokkan yang dapat berakibat warga masyarakat tidak merasa membutuhkan kegiatan pendidikan atau latihan.

Secara lebih detail, program Desa Gemawang ini dilakukan melalui enam tahap mencakup: identifikasi calon desa sasaran, sosialisasi, perekrutan pengelola, perencanaan program pendidikan dan latihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan evaluasi pendidikan dan latihan.

## **1) Identifikasi Calon Desa Sasaran**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan calon desa sasaran. Informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah kondisi demografis, kondisi geografis, karakteristik warga masyarakat, karakteristik calon kelompok sasaran, infrastruktur seperti sarana-prasarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, transportasi, lembaga lokal, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, fasilitas teknologi, sumber daya manusia meliputi tokoh masyarakat, perangkat desa, narasumber atau individu yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan tingkat kesehatan masyarakat, program-program pendidikan nonformal yang sudah ada, program lintas sektor yang pernah ada, dan ketersediaan akses pada pasar, modal, dan informasi.

Mendasarkan pada kegiatan identifikasi calon desa sasaran, maka ditentukan Desa Gemawang sebagai desa sasaran program pendidikan yang akan dilaksanakan. Pemilihan desa ini didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk miskin yang masih banyak di desa tersebut, memiliki embiro pusat atau unit ekonomi yang memiliki potensi jual tinggi, memiliki kegiatan pendidikan kecakapan hidup yang pernah dilakukan, memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai sarana pendidikan nonformal, dan terdapat kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan warga masyarakatnya.

## **2) Sosialisasi Desa Vokasi**

Tahap sosialisasi kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen dari pihak yang terlibat yaitu aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segenap warga masyarakat. Kegiatan sosialisasi mencakup pemberian informasi dan penyadaran seluruh pihak terkait dan warga masyarakat tentang urgensi dan makna, rasionalitas mengapa desa vokasi menjadi sesuatu yang

penting, pelaksanaan desa vokasi yang akan dilakukan dan manfaatnya yang dapat diperoleh. Adapun tujuan sosialisasi secara spesifik adalah: (a) memberikan pemahaman tentang desa vokasi, (b) menumbuhkan motivasi, inisiatif dan prakarsa, (c) menggaling simpati atau kepedulian masyarakat, (d) menggaling komitmen, serta (e) menggaling partisipasi. Sosialisasi pun dilakukan kepada para pihak terkait yang mana mereka diharapkan dapat bermitra untuk menyukseskan demi kepentingan masyarakat.

### **3) Perekrutan Pengelola**

Tahapan ini dilakukan untuk membentuk penyelenggara yang berasal dari warga Desa Gemawang sebagai desa sasaran. Pengelola yang berasal dari dalam desa sasaran merupakan individu yang dipandang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan. Sebagian besar mereka merupakan warga masyarakat yang masih dalam kategori usia produktif dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Penentuan pengelola lokal ini dilakukan secara partisipatif dalam kesempatan *rembug desa* yang melibatkan pihak P2PNFI sebagai pengembang Desa Vokasi, aparat desa setempat dan tokoh masyarakat. Kepengurusan pengelola lokal mencakup ketua pengelola, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator kegiatan, yang keberadaannya diketahui dan dilegalkan oleh keputusan kepala desa setempat.

### **4) Perencanaan Program Diklat**

Tahap perencanaan program diklat dilakukan setelah pengelola lokal terbentuk. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait. Penyelenggara memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan *rembug desa* yang melibatkan pihak pengembang, tokoh masyarakat, aparat desa, unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menetapkan program pendidikan kewirausahaan yang akan dilakukan sesuai potensi lokal yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan melalui dialog

interaktif yang dipandu penyelenggara, didampingi oleh tim pengembang, dengan langkah-langkah:

- a) setiap peserta diberi kesempatan untuk mengusulkan berbagai ide, gagasan, pemikiran, atau masukan tentang jenis kegiatan pendidikan kewirausahaan yang akan dilakukan
- b) penyelenggara mencatat atau menginventaris semua masukan
- c) penyelenggara bersama peserta menganalisis setiap masukan dengan segala kekuatan dan kelemahannya
- d) penyelenggara membuat skala prioritas program berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, penyelenggara merumuskan hasil dialog ke dalam program kerja yang memuat minimal: tujuan yang ingin dicapai, jenis kegiatan, target atau sasaran, pembiayaan, waktu, hasil yang diharapkan.

## **5) Pelaksanaan Diklat**

Tahap pelaksanaan kegiatan pendidikan ini dilakukan dalam dua aspek: pertama, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diorientasikan pada penguasaan keterampilan vokasional dan kemampuan manajemen usaha, dan kedua, pembentukan rintisan unit-unit usaha wirausaha. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dan lebih mengedepankan pada penguasaan keterampilan vokasional dengan fasilitator atau narasumber teknis yang sudah ditentukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan ini dimaksud diselenggarakan menggunakan sistem pembelajaran berkelompok sesuai dengan jenis pendidikan yang telah disepakati dalam *rembug desa*.

Terdapat sebanyak 11 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada Tabel dibawah. Sedangkan rintisan usaha diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha baik pendanaan maupun alat-alat produksi kepada para peserta yang tergabung dalam kelompok belajar sesuai dengan jenis wirausaha yang dipelajarinya.

Tabel Jenis Program Diklat Desa Vokasi Gemawang

Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Sumber Dana
Batik	20 orang	Dit. Binsuskel
Garmen	10 orang	Dit. Binsuskel
Pertanian (kelengkeng, tanaman obat, indigo dan strawbery)	20 orang	Labsite P2PNFI
Boga	20 orang	Labsite P2PNFI
Alat Permainan Edukatif	15 orang	PKBM Putra Mandiri
Jamur Tiram	20 orang	Bansos Dinas Pend. Provinsi
Pupuk organik (2 kelompok)	50 orang	SKB Ungaran & Dinas Pend. Provinsi
Perikanan	30 orang	Bansos Dinas Pend. Provinsi
Ternak lebah madu	20 orang	
Budi daya kopi	20 orang	
Kelinci	30 orang	PKBM Putra Mandiri
<b>Jumlah Peserta</b>	<b>255 orang</b>	

*Sumber:* Buku Laporan Desa Vokasi 2009

## 6) Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang telah dilaksanakan. Fokus penilaian adalah ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu: peningkatan pemahaman mengenai vokasi yang dipelajari oleh peserta dan kemampuan manajemen usaha. Hasil belajar mengenai jenis-jenis kegiatan vokasional yang dipelajari menunjukkan terdapat perubahan perilaku yang positif dari warga belajar dimana pada kedua aspek tersebut capaian (skor) telah menunjukkan skor di atas 70 dalam skala 100 (P2PNFI, 2009). Selain evaluasi pembelajaran dilakukan pasca pendidikan dan pelatihan vokasional, aktivitas tindaklanjut berupa

pendampingan dilakukan baik oleh pengurus maupun pihak P2PNFI sebagai inisiator. Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan koordinasi menyeluruh dalam suatu forum desa vokasi yang mana dihadiri oleh semua ketua atau perwakilan setiap kelompok wirausaha. Fungsi forum ini adalah menjadi alat untuk mengetahui kemajuan usaha para anggota, berbagi pengalaman antar warga sasaran, kesempatan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh kelompok dan tempat berkoordinasi apabila ada kegiatan yang melibatkan semua kelompok.

#### **D. Kendalah yang dihadapi**

Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok usaha yang dikembangkan dalam wadah Gemawang mengalami dinamika perubahan yang berbeda-beda. Tak semua kelompok berkembang sesuai yang direncanakan. Sampai saat ini, hanya berjalan tiga kegiatan wirausaha. Kegagalan atau tidak berjalannya kegiatan wirausaha kelompok sasaran dikarenakan beberapa faktor penyebab. *Pertama*, sulit merubah paradigma atau pemikiran dari kelompok sasaran. Merubah sikap mental kelompok sasaran untuk maju dengan cara tidak instan ternyata menjadi tidak mudah dilakukan karena mayoritas kelompok sasaran bekerja di bidang pertanian baik sawah maupun ladang yang mana memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan para pelaku usaha wirausaha. Hal ini bagi pengurus dipandang sebagai suatu menjadi tantangan penting untuk kesuksesan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan.

*Kedua*, terkait dengan paradigma, para warga belajar kurang atau bahkan tidak memiliki kefokusian dalam menjalankan usahanya. Hal ini ditandai dengan masalah yang dihadapi dalam kelompok APE dimana karena terdapat hambatan dalam penjualan produk, semua anggota kelompok memutuskan untuk kembali kepada pekerjaan awal misal sebagai buruh, petani, dan pekerja serabutan. *Ketiga*, proses pendampingan yang kurang optimal

karena keterbatasan sumber daya baik pendanaan dan sumber daya manusia dan perubahan kebijakan yang ada di lembaga P2PNFI. *Keempat*, penyebab lain adalah iklim yang mempengaruhi aktivitas berproduksi sebagaimana terjadi pada kelompok budidaya jamur yang mana karena iklim yang kurang mendukung mengakibatkan usaha budidaya jamur mengalami kegagalan.

### ***E. Dampak yang dihasilkan***

Program pendidikan ini dipandang sebagai kegiatan pendidikan yang penting oleh warga masyarakat. Mereka menilai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa kebutuhan mengenai pendidikan bagi masyarakat sekitar merupakan dasar kebutuhan yang keberadaannya harus menjadi prioritas. Apabila telah tercapai kebutuhan pendidikan tersebut, seterusnya dapat membentuk pola pikir masyarakat yang berkualitas, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain dalam kehidupan, termasuk perilaku produktifnya masyarakat dalam melakukan usaha di bidang ekonomi. Melalui ini pendidikan masuk dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan, mengawali proses pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

dipandang sebagai upaya mengatasi pengetahuan dan keterampilan yang minim dan dibutuhkan guna mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Berbagai potensi wirausaha yang terdapat di masyarakat sebelum program pendidikan masih belum optimal dimanfaatkan. Hal ini terindikasi dengan produktivitas hasil usaha yang diperoleh warga masyarakat yang masih minim sebagaimana terjadi pada kelompok tata boga yang mana sebelum dilaksanakan pendidikan kewirausahaan ini, para anggota mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan

untuk membeli peralatan produksi dan tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam menghasilkan produknya.

Program pendidikan desa vokasi yang telah diselenggarakan di desa Gemawang mampu memberikan manfaat positif terhadap warga masyarakat. Bagi kelompok sasaran manfaat yang diperoleh adalah terjadi peningkatan pendapatan bagi para anggota kelompok usaha produktif. Sut, ketua kelompok tata boga, menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh melalui kelompok wirausaha yaitu dengan didapat bantuan berupa modal untuk pendanaan usaha guna menjadikan usaha kelompok menjadi lebih maju. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kelompok mampu menjadi lebih maju:

*“Ya mendorong supaya kelompok lebih maju, ya bermanfaat. Kata orang harus menciptakan lapangan pekerjaan, biasanya orang mencari pekerjaan. Buktinya bapak menjadi pekerja saya terutama untuk menggoreng, tidak semua orang bisa menggoreng, dulu bapak jadi tukang batu. Ada 10 orang yang bantu bekerja di sini, mereka bekerja harian dan borong untuk tenaga mengupas” (Wawancara, 20/10/20143).*

Hal senada disampaikan Fz, pelaku wirausaha batik, bahwa usaha yang digelutinya mampu memberikan manfaat positif secara ekonomi terhadap kehidupan diri dan keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini para anggota atau karyawan yang bekerjasama dengannya sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehidupan keluarganya misal mampu membiayai sekolah anak-anak mereka dan keperluan pengeluaran konsumsi keluarga. Bahkan terdapat dua orang karyawan yang menjadi tulang punggung keluarga karena masing-masing suaminya menjadi korban pemutusan hubungan kerja, dan memiliki pekerjaan suami mereka sakarang adalah serabutan. Pelaku usaha batik ini pun mampu membina salah satu warga di Desa Gemawang



yang berpekerjaan sebagai penjahit yang sekarang sudah mampu mempekerjakan sebanyak 10 orang pemuda di lingkungan masyarakatnya. Menurutnya, penjahit yang dibina tersebut berawal dari ketidaksengajaan ketika melihat baju yang digunakan penjahit dimaksud merupakan pakaian batik yang didesain olehnya. Setelah ia mengetahui bahwa penjahit tersebut mendapatkan order jahitan dari penjahit lain, sebagai penjahit kedua, ia meminta penjahit tersebut untuk menerima jahitan kain batik langsung darinya. Namun, ia menekankan bahwa jahitan yang dikerjakan harus memiliki kualitas baik, sesuai pesanan, dan dikerjakan secara tepat waktu. Hal ini pun sesuai dengan pandangan penjahit dimaksud, Isrf, yang mana saat ini hampir 80 persen orderan jahitan yang diperolehnya merupakan jahitan dari pelaku usaha batik (Wawancara, 12/10/2015).

Perubahan pendapatan yang diharapkan pun terjadi pada pelaku usaha pembuatan APE yang memandang bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh P2PNFI mampu membekali dirinya dengan kemampuan berusaha dalam bidang produksi APE. Usaha yang digelutinya lebih memberikan penghasilan yang besar dibanding pekerjaan sebelumnya yaitu sebagai petani. Saat ini, ia mampu mengembangkan tempat usahanya, menambah peralatan usaha, dan produksi yang mana bukan hanya memproduksi APE namun memproduksi teralis, pagar, *canopy*, dll. Menurutnya, usahanya mampu menjadikan pendapatan keluarga meningkat dimana penghasilan rerata setiap bulan mencapai Rp 3 juta. Hal lain adalah dirinya mampu mempekerjakan sebanyak 4 orang warga masyarakat sekitar dengan upah rata-rata Rp 50.000 per hari yang dibayarkan setiap seminggu sekali. Penghasilan para pekerja tersebut dipandang lebih besar dibanding dengan penghasilan sebelum tergabung dalam usaha pembuatan alat permainan edukatif yang dimilikinya, dan relatif lebih tinggi dibanding dengan upah minim regional Kabupaten Semarang.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Zmf, sebagai anggota kelompok usaha produktif madu yang semula dirintis melalui , yang menyatakan bahwa pembentukan pra-koperasi idealnya dapat diwujudkan agar lebih memberikan kekuatan atau kemampuan berusaha bagi para anggota kelompok budidaya lebah. Pra-koperasi dapat menjadi suatu wahana yang berfungsi untuk penetapan keseragaman harga penjualan, memudahkan memperoleh bantuan dari pihak luar, dan memungkinkan menjadi sarana simpan-pinjam yang dapat menguntungkan para anggota kelompok. Namun disayangkan karena muncul ketidakharmonisan dalam kelompok menyebabkan kelompok tidak dapat berjalan sesuai harapan atau rencana, dan akibatnya para anggota tidak dapat mengembangkan usahanya, "...sekarang ini setiap anggota kelompok masih melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, adapun mereka saling membantu hanya pada waktu panen madu, mereka hanya membantu tenaga pengambilan madu..." (Wawancara, 24/10/2014).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada aspek ekonomi, Program Desa Vokasi yang telah dilaksanakan di Gemawang dipandang memiliki manfaat bagi kemajuan ekonomi warga masyarakat. Program Desa Vokasi menjadi upaya yang dapat membekali warga masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan berusaha guna melakukan usaha produktif. Telah terjadi perubahan kualitas kehidupan ekonomi kelompok sasaran, keluarga, dan warga masyarakatnya sebagai hasil dari pemanfaatan keterampilan fungsional yang dimilikinya. Walaupun demikian, keberhasilan pemanfaatan keterampilan fungsional tidak selalu sesuai harapan apabila sumber daya yang mendukung untuk pengembangannya tidak dapat terakses baik karena ketidakmampuan mencapainya, keberadaan akses dan mekanisme yang sulit, perilaku individu-individu yang negatif, atau hubungan antar individu yang tidak sehat.

Pada aspek sosial, keberadaan Program Desa Vokasi mampu membangun kehidupan sosial bermasyarakat yang kondusif dan memungkinkan terjadi perubahan status sosial kelompok sasaran ke arah yang lebih baik. Bagi para anggota kelompok tata boga, kelompok wirausaha mampu berfungsi sebagai wahana untuk saling membelajarkan dan membina hubungan positif dengan anggota yang lain. Hal ini nampak dari pengundian anggota yang menang arisan dilakukan dalam pertemuan rutin setiap bulan. Pertemuan rutin dilakukan di rumah anggota secara bergantian sesuai dengan siapa yang mendapatkan arisan. Pertemuan rutin antar anggota kelompok dipandang menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman dalam berusaha sekaligus berfungsi menjadi kesempatan untuk saling mengingatkan agar kelompok dan usaha masing-masing tidak mengalami kemunduran dan harus tetap terjaga keberlangsungan usaha dan kelompoknya. Hal lain adalah kelompok tata boga secara khusus, dan desa Gemawang secara umum telah menjadi salah satu rujukan bagi warga masyarakat luar misal para mahasiswa yang ingin mengetahui mengenai aktivitas usaha produktif yang berkembang di Gemawang. Adanya kunjungan tersebut, walau dengan frekuensi kunjungan yang tidak sama dalam setiap tahun, telah berdampak baik pada penjualan produk-produk para anggota kelompok.

Bagi pelaku usaha APE, keberadaan Program Desa Vokasi telah menjadikan dirinya menjadi seorang warga masyarakat yang dipandang sebagai orang yang berhasil dalam berusaha dimana sebelumnya ia bekerja sebagai petani. Karena keberhasilan dalam menjalankan usahanya, ia merasa dapat memberikan sumbangsih yang lebih dalam menyukseskan kegiatan kemasyarakatan seperti aktivitas *rembug desa* dan gotong royong. Ia pun merasa bahagia akan usaha yang digelutinya dimana telah memberikan lapangan pekerjaan bagi beberapa warga yang ada di masyarakatnya. Hal yang hampir sama dirasakan oleh pelaku usaha batik, dimana dirinya

dipandang sebagai seorang wirausahawan sukses di lingkungan masyarakat Gemawang dan bahkan di tingkat kecamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaku dipandang merupakan warga masyarakat yang memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dan menjadi salah satu orang yang sering dilibatkan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat desa setempat.

Selain hubungan dalam kelompok usaha, para pelaku usaha menjalin hubungan yang baik dengan pengelola lokal dimana hubungan dimaksud dipandang sebagai suatu aktivitas yang menguntungkan. Hubungan dimaksud diwujudkan dalam bentuk pertemuan rutin dan melalui hubungan informal dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan antara kelompok yang diwakili oleh ketua masing-masing kelompok berjalan sebagaimana diharapkan berfungsi sebagai wadah dimana kelompok dapat berkoordinasi dengan pengelola lokal, saling berdiskusi mengenai permasalahan yang ditemukan, dan saling memberikan informasi terkait dengan kemajuan kelompok. Namun disayangkan, menurut Amn bahwa pertemuan ini sudah tidak terjadi secara rutin karena kesibukan para pengelola lokal dan banyak kelompok yang sudah tidak menekuni kegiatan usahanya (Wawancara, 15/06/2014). Kekurangberfungsian pengelola lokal dalam menjalankan tugasnya menunjukkan bahwa dalam kehidupan berkelompok dibutuhkan komitmen yang kuat agar kelompok dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bersama.

Pada aspek sosial kehidupan masyarakat yang lebih luas, keberadaan aktivitas wirausaha yang berkembang di masyarakat Gemawang mampu membawa pandangan positif dari masyarakat luas. Kegiatan kewirausahaan yang dikembangkan melalui mampu berkembang dan merupakan salah satu yang paling berhasil dibandingkan program vokasi yang ada di provinsi Jawa Tengah dimana Gemawang memiliki slogan bahwa Gemawang sebagai Desa Pembelajar. Akibatnya, banyak kunjungan dari instansi

pemerintah, kelompok, dan perorangan ke Gemawang dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai aktivitas wirausaha yang ada di Gemawang maupun berkeinginan untuk belajar mengenai kegiatan wirausaha yang ada Gemawang. Terjadi perubahan positif dalam lingkungan masyarakat Gemawang seperti dikemukakan oleh Kepala Desa yang mana pada saat penyelenggaraan dirinya berperan sebagai salah seorang pengelola lokal, bahwa:

*“Walaupun sudah tidak mendampingi, P2PNFI sering menunjuk Gemawang menjadi tempat kunjungan tamu, kalau mengenai vokasi, bahkan pada awal-awal saya menjadi kepala desa. Banyak yang kesini, misal dari Kudus, dari Demak, sifatnya studi banding, mereka ingin belajar mengapa berorganisasi, bagaimana mengelola vokasi yang berhasil. Otomatis di sini CLC pun sering dikunjungi, kadang digunakan untuk tempat pertemuan. Kami membentuk kelompok sadar wisata, pengurusnya ada ibu-ibu ada bapak-bapak. Pokdarwis sering menyiapkan konsumsi bagi tamu-tamu, lokal atau mancanegara, penginapan (homestay) ...”*  
(Wawancara, 10/02/2015).

Mendasarkan pada informasi yang dikemukakan oleh para informan dapat dikemukakan bahwa aktivitas pendidikan kewirausahaan masyarakat yang telah dikembangkan di Desa Gemawang berpengaruh positif terhadap kehidupan sosial pelaku dan masyarakatnya. Bagi pelaku wirausaha yang terkait, mereka merasakan terdapat perubahan kehidupan yang baik dalam kehidupan diri dan keluarganya, memiliki rasa bahagia, dipandang bahwa di lingkungan sekitar mereka merupakan orang yang berhasil dalam usaha dan telah mempekerjakan warga sekitar, serta terbangun kehidupan organisasi yang saling memajukan usaha bersama. Sedangkan bagi masyarakat desa Gemawang secara

luas, muncul kesadaran dan sikap positif warga masyarakat terhadap kunjungan para tamu atau pengunjung yang ingin belajar mengenai desa Gemawang sebagai desa wisata dan terhadap peluang usaha pariwisata yang lebih beragam di Gemawang.

Dalam hal kehidupan politik, keberadaan pelaku atau kelompok usaha produktif wirausaha yang ada di Desa Gemawang mampu memberikan pengaruh pada dinamika partisipasi politik. Salah satu indikasinya adalah produk wirausaha batik yang mana batik berdesain “kembang kopi” telah menjadi unggulan atau *icon* Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang sudah mengakui keberadaan motif batik tersebut dan sudah meminta pelaku usaha batik untuk memproduksi kain batik yang akan digunakan bagi para staf atau pegawai di lingkungan pemerintahan setempat. Hal lain adalah aktivitas-aktivitas wirausaha yang ada - beserta kegiatan pendidikan masyarakat yang lainnya - telah menyebabkan muncul pengakuan positif baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Aktivitas dimaksud dipandang menjadi kesempatan bagi pemerintah lokal dan regional untuk dapat menarik kunjungan dari individu atau lembaga lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai pameran produk-produk wirausaha yang ada secara rutin.

Dalam pengambilan kebijakan tingkat desa, terdapat perbedaan partisipasi di antara para pelaku wirausaha. Pelaku usaha batik memiliki peran penting dalam pengambilan kesimpulan di level pemerintahan desa. Ia terlibat dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga Gemawang. Dirinya menjadi salah satu *task force* yang merancang rencana kegiatan dimaksud. Keterlibatan yang besar dalam urusan pemerintahan desa setempat ini karena ada hubungan pertemanan dan persaudaraan yang erat dengan pihak pemerintahan desa dan keberhasilan dalam usahanya. Di

tingkat kecamatan, ia sering dilibatkan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan daerah di tingkat kecamatan. Ia pun sering memberikan fasilitas kepada para pelaku wirausaha APE dan tata boga yang akan mengikuti kegiatan pameran yang bertujuan mempromosikan potensi desa Gemawang seperti memberikan layanan transportasi gratis kepada mereka. Sedangkan peran pelaku usaha APE dan para pelaku tata boga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa sebatas pada kontribusi mereka dalam menyukseskan kegiatan atau program yang diselenggarakan pemerintah desa seperti pameran tingkat kecamatan dan/atau terdapat kunjungan dari instansi lain. Mereka sering diajak berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat dan para pelaku usaha yang ada di Gemawang.

Mendasarkan pada uraian mengenai dampak ekonomi, sosial, dan politik pendidikan kewirausahaan masyarakat di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan usaha produktif sebagai hasil penyelenggaraan Program Desa Vokasi mampu memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan atau penghasilan bagi para pelaku dan warga masyarakat; dapat memberikan manfaat sosial seperti terbangun rasa kebersamaan, saling memberikan informasi dan pengetahuan, meningkatkan status sosial pelaku dalam masyarakat, dan kepuasan diri pelaku; dan secara politik mampu memperkenalkan produk lokal serta membangun partisipasi masyarakat. Namun demikian, manfaat yang dihasilkan belum dapat berimbas lebih besar terhadap kehidupan masyarakat setempat. Apa yang disebut dengan *nurturant effect* dalam konteks pemberdayaan masyarakat dari penyelenggaraan Program Desa Vokasi masih belum terjadi dengan optimal. Hal ini terlihat dari aktivitas wirausaha yang ditimbulkan cenderung masih dalam satu aktivitas yang sama dan masih minim menumbuhkan aktivitas-aktivitas ekonomi atau usaha pemberdayaan yang lain.





# BAB 7

## KAPASITAS INOVASI PENDIDIKAN NONFORMAL

Bab VII membahas mengenai bagaimana kapasitas inovasi dari tenaga pendidikan nonformal dapat dibangun atau dikembangkan sehingga diperlukan pemahaman mengenai cara membangun tindakan inovatif. Terkait ini, akan dibahas mengenai pengembangan kapasitas inovasi dalam pendidikan nonformal, kontribusi komunitas praktik (*community of practice*) dan manajemen pengetahuan dalam menghasilkan dan/atau membangun tindakan inovatif dalam pendidikan nonformal.

## A. Kapasitas Inovasi

Inovasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar/masyarakat, kemampuan untuk menggunakan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan kemampuan untuk mencapai teknologi baru bagi penciptaan peluang. Inovasi memiliki konotasi kebaruan yaitu inovasi adalah penggerak, pengembangan dan adaptasi suatu ide atau perilaku, yang baru untuk organisasi yang beradaptasi (Alder & Shenhar, 1990, dalam Rahmani & Ali Muosavi, 2011). Inovasi merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru yang memiliki nilai signifikan untuk unit adopsi yang relevan. Menurut Holme & Sjolander (2015) inovasi dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat kebaruannya yaitu inovasi inkremental (*incremental innovation*) dan inovasi radikal (*radical innovation*). Inovasi inkremental adalah kebaruan yang ada dalam lingkungan pasar kerja yang saat ini atau proses dan teknologi dalam suatu organisasi, sedangkan inovasi radikal adalah mentransformasikan suatu pasar yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru karena ada pendefinisian ulang atau penata kembali suatu konsep yang secara signifikan mentransformasikan kebutuhan dari suatu pasar.

Inovasi merupakan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan tanpa arah dan berdasarkan pada tindakan yang kurang berarti semata, namun harus didasarkan pada kemampuan atau skills tertentu sehingga hasil dari inovasi dapat mengarah pada capaian yang optimal. Artinya, inovasi dihasilkan seseorang yang memiliki kemampuan atau skills yang mumpuni. Kemampuan berinovasi (*innovation capability*) yang baik dari semua individu yang dimiliki suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan akan menggambarkan bahwa lembaga tersebut memiliki apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang besar sebagai suatu modal untuk memenangkan persaingan dengan pihak lain dalam memperoleh sumber daya yang tersedia di lingkungan.

Keunggulan kompetitif menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk terus berkembang mencapai tujuannya dengan cara menempuh berbagai tindakan yang berbeda dengan pihak lain.

Kapabilitas inovasi yang dimiliki individu dalam organisasi pendidikan nonformal memiliki dimensi yang cukup beragam sebagaimana pendapat-pendapat para ahli memandang konsep ini. Kapabilitas inovasi adalah elemen yang mempengaruhi kapasitas organisasi untuk membentuk dan mengelola inovasi. Kapasitas inovasi merupakan kelompok kemampuan yang terkait dengan kapasitas dari organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan menghasilkan inovasi secara berulang. Kapasitas inovasi dapat dimaknai pula sebagai serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mendayagunakan penyatuan dan mengintegrasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang inovatif dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk tujuan pencapaian hasil tertentu.

Momeni, Neilsen, & Kafash (2015) mengungkapkan bahwa kapasitas inovasi sangat dibutuhkan oleh organisasi sebagai suatu keunggulan kompetitif dalam perkembangan lingkungan. Menurut mereka, kapasitas ini adalah kemampuan menciptakan layanan atau produk baru, teknologi baru, praktik administratif yang baru, dan sebagai suatu intelegensi dan kreatifitas, kemampuan menciptakan belajar yang efektif, dan menciptakan pengetahuan baru. Lebih jauh dikemukakan bahwa kapasitas inovasi dapat digolongkan dalam:

- a) kapasitas struktural yang terdiri dari kapasitas manajerial, kapasitas kultural, kapasitas komunikatif, dan kapasitas pengetahuan organisasional
- b) kapasitas personalia yang meliputi kapasitas penggerakkan ide, kapasitas pendeteksian kesempatan, kaspitas pengetahuan individu

- c) kapasitas operasional yang mencakup kapasitas teknologi dan kapasitas pendukung.

Tabel Kapasitas inovasi

<b>Jenis Kapasitas Inovasi</b>	<b>Atribut</b>
Kapasitas pendeksian kesempatan	Survey lingkungan bisnis Akurasi, perhatian, intelegensi
Kapasitas penggerakkan ide	Kreativitas Kepraktisan
Kapasitas pengetahuan individu	Pengetahuan Pengalaman
Kapasitas manajerial	Strategi dan tujuan Gaya manajemen Stabilitas manajemen
Kapasitas kultural	Fleksibilitas Diversivitas Penerimaan resiko
Kapasitas komunikasi	Jaringan Kerja sama
Kapasitas organisai	Organisas belajar Penyimpanan pengetahun Penerimaan pegnetahuan Sistem informasi
Kapasitas teknologi	<i>Research &amp; Development</i> Teknologi baru
Kapasitas pendukung	Logistik Tempat kerja

Pendapat Zawilak, et al (2012) menyatakan bahwa kapasitas inovasi suatu organisasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a) kapasitas pengembangan teknologi yang dimaknai sebagai kemampuan bahwa setiap organisasi harus menginterpretasikan kondisi saat ini, menyerap, dan mentransformasikan teknologi yang ada untuk menciptakan atau mengubah kapasitas operasi/pekerjaannya dan setiap kemampuan lain yang bertujuan untuk mencapai tingkat lebih tinggi dari efisiensi ekonomi-teknologis,

- b) kapasitas operasi (pekerjaan) yang menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan kapasitas produktif yang ada melalui pengumpulan rutinitas setiap hari yang diwujudkan dalam sistem pengetahuan, skills dan teknis pada waktu tertentu
- c) kapasitas manajemen yang bermakna kemampuan untuk mengtransformasikan hasil pengembangan teknologi kedalam pekerjaan yang sesuai (koheren) dan penyusunan transaksi
- d) kapasitas transaksi yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mereduksi biaya pemasaran, *outsourcing*, bargaining, logistik, dan pengantaran.

Pandangan lain dikemukakan oleh Rahmani & Ali Mousavi (2011) yang mengungkapkan bahwa sebuah organisasi harus memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan yang muncul dari perubahan lingkungan. Kapasitas ini dipandang sebagai aset organisasi yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kinerja organisasi yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk inovasi yaitu inovasi dalam produk, inovasi proses, dan inovasi manajemen. Menurutnya, untuk membentuk kapasitas inovasi perlu terlebih dahulu dikembangkan atau dimiliki kapasitas absorptive (*absorptive capacity*). Kapasitas absorptif dimaknai sebagai kemampuan organisasi untuk menggunakan pengalaman yang dimiliki dan keragaman latarbelakang untuk mengidentifikasi nilai dari informasi yang baru dan untuk mengembangkan nilai tersebut ke dalam sesuatu yang inovatif. Kemampuan untuk memahami nilai dari informasi yang baru, menyesuaikannya, dan menerapkannya dalam tujuan organisasi. Kemampuan ini terdiri dari aktivitas pencapaian nilai, asimilasi, transformasi dan eksploitasi nilai. Untuk membentuk kapasitas absorptif modal sosial menjadi suatu syarat dalam proses perwujudannya baik mencakup aspek kultur, mekanisme dan struktur. Hal ini dapat dimengerti bahwa dengan kemampuan modal sosial, yang salah satunya adalah dimensi

mekanisme atau relasi dimana seseorang membangun komunikasi dan interaksi dengan individu lain menyebabkan dirinya memiliki peluang dalam mengakses berbagai informasi atau pengetahuan dari lingkungan di luar dirinya. Akhirnya, pengetahuan yang dikumpulkannya, kemudian dapat dikelola dan para akhirnya diwujudkan dalam sesuatu produk atau tindakan yang baru.

Pengembangan kapasitas inovasi pada dasarnya tidak lepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Sudah tentu, untuk mengembangkan kapasitas inovasi bukan suatu pekerjaan yang dengan mudah dilakukan. Artinya, pengembangan kapasitas inovasi harus dapat dilakukan dengan terencana agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan. Terkait ini, OECD (2011) mengungkapkan bahwa keahlian yang dibutuhkan untuk mempercepat pembentukan kapasitas inovasi bagi sumber daya manusia yang meliputi:

- a. Keterampilan dasar dan literasi digital. Kemampuan dasar mencakup kemampuan menulis, membaca, dan numerik. Kemampuan digital memungkinkan orang untuk mengakses dan menginterpretasikan informasi dalam suatu masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*), dan melekat teknologi yang memungkinkan orang untuk menggunakan teknologi digital, dan menggunakan jaringan dan perangkat komunikasi.
- b. Keterampilan akademik (*academic skills*). Keterampilan ini dicapai secara umum melalui sistem pendidikan dan dapat ditranferkan ke situasi yang berbeda.
- c. Keterampilan teknis (*technical skills*). Keterampilan ini secara khusus dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dan mencakup keterampilan akademik dan pengetahuan mengenai perangkat atau proses tertentu. Kemampuan ini, disebut juga "*green skills*", meliputi kompetensi penyesuaian

produk, layanan dan proses dalam merespon perubahan lingkungan dan terkait dengan peraturan.

- d. Keterampilan umum (*general skills*). Keterampilan ini dapat mencakup keterampilan berfikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk mengelola ketidakpastian (*complexity*). Hal ini diperlukan untuk dipergunakan dalam situasi berbeda atau menghadapi masalah baru.
- e. “*Soft skills*”. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain baik dalam tim maupun kelompok yang berbeda, kemampuan memotivasi, inisiatif dan kemauan, kemampuan mengetahui dan mengelola emosi dan perilaku orang lain selama interaksi sosial, terbuka secara multikultural memahami budaya yang berbeda, dan penerimaan terhadap inovasi.
- f. Kepemimpinan. Kemampuan ini mencakup kemampuan dalam membangun tim (*team building*), pembinaan dan mentoring, kemampuan negosiasi, koordinasi, etika dan kharisma.

Secara jelas dikemukakan bahwa keterampilan seseorang dalam menghasilkan inovasi dibutuhkan dalam setiap tahapan inovasi, misalnya: pada tahapan pencarian dan pemilihan idea, kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyaring ide inovasi sangat dibutuhkan. Kemampuan membangun tim, mengalokasikan dan menganggarkan dana, mengembangkan ruang untuk eksperimen, mencari masukan pelengkap, dan membangun jaringan sangat dibutuhkan dalam tahap pengembangan ide inovasi. Oleh karenanya, untuk membangun kemampuan ini, hal yang paling perlu diperhatikan dalam lembaga pendidikan adalah bagaimana setiap sumber daya manusia didalamnya memiliki mengembangkan perilaku inovatif yang ditandai dengan kepemilikan rasa ingin mengetahui, perilaku berbagai pengetahuan, dan saling berkolaborasi.

## B. Komunitas Praktik untuk Inovasi

Lembaga pendidikan nonformal terutama lembaga pendidikan nonformal yang bergerak dibidang penciptaan para pelaku usaha atau pekerja harus dapat mengarahkan pada perwujudan atau perkembangan suatu komunikasi yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pada pelaksanaan tugas utama yaitu memproduksi barang dan/atau jasa. Artinya, lulusan pendidikan nonformal perlu diarahkan untuk terus mengembangkan kegiatan pendidikan yang dijalankan secara bersama-sama dalam konteks menyukseskan usaha atau bidang pekerjaan yang digelutinya. Salah satunya adalah menyiapkan lulusan pendidikan untuk membangun dan mengembangkan suatu komunitas antar pelaku usaha yang disebut dengan komunitas praktik atau *community of practice*.

*Community of practice* yang dimaknai sebagai *groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly* (Wenger, 2006) atau kelompok orang yang berbagi sesuatu suatu perhatian dan keinginan untuk sesuatu yang mereka lakukan dan mempelajari bagaimana melakukannya dengan baik sebagaimana mereka berinteraksi secara teratur. *Community of Practice* dibentuk oleh individu-individu suatu kelompok atau jaringan antar orang, mengembangkan aktivitas dan diskusi bersama, berbagi informasi, saling membantu, dan menjalankan berbagai macam kegiatan baik terkait dengan hobi, minat, *problem solving* dalam mengatasi masalah kehidupan, koordinasi dan sinergi, berbagi pengalaman, dsb.

Serrat (2008) memandang bahwa komunitas praktik memiliki karakteristik umum yaitu sebagai jaringan kolaboratif antar teman, digerakan oleh keinginan para anggotanya, difokuskan pada belajar dan pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan dilaksanakan untuk *sharing* pengetahuan, pengembangan praktik keahlian, dan pemecahan masalah. Komunitas praktik menyediakan suatu sarana



untuk berbagi data, informasi dan pengetahuan secara bebas, komunitas praktik memecah hambatan komunikasi, menyediakan suatu lingkungan yang bersahabat dan informal, menyediakan alat untuk membangun jaringan, dan melakukan pengumpulan pengetahuan dan mereferensikan jaringan pengetahuan tempat kerjanya. Idealnya, setiap kegiatan komunitas praktik dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pemberdayaan dalam komunikasi yang terus-menerus dan berkelanjutan, diselenggarakan dalam perkumpulan rutin tahunan dan bulanan atau empat bulanan, sering melakukan telekonferen bulanan, menjalidn interaksi setiap hari atau mingguan, dan secara teratur mengakses kerangka komunikasi.

Kehadiran komunitas praktik tidak lepas dari adanya tuntutan dalam pelaksanaan pekerjaan atau fungsi lembaga dalam mencapai tujuannya terutama dalam konteks perekonomian global. Pencapaian tujuan membutuhkan berbagai penyesuaian dari para pelaku usaha atau pekerjaan terutama dalam hal penguasaan kompetensi atau pengetahuannya. Dalam hal ini, kompetensi pelaku usaha selalu membutuhkan peningkatan agar pelaksanaan tugas dalam berjalan dengan baik, sehingga pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka akan selalui dituntut untuk menyesuaikan. Namun, dalam peningkatan kompetensi ini proses pembelajaran dilakukan tidak dengan sendirinya dilakukan hanya oleh individu-individu secara personal, namun dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung atau membina keterlibatan dengan semua pihak terutama mereka yang berfungsi sebagai pelaku. Akibatnya, terjadi sharing pengalaman atau pengetahuan diantara mereka yang pada akhirnya menjadi bekal baru untuk melakukan pekerjaan.

Hal lain yang menjadi dasar kemunculan komunitas praktik adalah sifat pengetahuan sendiri yang bersifat dinamis, dimana pengetahuan baik tacit maupun eksplisit harus terus dikembangkan dalam bentuk sharing pengetahuan di antara individu sebagai

implikasi logis dari pemahaman bahwa pengetahuan bukan hanya milik individu namun juga menjadi milik bersama (sosial) (Wenger, 2002:10-12). Berapa kajian menunjukkan bahwa kehadiran komunitas praktik dalam meningkatkan pemahaman dalam berusaha dari para wanita yang berada di pedesaan (Entoh & Sujarwo, 2013; 2014), komunitas praktik mampu menciptakan modal sosial yang akhirnya meningkatkan kinerja organisasi (Lesser & Streak, 2001),

Keberadaan komunitas praktik memiliki tiga karakteristik utama yaitu domain, masyarakat, dan praktik (Wenger, 2002:27).

1. **The domain:** *A community of practice is not merely a club of friends or a network of connections between people. It has an identity defined by a shared domain of interest. Membership therefore implies a commitment to the domain and therefore a shared competence that distinguishes members from other people.*
2. **The community:** *In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities and discussions, help each other, and share information. They build relationships that enable them to learn from each other.*
3. **The practice:** *A community of practice is not merely a community of interest—people who like certain kinds of movies, for instance. Members of a community of practice are practitioners. They develop a shared repertoire of resources: experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems—in short, a shared practice. This takes time and sustained interaction.*

Komunitas praktik mengandung dimensi belajar sepanjang hayat (*life long learning*) yang memungkinkan semua individu menjadi lebih berkompeten dan berkarakter. Lebih jelas dikemukakan oleh Wenger bahwa:

*"We all have our own theories and ways of understanding the world, and our communities of practice are places where we develop, negotiate, and share them" (48). Through these communities, participants develop a "shared repertoire" (82) of practice, exchanges where there exists no "dichotomy between the practical and the theoretical, ideals and reality, or talking and doing (48)" (Gellen, et al., 2007).*

Terkait dengan hal tersebut, kelembagaan pendidikan nonformal perlu mengembangkan *Community of Practice* misalnya dengan membentuk kegiatan belajar bersama dalam kelompok usaha bersama. Pembentukan kelompok belajar bisa mendorong rasa berbagi pengetahuan, mempromosikan perilaku belajar "I-Thou" yaitu belajar melalui orang lain, tidak belajar tentang sesuatu "I - Its", yang dapat menumbuhkan sikap koordinatif dan saling memotivasi antar individu (Cunningham, 2002). Proses pembelajaran yang cenderung menekankan pada belajar mandiri dan melalui pengalaman dapat menciptakan dan membangun modal sosial karena siswa bisa mengelola kegiatan belajar mereka dan meningkatkan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara siswa dan antara siswa dan masyarakat. Demikian juga, pendidikan nonformal harus bertindak dengan melakukan kemitraan antara sekolah dan masyarakat yang bisa menjembatani konstruksi modal sosial, kolaborasi, meramalkan masa depan, dan percaya bahwa manfaat bagi kedua belah pihak (Calabrese, 2006).

Kehadiran komunitas praktik dalam suatu lembaga usaha atau pendidikan dalam memberikan diharapkan memberikan manfaat yang optimal kepada individu dan lembaga (Wenger, McDermot, & Snyder, 2002:16) baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Manfaat bagi organisasi dalam jangka pendek adalah terkait langsung dengan peningkatan *outcome* bisnis yang dapat mencakup: kemampuan mengatasi masalah, kecepatan menjawab masalah/pertanyaan,

mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan mutu keputusan, koordinasi, standarisasi dan sinergi lintas unit, mengembangkan jaminan mutu, memiliki sumberdaya untuk pengimplementasian strategi, dan kemampuan mengambil resiko. Manfaat bagi organisasi dalam jangka panjang mencakup: kemampuan untuk melaksanakan rencana strategis, kewenangan dengan klien, meningkatkan resistensi penolakan (*talent*), mengembangkan kapasitas untuk proyek pengembangan pengetahuan, sebagai forum untuk “*benchmarking*” sebagai bagian dari industri, perkumpulan berbasis pengetahuan, memunculkan kemampuan yang tidak direncanakan, kapasitas untuk mengembangkan pilihan strategis baru, kemampuan untuk melihat perkembangan teknologi, dan kemampuan untuk memperoleh kesempatan pasar yang muncul.

Manfaat bagi individu dalam jangka pendekatan adalah terjadi peningkatan pengalaman dalam bekerja yang dapat berupa memperoleh tantangan, memiliki akses pada kesempatan/ pekerjaan, dapat lebih baik berkontribusi pada tim, percaya pada satu pendekatan terhadap suatu masalah, merasakan kesenangan bersama kolega, menjadi lebih berarti sebagai partisipan, dan memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*). Sedangkan dalam jangka panjang, individu dapat mencapai pengembangan profesionalnya yang dapat berupa: membangun forum untuk mengembangkan skills dan pengalaman, membangun jaringan seajar dalam bidang kerja, meningkatkan kemampuan memasarkan dan employibilitas, dan memperkuat rasa identitas profesional.

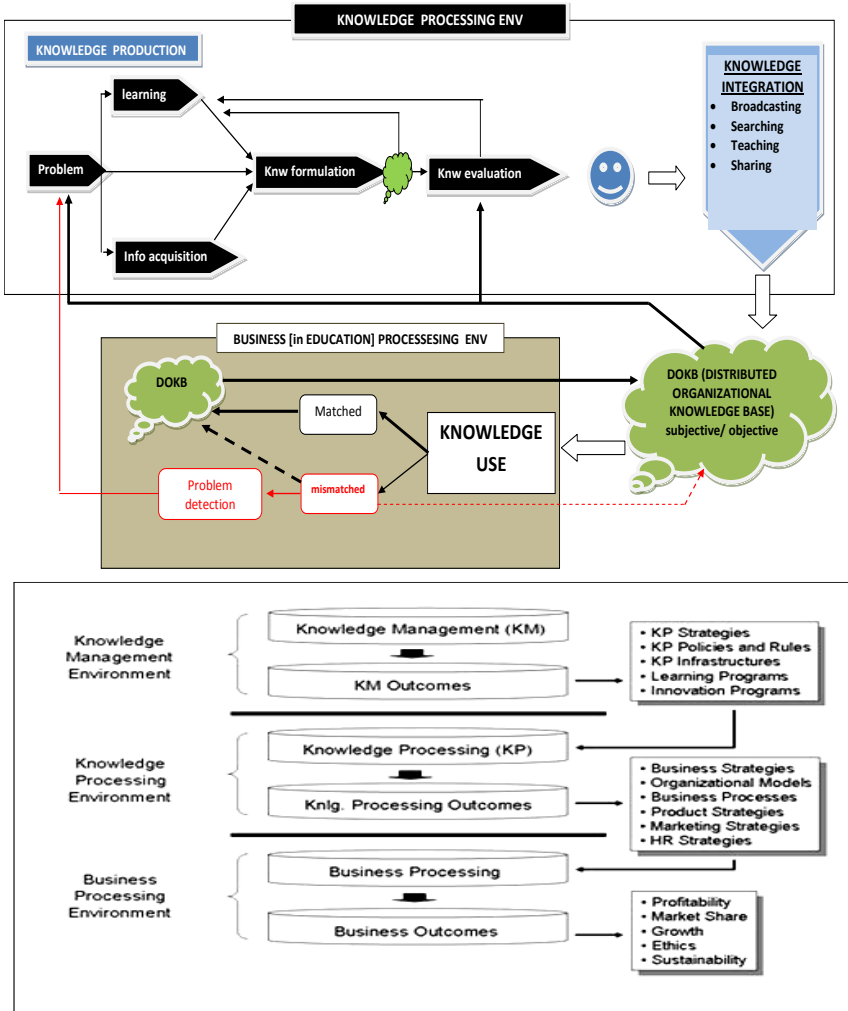
Tentu pengembangan komunitas praktik bukan pekerjaan yang mudah dalam upaya memajukan pendidikan nonformal. Namun demikian, pengembangan komunitas praktik harus didasarkan pada tujuh prinsip yang menjiwainya sebagaimana Wenger, et al (2002) kemukakan yaitu: terdapat desain untuk evolusi, terdapat dialog terbuka antara perspektif luar dan dalam organisasi, mengundang tingkatan berbeda dari partisipasi, mengembangkan space komunitas

publik dan private, memfokuskan pada nilai-nilai, mengkombinasikan kefamilieran dan ketertutupan, dan menciptakan irama bagi komunitas. Atau dengan kata lain, pengembangan komunitas praktik sebagai sarana untuk saling membelajarkan harus dilandasi dengan nilai saling percaya, saling memberdayakan atau membelajarkan, dan saling berdialogi ke arah kebaikan.

### **C. Manajemen Pengetahuan untuk Inovasi**

Organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Fungsi dan tugas sangat beragam dalam fokus aspeknya. Salah satu fokus pengelolaan lembaga pendidikan yang akhir-akhir ini sedang berkembang di masyarakat, terutama semenjak tahun 2000-an adalah pengelolaan pengetahuan. Pengetahuan dipandang sebagai aset dari lembaga pendidikan yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan. Pentingnya pengelolaan pengetahuan didukung oleh kenyataan bahwa telah terjadi pergeseran pandangan yang semula memandang bahwa organisasi berhasil dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya fisik yang ada seperti mesin, peralatan, teknologi, dan fasilitas lainnya, beralih ke pemahaman bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia terutama kemampuan intelektualnya.

Manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge based management*) merupakan hal baru, satu langkah lebih maju dari SIM (Sistem Informasi Manajemen) maupun DSS (*Decision Support System*). Dalam skenario nasional menuju masyarakat berbasis pengetahuan yang mengedepankan inovasi dan kearifan, pengetahuan ini menduduki posisi sentral, karena tiada inovasi tanpa akumulasi pengetahuan. Konsep dasar manajemen berbasis pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Pengetahuan  
(Sumber: Firestone and McElroy, 2005)

Pada dasarnya gambar tersebut menunjukkan bahwa di dalam manajemen berbasis pengetahuan ada tiga level lingkungan, yakni:

- a) *Business processing environment*: lingkungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang kalau dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan pendidikan untuk semua, yang berkualitas, paling tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.
- b) *Knowledge processing environment*: pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan yang hanya terjadi secara rutin, tidak akan memadai di dalam masyarakat yang semakin dinamis dan kompetitif. Oleh karena itu, organisasi birokrasi pendidikan akan dapat mengimbangi tuntutan atau bahkan mewarnai masyarakatnya apabila juga selalu meningkatkan kinerjanya. Di sinilah diperlukan lingkungan kelembagaan yang senantiasa mencari dan menghasilkan pengetahuan baru (*knowledge production*) dan memadukannya (*knowledge integration*) dengan mekanisme layanan sebagai tanggungjawab pokoknya. *Experiential learning* tidak hanya berlaku pada individu yang belajar, melainkan juga pada satuan organisasi yang juga perlu dapat belajar dari pengalaman.
- c) *Knowledge management environment*: pengetahuan tidak diperoleh secara tidak sengaja, akan tetapi direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan secara efektif. Organisasi pendidikan perlu mengelola berbagai informasi yang dihasilkan secara terencana untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan kinerja lembaga pendidikan. Lingkungan yang demikian memungkinkan dihasilkan kebijakan dan program pendidikan yang inovatif, budaya belajar berkembang, dan kebermanfaatan infrastruktur pendidikan. Pendekatan *R&D* atau riset dan pengembangan, merupakan salah satu perwujudan nyata dari lingkungan manajemen pengetahuan. Penyelesaian masalah tidak hanya dilakukan secara intuitif, melainkan dicari solusinya melalui perintisan model atau prototip, yang secara konseptual dapat

dipertanggungjawabkan, dan secara empirik sudah teruji, dengan kemasannya yang telah melalui penyempurnaan berulang-ulang.

Model lain mengenai manajemen pengetahuan dikemukakan oleh Probst (2006) yang menunjukkan dalam manajemen pengetahuan terdapat beberapa aktivitas yang secara umum dibagi dalam dua ranah yaitu ranah proses manajemen dan ranah proses-proses operasional. Ranah operasional dalam manajemen pengetahuan mencakup aktivitas yaitu: identifikasi pengetahuan, pencapaian pengetahuan, penciptaan pengetahuan, transfer pengetahuan, penggunaan pengetahuan, dan pelestarian pengetahuan; dan ranah manajemen mencakup aktivitas pengukuran pengetahuan, dan termasuk pada tujuan pengetahuan. Proses manajemen ini dapat digambarkan dalam gambar di bawah.

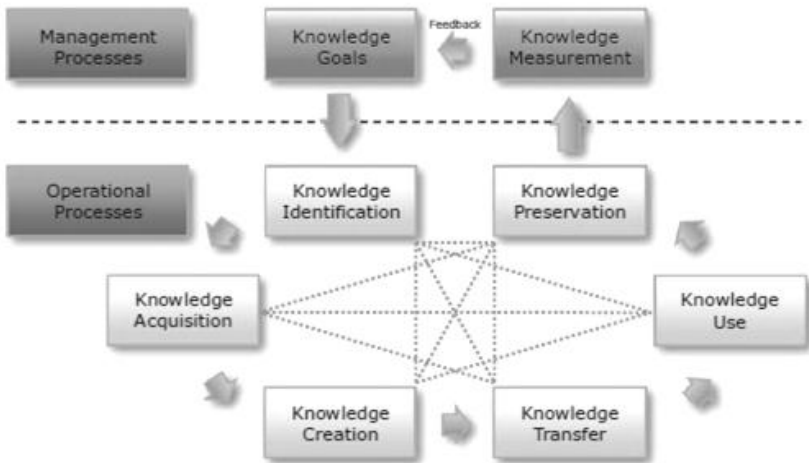


Fig. 2.3 Holistic framework of knowledge management (Cf. Probst et al. 2006, p. 32)

Pendapat lain menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan memiliki tiga perspektif yaitu perspektif bisnis, perspektif kognisi, dan perspektif teknologi atau proses. Perspektif bisnis



menggambarkan bahwa manajemen pengetahuan adalah suatu aktivitas bisnis dengan dua aspek utama yaitu memperlakukan komponen pengetahuan mengenai berbagai aktivitas bisnis sebagai suatu konsen eksplisit dari bisnis yang direfleksikan dalam strategi, kebijakan, dan praktik-praktik pada semua level organisasi; dan membuat suatu koneksi langsung antara aset-aset intelektual organisasi baik eksplisit (terekam) maupun tacit (*personal know-how*) dan hasil bisnis yang positif. Manajemen pengetahuan adalah pendekatan integratif bagi penciptaan, penangkapan (*capture*), organisasi, akses dan penggunaan aset-aset intelektual usaha.

Perspektif ilmu pengetahuan atau ilmu kognisi memandang bahwa manajemen pengetahuan menekankan pada pengetahuan baik pengertian, pemahaman, dan *know-how* yang praktis yang dimiliki organisasi adalah sumber daya fundamental yang mengarahkan individu-individu berfungsi secara intelek. Sepanjang waktu, pengetahuan yang dipahami ditransferkan kepada perlakuan (manifestasi) lain seperti buku, teknologi, praktik dan kebiasaan dalam semua organisasi. Transformasi ini menghasilkan perilaku/tindakan/hasil yang kumulatif dan meningkatkan efektivitas ketika digunakan. Pengetahuan adalah suatu hal yang penting atau prinsip yang membuat organisasi, personal, dan masyarakat berperilaku baik secara intelektual. Sedangkan perspektif proses atau teknologis memandang bahwa manajemen pengetahuan adalah konsep yang mana informasi dirubah ke dalam pengetahuan yang dapat dilaksanakan dan membuat muda untuk dilakukan bagi orang-orang yang dapat diterapkannya. Dalam hal ini, suatu pendekatan sistematis untuk mengelola penggunaan informasi agar tersedia suatu aliran pengetahuan terus-menerus bagi orang yang tepat pada waktu yang tepat yang memungkinkan pembuatan keputusan efektif dan efisien dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Tabel Perbandingan pengetahuan tacit dan eksplisit

<b>Karakteristik pengetahuan tacit</b>	<b>Karakteristik pengetahuan eksplisit</b>
Kemampuan untuk mengadaptasikan, terkait dengan situasi yang baru dan dikehendaki	Kemampuan untuk mendesiminasikan, memproduksi kembali, mengakses, dan menerapkan ulang dalam organisasi
Praktik, <i>know-how</i> , <i>know-why</i> , dan <i>care-why</i>	Kebiasaan untuk mengajarkan, dan melatihkan
Kebiasaan untuk berkolaborasi, berbagi visi, dan mentransimikan budaya	Kebiasaan untuk mengorganisasi, mensintesis, menerjemahkan suatu visi ke dalam pernyataan misi, dan petunjuk operasional
Coaching dan mentoring untuk mentransfer pengetahuan dengan tatap muka, <i>one to one basis</i>	Transfer pengetahuan melalui produk, jasa dan proses terdokumen

Manajemen pengetahuan memberikan manfaat baik pada individu, organisasi, maupun masyarakat. Manfaat bagi individu adalah menolong orang melakukan pekerjaan mereka dan menghemat waktu dengan cara memilih keputusan dan pembuatan keputusan yang paling baik, membangun ikatan rasa memiliki dalam organisasi, membantu orang untuk terus mengupdate dirinya, dan memberikan kesempatan dan tantangan bagi orang-orang untuk berkontribusi. Manfaat bagi komunitas praktik adalah mengembangkan skills profesional, mendukung mentoring teman sebaya (*peer to peer*), memfasilitasi jaringan dan kerja sama yang lebih efektif, mengembangkan kode etik profesional yang orang-orang ikuti, dan mengembangkan bahasa bersama. Sedangkan

manfaat bagi organisasi berupa mengarahkan memperoleh strategi, mengatasi masalah secara cepat, menyebarkan pengalaman yang terbaik (*best practice*), mengembangkan pengetahuan yang diwujudkan dalam produksi barang dan/atau jasa, mengembangkan kesempatan berinovasi dan menyuburkan *sharing* ide-ide, memungkinkan organisasi untuk maju menghadapi kompetisi, dan membangun memori organisasi.



# LAMPIRAN

## PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT<sup>1</sup>

oleh

YOYON SURYONO<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Pendidikan kewirausahaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan yang memiliki tiga kegiatan utama pelatihan, rintisan inkubator bisnis, dan rintisan sentra wirausaha dirancang untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat yang membuka peluang munculnya para wirausahawan yang mampu mengembangkan keberaksaraan masyarakat pada berbagai bidang. Pada tahun 2010 dan 2011 telah diujicoba di berbagai provinsi melalui PKBM dan LPK yang mengajukan bantuan dana untuk menyelenggarakan program aksara kewirausahaan. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa program aksara kewirausahaan telah dilaksanakan dengan tingkat ketercapaian tujuan yang masih beragam. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemanfaatan faktor masukan dan proses pembelajaran sehingga ketercapaian tujuan belum maksimal yang pada akhirnya juga keterwujudan manfaat dan dampak dari program ini belum nampak kelihatan. Memerlukan upaya penguatan ke depan dengan menata dan lebih memberdayakan faktor masukan dan proses pembelajaran sehingga keluaran, manfaat, dan dampak dari program ini akan semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat.

**Kata kunci:** *keberaksaraan, kewirausahaan, kewirausahaan masyarakat*

- 
- 1 Tulisan ini merupakan versi singkat hasil kajian lapangan pelaksanaan kewirausahaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Jurusan PLS FIP UNY bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud, tahun 2012. Hasil kajian dalam bentuk versi buku telah diterbitkan oleh Penerbit Aditya Media, ISBN 978-602-9461-05-3. Tahun 2012.
  - 2 Guru Besar dalam bidang Evaluasi Pendidikan Nonformal pada Jurusan PLS FIP UNY.

## PENDAHULUAN

Pembelajaran kewirausahaan masyarakat atau program aksara kewirausahaan merupakan salah satu bentuk inovasi pembelajaran atau program untuk memberdayakan masyarakat yang digagas dan dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud sejak tahun 2010 dan dilaksanakan oleh sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga pendidikan keterampilan (LPK) di beberapa provinsi yang memperoleh bantuan dana penyelenggaraan.

Disadari bahwa untuk membangun perekonomian nasional dibutuhkan banyak para pelaku wirausaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini di Indonesia terdapat sedikit sekali pelaku wirausaha. Diperkirakan pada tahun 2011/2012 jumlah wirausaha tidak lebih dari sekitar 0,18% masih jauh dari jumlah yang diharapkan yaitu sekitar 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, keadaan ini mendorong untuk secara terus menerus meningkatkan pendidikan kewirausahaan khususnya kewirausahaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan.

Sebagai salah satu konsep pokok dari pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan masyarakat, aksara kewirausahaan dirancang sebagai upaya meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat, keberaksaraan, dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitarnya melalui rintisan dan pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri. Secara konseptual, pendidikan kewirausahaan masyarakat dilandasi oleh pemikiran bahwa masyarakat perlu memiliki keaksaraan-jamak atau keaksaraan-ganda untuk menghadapi kemajuan dan perkembangan masyarakat yang diwarnai oleh kemajuan teknosains dalam berbagai aspek kehidupan yang berimplikasi pada pentingnya menumbuhkan sikap kemandirian, penguasaan

pengetahuan, dan kemampuan kewirausahaan dengan tiga unsur utama: proaktif, orientasi prestasi, dan komitmen terhadap pihak lain.

Program aksara kewirausahaan memiliki sejumlah tujuan yaitu (1) membentuk atau mengembangkan unit usaha/inkubator bisnis dan penguatan kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki, (2) menciptakan peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan, dan (3) meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha mandiri secara perorangan atau bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan oleh lembaga.

Untuk mencapai tujuan itu, program aksara kewirausahaan dilaksanakan melalui sejumlah langkah utama. Pertama, proses pembelajaran dalam format pendidikan nonformal dengan sasaran peserta didik warga masyarakat yang masih berkeaksaraan rendah dan sedang melaksanakan kegiatan kewirausahaan sederhana dengan keterampilan atau kegiatan usaha yang masih terbatas. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh tutor, fasilitator, dan nara sumber teknis yang memiliki kemampuan membelajarkan keaksaraan dan kewirausahaan masyarakat dalam suatu pelatihan singkat dengan bobot 66 jam pelatihan. Proses pembelajaran mengacu pada kompetensi kewirausahaan yang telah ditetapkan mencakup kemampuan mengenali jenis usaha, menuliskan dan mengkomunikasikan rancangan usaha, menguasai keterampilan produksi sesuai usaha yang akan dikembangkan, memasarkan produk, melakukan analisis perhitungan laba/rugi, menjalin kemitraan, dan memelihara/mengembangkan kompetensi keberaksaraan dalam menjalankan usaha.

Kedua, mengembangkan inkubator wirausaha yaitu suatu unit usaha yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pendidikan

masyarakat, terutama penyelenggara program aksara kewirausahaan, yang memiliki peran sebagai institusi pembina dan penetas para wirausahawan baru yang berasal dari peserta didik dan masyarakat di sekitarnya. Pengembangan inkubator wirausaha/bisnis dimaksudkan sebagai model pembelajaran aksara kewirausahaan yang menekankan pada praktek langsung berwirausaha dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat agar dapat mendukung pelaksanaan aksara kewirausahaan serta menjadi sentra penumbuhkembangan kewirausahaan bagi masyarakat sekitarnya. Pengembangan inkubator kewirausahaan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui kegiatan yang terdiri atas: melakukan analisis kebutuhan usaha, melaksanakan pendidikan inkubator wirausaha, melaksanakan pendidikan kewirausahaan, melakukan pembinaan dan bantuan modal usaha, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Ketiga, pengembangan sentra kewirausahaan yaitu lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat yang melaksanakan program aksara kewirausahaan sebagai pusat pembelajaran dan percontohan pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta didik dan masyarakat. Seperti halnya pengembangan inkubator wirausaha, pengembangan sentra kewirausahaan seyogyanya dilaksanakan atas dasar prinsip pengembangan secara bertahap, terencana, dan dilaksanakan secara berkelanjutan serta dilandasi oleh komitmen bersama untuk meningkatkan keberaksaraan peserta didik dan masyarakat berbarengan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembekalan kemampuan dan penyediaan peluang untuk bekerja secara mandiri menjadi pelaku wirausaha.

Aksara kewirausahaan, inkubator wirausaha, dan sentra kewirausahaan merupakan formula kerja kegiatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan



masyarakat yang dilaksanakan melalui program aksara kewirausahaan. Pada dasarnya, aksara kewirausahaan dengan dua bagian lain secara terintegrasi yaitu inkubator wirausaha dan sentra kewirausahaan dilatarbelakangi oleh pemikiran perlunya pengembangan kewirausahaan masyarakat sebagai upaya pembelajaran dan percontohan wirausaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan atas dasar kemampuan dan kapasitas warga belajar atau institusi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau produksi yang berorientasi pada keunggulan dan semangat kewirausahaan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan dapat diajukan setidaknya dua pertanyaan mendasar yaitu bagaimana keterlaksanaan dan keberhasilan program aksara kewirausahaan tersebut? Kemudian, atas dasar informasi yang diperoleh dari jawaban atas dua pertanyaan itu upaya apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan penguatan yang diperlukan untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program aksara kewirausahaan di waktu yang akan datang.

Secara ringkas, dua pertanyaan mendasar itu lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut: (1) apakah program aksara kewirausahaan memiliki dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan ekonomi peserta didik dan masyarakat sekitarnya? (2) apakah program aksara kewirausahaan memiliki manfaat terhadap meningkatnya keberaksaraan dan kemampuan berusaha peserta didik dan masyarakatnya? (3) apakah program aksara kewirausahaan memiliki keluaran terhadap meningkatnya jumlah warga masyarakat yang berkeaksaraan dan berkemampuan melaksanakan kegiatan usaha? (4) dari sisi inkubator wirausaha apakah aksara kewirausahaan memiliki keluaran terhadap meningkatnya lembaga penyelenggara dan peserta didik mendirikan dan mengembangkan inkubator wirausaha? (5) dari sisi sentra kewirausahaan apakah

program aksara kewirausahaan memiliki keluaran terhadap meningkatnya lembaga penyelenggara dan peserta didik merintis berdirinya sentra wirausaha? (6) apakah program aksara kewirausahaan dalam prosesnya telah mendukung meningkatnya kegiatan pembelajaran dalam pelatihan aksara kewirausahaan, praktek langsung pengembangan inkubator wirausaha, dan pendampingan pengembangan sentra kewirausahaan? (7) apakah program aksara kewirausahaan telah memiliki dukungan faktor masukan bagi terlaksanaan pelatihan aksara kewirausahaan, perintisan inkubator wirausaha, dan pendampingan pengembangan sentra kewirausahaan?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan rinci itu telah dilaksanakan kajian lapangan terhadap 9 (sembilan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pelatihan keterampilan (LPK) yang telah melaksanakan pendidikan kewirausahaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan yang berada di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, angket, dan pemanfaatan dokumen. Hasil pengumpulan data diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Selama proses kajian dilakukan dua kali seminar, pertama untuk menyiapkan instrumen dan kedua untuk menyajikan dan membahas hasil yang diperoleh sebelum dilakukan penyampaian laporan akhir kajian.

## **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Kajian**

Dalam kajian ini ada 9 (sembilan) PKBM dan LPK yang menyelenggarakan pelatihan aksara kewirausahaan dengan karakteristik peserta, keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta dan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. PKBM “T” di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan perbengkelan dan merintis inkubator bisnis usaha simpan pinjam berbasis syariah. Peserta pelatihan adalah 30 warga belajar yang sebagian memiliki tingkat keaksaraan rendah dan sebagian lagi sudah berkemampuan keaksaraan tinggi sederajat SMP/SMA. Kemampuan awal peserta yang dimiliki adalah membuat emping mlinjo; membuat krupuk singkong, meubel dan berdagang warung klontong. Hasil yang telah dicapai adalah terbentuknya inkubator bisnis ternak ayam untuk peningkatan kualitas hidup individu, keluarga, dan lingkungannya.
2. PKBM “BL” di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyelenggarakan pupuk organik. Peserta pelatihan adalah alumni keaksaraan fungsional berjumlah 10 orang, 10 orang lagi warga masyarakat yang lulus/putus sekolah SD, miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan. Keterampilan awal yang dimiliki tidak ada karena pada umumnya masyarakat miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap maupun keterampilan untuk modal kerja. Hasil yang telah dicapai berupa rintisan pembuatan pupuk organis sebagai hasil kunjungan ke CV Lembah Hijau Farm Research di Solo kemudian berkembang lebih lanjut ke budi daya melon bekerjasama dengan Perhutani, Dinas Pertanian, dan UPTD Pendidikan.
3. PKBM “SN” di Kota Malang Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan peternakan dengan peserta 30 orang yang telah memiliki kemampuan baca-tulis dan hitung dan tingkat pendidikan tamat SD sebanyak 4 orang, yang lainnya setingkat SMP, SMA, dan SMK. Kemampuan awal belum memiliki tetapi berkemampuan untuk bekerja keras secara berkelompok. Hasil yang telah dicapai berupa inkubator usaha penjualan hasil peternakan.
4. PKBM “P” juga di Kota Malang Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan membuat roti dengan peserta 25 orang yang telah

memiliki kemampuan baca tulis dan hitung, empat orang di antaranya berpendidikan SD dan lainnya setingkat SMP dan SMA. Kemampuan awal belum dimiliki selain bekeinginan untuk memperoleh keterampilan dan ingin bekerja keras. Hasil yang dimiliki berupa inkubator usaha untuk berjualan roti secara tetap dan berkeliling.

5. PKBM "AH" di Kubu Raya, Kalimantan Barat menyelenggarakan budi daya tanaman nenas dengan peserta 20 warga belajar yang telah mengikuti ujian Sukma I dan lulus serta 10 orang warga belajar yang telah memiliki usaha kebun nenas. Keterampilan awal yang telah dimiliki adalah sebagian warga belajar telah memiliki keterampilan menanam nenas secara tradisional. Hasil yang direncanakan dicapai berupa pembuatan selai nenas yang dipasarkan lewat inkubator usaha yang dibentuk.
6. PKBM "IN" di Kota Kendari Sulawesi Tenggara menyelenggarakan keterampilan usaha menjahit dengan peserta 20 orang telah memiliki tingkat pendidikan SMA dan Paket C; empat orang di antaranya telah memiliki unit usaha sebagai penjahit kecil-kecilan. Keterampilan awal yang dimiliki berupa keterampilan menjahit, persewaan baju tradisional dan kerajinan berupa membuat tamplak meja, sarung bantal, dan membuat baju seragam sekolah. Hasil yang telah dicapai berupa inkubator usaha untuk penjualan hasil pelatihan dan usaha peserta yang selama ini telah dikerjakan.
7. PKBM "W" di Kota Kendari Sulawesi Tenggara menyelenggarakan keterampilan mengelas dan menarik logam dengan peserta semua warga belajar yang telah mengikuti ujian Sukma I dan dinyatakan lulus. Keterampilan awal yang telah dimiliki belum ada karena pada umumnya masih menganggur. Hasil yang telah dicapai berupa inkubator usaha jasa pengelasan dan logam.
8. LPK "TS" di Kota Pontianak Kalimantan Barat menyelenggarakan pelatihan keterampilan SPA dengan peserta 20 orang warga

- belajar yang telah mengikuti ujian Sukma I dan lulus. Mereka pada umumnya masih menganggur dalam usia produktif. Keterampilan awal yang telah dimiliki belum ada. Hasil yang diperoleh berupa inkubator usaha salon, tata kecantikan, dan SPA.
9. LPK "AN" di Kota Mataram NTB menyelenggarakan keterampilan anyaman ketak, tenun ikat, makanan ringan, dan tata rias. Pesertanya adalah perempuan kelompok usia produktif yang layak, sudah dan belum memiliki rintisan usaha buruh tani, dagang, penjahit, warung nasi, dan salon kecantikan. Keterampilan awal yang sudah dimiliki sesuai pekerjaan sekarang yaitu buruh tani, dagang, penjahit, warung nasi, dan salon kecantikan. Hasil yang dicapai berupa inkubator warausaha yang kini sudah berkembang menjadi sentra kewirausahaan dalam sebuah gedung unit usaha yang representatif.

Untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pelatihan aksara kewirausahaan diperlukan dimilikinya tutor, fasilitator, dan tenaga atau nara sumber teknis. Pada umumnya semua penyelenggara pelatihan telah memiliki tenaga tutor, fasilitator, dan tenaga teknis yang melaksanakan pembelajaran yang telah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam panduan pengajuan kegiatan pelatihan ini. Namun demikian dalam pelaksanaannya, diketahui terjadi tugas rangkap. Ada tutor yang merangkap fasilitator, atau sebaliknya. Juga ada fasilitator atau tutor yang merangkap tenaga teknis dan bahkan sekaligus pengelola. Hal ini terjadi karena di sebagian daerah itu sumber daya tutor, fasilitator, dan tenaga teknis itu tidak tersedia dalam jumlah mencukupi. Dari sembilan PKBM dan LPK yang menyelenggarakan pelatihan ada 5 PKBM/LPK memiliki tenaga tutor, fasilitator, dan tenaga teknis yang memadai.

Oleh karena dipersyaratkan dalam proposal pengajuan bantuan dana, dalam pelatihan aksara kewirausahaan ini masing-masing lembaga penyelenggara telah menyiapkan kurikulum dan

program pembelajaran yang diperlukan, dilengkapi juga dengan panduan pelaksanaan, materi atau bahan ajar yang diperlukan. Namun, apa yang telah disiapkan itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan di lapangan pada saat pelatihan. Hambatan yang diketahui mengapa hal itu terjadi ada kaitannya dengan kecukupan tutor, fasilitator, dan tenaga teknis yang dapat disediakan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya pada saat proses pembelajaran dilaksanakan. Hal ini berkait juga dengan kebiasaan atau kepandaian para tutor, fasilitator, dan tenaga teknis melaksanakan proses pembelajaran. Diketahui di lapangan model pembelajaran yang dilakukan pada umumnya masih berbasis model magang yang konvensional, khususnya pada pembelajaran lanjutan setelah proses pelatihan selesai dilaksanakan yaitu pada fase perintisan dan pendampingan inkubator usaha.

Pada tahap pelatihan aksara kewirausahaan, proses pembelajaran teori dan praktek telah berjalan dengan baik memenuhi ketentuan 66 jam pelatihan. Walaupun demikian, seperti di atas dijelaskan, kurikulum, silabus, materi dan bahan ajar yang telah dipersiapkan dengan baik itu tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Tingkat kehadiran peserta dan tutor atau fasilitator, misalnya, tidak sepenuhnya terpenuhi hadir pada setiap kali dilaksanakan proses pembelajaran. Jadwal pembelajaran yang telah disusun tidak sepenuhnya juga berjalan baik pada setiap lembaga penyelenggara pelatihan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tingkat ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada pelatihan ini secara umum baru mencapai sekitar 70 sampai 80 persen saja. Hal ini antara lain dapat terlihat pada saat evaluasi hasil pembelajaran yang juga tidak semuanya dapat berhasil mencapai tingkat ketercapaian hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian, dibanding dengan pelatihan-pelatihan lain, keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran ini sudah lebih baik tetapi masih

belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sepenuhnya.

Pelaksanaan proses pembelajaran mempengaruhi ketercapaian hasil belajar baik teori maupun praktek. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa belum seluruh peserta memperoleh hasil belajar seperti yang diharapkan. Hasil belajar yang diperoleh menunjukkan ada peserta yang sudah berhasil ada pula peserta yang belum berhasil yaitu belum menunjukkan diperolehnya penguasaan dan keterampilan sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Secara umum dapat dikatakan dari sembilan PKBM dan LPK yang menyelenggarakan pelatihan ini baru sekitar 70% mencapai hasil belajar sebagaimana yang direncanakan. Indikator utama yang dipergunakan di sini adalah pemilihan jenis usaha yang sesuai lingkungan, menyiapkan rancangan usaha, keterampilan produksi, memasarkan hasil, menghitung laba/rugi, memiliki kemitraan, dan memiliki keberaksaraan dalam berusaha. Beberapa yang tergolong berhasil adalah memilih jenis usaha, menyiapkan rancangan usaha, sebagian keterampilan proses produksi dan pemasaran, menghitung laba/rugi; sedangkan yang berkaitan dengan kemitraan dan keberaksaraan dalam berusaha masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Proses pembelajaran yang kedua setelah pelatihan adalah merintis inkubator wirausaha yang ditunjukkan oleh banyaknya inkubator wirausaha yang didirikan oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Data yang diperoleh menunjukkan masing-masing lembaga penyelenggara pelatihan baru dapat merintis satu inkubator wirausaha itupun masih dalam kondisi belum dapat berjalan secara mandiri. Hal ini terjadi karena memang dalam pemilihan jenis usaha memerlukan kemampuan khusus yang perlu pelatihan lama. Selain itu seperti di atas dikemukakan bahwa jadwal pelatihan, rancangan pembelajaran, bahan ajar, kehadiran peserta, kehadiran tutor,

kehadiran pengelola, keterlaksanaan proses pembelajaran praktek langsung, penggunaan media dan alat, bahan praktek, penggunaan bahan praktek pembelajaran, tempat pembelajaran tatap muka, tempat praktek, pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan untuk keberhasilan program ini secara keseluruhan yang memerlukan kerja keras dan berkelanjutan.

Pendampingan rintisan usaha dalam mengembangkan inkubator bisnis memerlukan keseriusan semua pihak yang terlibat. Proses pendampingan dalam merintis usaha dan mengembangkan inkubator bisnis masih belum berjalan mulus seperti yang direncanakan. Proses pendampingan yang terjadi dan berjalan masih belum berhasil baik sejalan dengan rintisan usaha yang dikembangkan. Faktor keterbatas waktu merupakan alasan utama belum berhasilnya proses pendampingan dalam merintis usaha dan mendirikan inkubator bisnis. Memang memulai bekerja secara wirausaha tidak mungkin dapat berhasil hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tetapi, sebagai suatu program rintisan yang dimulai dari pelatihan aksara kewirausahaan diikuti oleh pendirian inkubator bisnis dan dikembangkan menjadi sentra wirausaha merupakan langkah awal yang baik yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam hal merancang usaha, menyediakan sarana produksi, melaksanakan proses produksi, mengembangkan pemasaran dan lebih-lebih untuk mengembangkan jenis usaha lainnya. Ini semua memerlukan perjalanan waktu yang panjang, usaha terus menerus tak mengenal lelah dan putus asa, meningkatkan sarana dan proses produksi, dan terutama melaksanakan pemasaran hasil produksi agar laku di pasaran.

Proses pembelajaran yang ketiga yang merupakan ujung akhir menentukan pelatihan aksara kewirausahaan adalah merintis sentra kewirausahaan oleh penyelenggara pelatihan. Seperti halnya pada rintisan inkubator wirausaha pada tahap pendirian dan



pengembangan sentra kewirausahaan. Inipun masih belum berjalan sepenuhnya dengan berhasil. Buktinya adalah belum semua penyelenggara pelatihan aksara kewirausahaan memiliki sentra kewirausahaan. Sebab yang utama karena pada fase rintisan inkubator wirausaha pada beberapa lembaga penyelenggara belum berhasil merintis inkubator wirausaha yang diharapkan itu dapat berdiri secara baik. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan baru sekitar 3 PKBM dan LPK yang menyelenggarakan pelatihan aksara kewirausahaan memiliki sentra kewirausahaan seperti yang diharapkan. Dilihat dari aspek ini tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan baru menunjukkan sekitar 40 berhasil baik.

## **B. Pembahasan**

Data yang diperoleh dari lapangan seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan aksara kewirausahaan, rintisan inkubator wirausaha, dan rintisan sentra kewirausahaan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Adakah faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan pelatihan aksara kewirausahaan, rintisan inkubator wirausaha dan sentra kewirausahaan itu? Beberapa hal berikut ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan pelatihan aksara kewirausahaan dapat terjadi manakala tersedia faktor masukan seperti yang diharapkan yaitu memiliki peserta didik sesuai persyaratan yang ditetapkan; tutor, fasilitator, dan nara sumber teknis yang relevan; kurikulum yang dirancang sesuai kompetensi aksara kewirausahaan, dan memiliki panduan, materi, dan bahan ajar yang sesuai. Demikian juga untuk keperluan rintisan inkubator bisnis dan rintisan sentra kewirausahaan memerlukan tersedianya rancangan inkubator bisnis dan rancangan sentra wirausaha yang akan

didirikan. Ternyata faktor-faktor masukan ini tidak seluruhnya tersedia mencukupi dan dalam kondisi siap untuk digunakan dan dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Meskipun faktor-faktor masukan tersedia mencukupi dan dalam kondisi yang mendukung, keberhasilan pelatihan masih bergantung pada bagaimana pelatihan itu dilaksanakan baik dari sisi program maupun pembelajarannya. Diperoleh data lapangan seperti diuraikan di atas, penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan proses pembelajarannya belum seluruhnya seperti yang diharapkan terjadi pada semua lembaga penyelenggara pelatihan ini.

Dilihat dari ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran, dari sejumlah indikator yang harus terpenuhi baru sekitar 70% indikator saja yang sudah terpenuhi dan dalam kondisi memadai, selebihnya masih memerlukan peningkatan ketersediaan dan kecukupannya. Bila dilihat dari sisi keterlaksanaan faktor-faktor yang diperlukan sesuai indikator yang dipergunakan dapat disimpulkan hampir seluruh faktor-faktor itu belum seluruhnya optimal dipenuhi dan dipergunakan atau dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu salah satu penyebab utama kekurangberhasilan program pelatihan aksara kewirausahaan ini terletak pada belum optimalnya proses pembelajaran yang dilaksanakan. Lebih jauh lagi, karena proses pembelajaran masih belum optimal maka dengan sendirinya program pelatihan ini belum berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan secara memuaskan.

Apakah tujuan (keluaran) yang telah ditetapkan dapat tercapai? Tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan aksara kewirausahaan ini berupa peserta didik memiliki: jenis usaha yang sesuai, rancangan usaha, keterampilan produksi, keterampilan memasarkan, kemampuan menghitung rugi/laba, kemitraan, dan keberaksaraan dalam berusaha. Sementara tujuan (keluaran) untuk perintisan inkubator bisnis dan sentra kewirausahaan berupa

meningkatnya jumlah inkubator bisnis dan rintisan sentra wirausaha yang didirikan.

Data lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitatif dari sejumlah indikator ketercapaian tujuan atau keluaran itu hampir seluruhnya telah tercapai, tetapi masih belum tercapai memuaskan secara kualitatif. Hal ini menjelaskan bahwa ketercapaian tujuan itu baru pada taraf sebatas pemberian informasi dan pemahaman atas sejumlah indikator tujuan/keluaran tetapi belum menunjukkan dikuasainya suatu kemampuan konseptual dan teknis untuk menjadi seorang wirausahawan. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa faktor masukan dan faktor proses pada pelaksanaan program dan pembelajaran belum sepenuhnya berhasil secara memuaskan. Meskipun demikian sebagai suatu langkah awal untuk mewirausahakan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan yang memiliki tiga kegiatan utama pelatihan, rintisan inkubator bisnis, dan rintisan sentra wirausaha dapat dikategorikan cukup berhasil. Tentu dengan suatu catatan bahwa perlu upaya pengembangan lebih lanjut ke depan baik dari sisi program maupun pembelajarannya dengan menyediakan faktor masukan yang lebih baik dan proses pembelajaran yang lebih berhasil dan berdayaguna sehingga tujuan/keluaran dari program ini dapat dicapai secara lebih baik lagi berupa munculnya para pelaku kewirausahaan masyarakat.

Apakah dengan kondisi ketercapaian tujuan atau keluaran seperti diuraikan di atas, program aksara kewirausahaan ini memiliki manfaat dan dampak sebagaimana dinyatakan dalam rancangan kegiatan? Perlu diketahui bahwa manfaat dan dampak yang ingin dihasilkan dari program aksara kewirausahaan ini berupa meningkatnya keberaksaraan, jenis dan kegiatan usaha yang ditekuni oleh peserta didik dari sisi manfaat dan peserta didik memiliki pekerjaan tetap, memperoleh penghasilan, dan sumber dana lain untuk lembaga dari sisi dampak.

Seperti diketahui bahwa ketercapaian manfaat dan dampak dari suatu program tidak mungkin dapat diketahui hanya dalam waktu satu atau dua tahun setelah pelaksanaan program. Oleh karena itu pertanyaan tentang manfaat dan dampak tersebut di atas terlalu dini untuk dikemukakan karena jawabannya dengan sendirinya tidak akan memuaskan karena manfaat dan dampak dari program itu belum dapat diketahui dalam waktu pendek, satu atau dua tahun setelah program itu dilaksanakan. Dengan demikian maka, program aksara kewirausahaan yang telah dilaksanakan ini belum dapat menunjukkan manfaat dan dampak seperti yang diharapkan secara memuaskan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mengacu temuan data dan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Program aksara kewirausahaan yang meliputi pelatihan, rintisan inkubator bisnis, dan rintisan sentra kewirausahaan pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Pelatihan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai rencana. Rintisan inkubator bisnis pada sebagian besar lembaga penyelenggara sudah mulai dilaksanakan. Sementara itu, rintisan sentra usaha pada sebagian besar lembaga penyelenggara belum dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan.
2. Dilihat dari sisi keberhasilan, pelaksanaan pelatihan sebagian besar telah berhasil khususnya dalam melaksanakan pembelajaran aksara kewirausahaan. Keberhasilan rintisan inkubator bisnis belum nampak berhasil secara keseluruhan lembaga penyelenggara. Demikian pula untuk keberhasilan rintisan sentra wirausaha masih memerlukan waktu cukup panjang untuk dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan.
3. Keterlaksanaan dan keberhasilan program sebagaimana

diuraikan dalam kesimpulan di atas berkaitan erat dengan kekurangoptimalan dalam memanfaatkan faktor-faktor masukan yang tersedia sehingga proses pembelajaran belum sepenuhnya berhasil dan dengan demikian ketercapaian tujuan atau keluaran dari pelaksanaan program ini juga masih belum nampak memuaskan. Begitu juga untuk ketercapaian manfaat dan dampak yang diharapkan masih belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks ini faktor waktu menjadi sangat penting, artinya karena program ini baru saja dilaksanakan maka manfaat dan dampaknya dengan sendirinya belum dapat diketahui.

Berikut ini beberapa saran penting untuk penguatan penataan dan pelaksanaan program aksara kewirausahaan ke depan agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi yaitu:

1. Perintisan pendidikan aksara kewirausahaan perlu dilanjutkan untuk menghasilkan lebih dari satu model yang siap diterapkan secara luas dan kontekstual.
2. Pendidikan aksara kewirausahaan yang telah terbukti mulai mampu mengantarkan masyarakat menekuni dunia wirausaha, perlu melakukan diversifikasi model pendidikannya untuk melayani pengembangan berbagai tingkat keahlian dan kematangan berusaha. Dalam konteks ini perlu penataan dan peningkatan faktor masukan yang diperlukan dan proses pembelajaran yang harus ditingkatkan sehingga keluaran yang diharapkan tercapai.
3. Pendidikan aksara kewirausahaan dapat dan perlu bersinergi dengan bidang dan keahlian lain sehingga masyarakat menguasai berbagai kompetensi menuju masyarakat berbasis pengetahuan dengan bekal meningkatnya keberaksaraan masyarakat.



# PUSTAKA

- Arai, Yuko, Penyunting. (2009). Social Education/Adult Education in Japan. JOGMCON86.
- Arnady, M., & Prasetyo, I. (2016). Evaluasi program kecakapan hidup di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 60-74. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.6303>
- Astriya, B., & Kuntoro, S. (2015). Pengembangan kreativitas dan minat belajar anak usia 3-4 tahun melalui permainan konstruktif. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 131 - 144. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6329>
- Calabrese, R. L., 2006. Building social capital through the use of an appreciative inquiry theoretical perspective in a school and university partnership. *International Journal of Education Management*, Vol. 20, No3. 2006 pp 173-182.
- Couros, Alec. (2003). *Communities of practice: A literature review*. www. diakses pada Mei 2013
- Cunningham, Ian. (2002). Developing human and social capital in organizations. *Journal of Industrial and Commercial Training*, Vol. 42, November 2002 pp.89-94.
- Dahlman, C., Zeng, D.Z., Wang, S. (2007). *Enhancing China's competitiveness through lifelong learning*. Washington, D.C.: World Bank Institute

- Dalkir, 2005. *Knowledge management in theory and practice*, New York: McGrill
- Dhamayanti, Y., & Suparno, S. (2015). Keefektifan paud inklusi pada kesiapan anak memasuki sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 107-121. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4847>
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 2013. *Panduan pengelolaan desa vokasi*. Jakarta: Ditbinsuslat, Dirjen PNFI, Kemdikbud.
- Engesbak, H., Tønseth, C., Fragoso, A., & Lucio-Villegas, E. (2010). Adult education in transition: three cases and periods compared. *International Journal of Lifelong Education*, 29(5), pp.617-636
- Entoh Tohani. 2015. *Modal sosial dalam Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat*. Laporan Penelitian, UNY.
- Fauziarti, B., & Soedarsono, F. (2014). Efektivitas pelatihan kurikulum pendidikan anak usia dini di Kecamatan Grabag. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 174 - 186. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2687>
- Figel, J. (2007). *Key competence for lifelong learning*. Luxembourg City: European Communities
- Firestone, J.M. and McElroy, M.W. (2005). Doing knowledge management. *The Learning Organization journal*, vol.12, no.2. diunduh dar <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09696470510583557>.
- Fitria, S., & Suparno, S. (2016). Evaluasi pembelajaran keterampilan membaca permulaan di TK Fastrack Funschool kelas A Program Nusantara Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 85-96. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.6481>
- Freire, Paulo. (1972). *Pedagogy of the oppressed*. Victoria: Penguin Books Ltd.



- Freire, Paulo. (1972). *Pedagogy of the oppressed*. Victoria: Penguin Books Ltd.
- Geller, A. Ellen, et. al. (2007). *The everyday writing center: a community of practice*. Utah: Utah State University Press.
- Hadi, S., & Suryono, Y. (2014). Pengembangan model evaluasi pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 18(2), 261-274. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/pep.v18i2.2865>
- Hanafi, S., & Sujarwo, S. (2015). Upaya meningkatkan kreativitas anak dengan memanfaatkan media barang bekas di TK Kota Bima. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 215 - 225. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6360>
- Handoko, H., & Wuradji, W. (2015). Evaluasi program pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 24-38. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4841>
- Haryanti, H., & Sumarno, S. (2014). Pemahaman kompetensi parenting terhadap perkembangan sosial anak (studi kasus pada kelompok bermain di Pakem, Sleman). *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 32 - 49. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2354>
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat ngudi kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 97-108. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- Husaen, R., & Sugito, S. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kelas kelompok bermain di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 203 - 214. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6359>

- Indrajit, R.E. (2011). *Teknologi informasi dan perguruan tinggi: menjawab tantangan pendidikan abad ke-21*. Bandung: Informatika
- Jiwaningrum, S., & Suryono, Y. (2014). Penggunaan media pembelajaran berbasis alam untuk pengembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 223 - 237. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2691>
- Kartini, K., & Sujarwo, S. (2014). Penggunaan media pembelajaran plastisin untuk meningkatkan kreativitas anak usia. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 199 - 208. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2689>
- Khamsi, G.S. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. Teachers College Press, Columbia University New York and London Edited
- Khamsi, G.S. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. Teachers College Press, Columbia University New York and London Edited
- Kim, J. (2010). A changed context of lifelong learning under the influence of migration: South Korea. *International Journal of Lifelong Education*, 29(2), pp.255-272
- Kiromi, I., & Fauziah, P. (2016). Pengembangan media pembelajaran big book untuk pembentukan karakter anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 48-59. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.5594>
- Korten, David C. (1986). *Community management: asian experience and perspectives*. West Hartford C.: Kumarian Press.
- Korten, David C. (1986). *Community management: asian experience and perspectives*. West Hartford C.: Kumarian Press.
- Kotter, John P. (1996). *Leading change*. Boston: Harvard Business School Press

- Kotter, John P. (1996). *Leading change*. Boston: Harvard Business School Press
- Kouzes, J.M. & Posner, B.Z (2008). *The leadership learning: Panduan menjadi motivator hebat bagi siapa saja*. Terjemahan: Utama Maska dan Setangguh S.M. Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Kouzes, J.M. & Posner, B.Z (2008). *The leadership learning: Panduan menjadi motivator hebat bagi siapa saja*. Terjemahan: Utama Maska dan Setangguh S.M. Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Kusniapuantari, D., & Suryono, Y. (2014). Pengaruh kerja sama antara pendidik dan orangtua terhadap pengembangan kecerdasan emosional anak. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 18 - 31. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2353>
- Lesser, E. L. & Storck, J. 2001. Communities of practice and organizational performance. *IBM SYSTEMS JOURNAL*, VOL 40, NO 4, 2001
- Malik, A., & Dwiningrum, S. (2014). Keberhasilan program desa vokasi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Gemawang Kabupaten Semarang. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 124 -135. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2683>
- Martsiswati, E., & Suryono, Y. (2014). Peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 187 - 198. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2688>
- Meilya, I., & Syamsi, I. (2015). Evaluasi program pelatihan in-house training pembelajaran Paket C di sanggar kegiatan belajar Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 156 - 174. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6353>

- Momeni, M., Nielsen, S.B, Kafash, M. H. (2015). Determination of innovation capacity of organizations: Qualitative meta synthesis and delphi metho. *Innovative Service in the 21<sup>Th</sup>, 25th conference, 10-12. September 2015. Denmark.*
- Muzakki, M., & Fauziah, P. (2015). Implementasi pembelajaran anak usia dini berbasis budaya lokal di PAUD Full Day School. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 39-54. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4842>
- NEA. 2007. *Innovation in Nuclear Energy Technology*. Paris: OECD Publishing
- Nuryanto, S., & Izzaty, R. (2016). peranan dongeng dalam pendidikan karakter pada taman kanak-kanak Lazuardi Kamila di Surakarta. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 75-84. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8063>
- OECD. 2009. *Working Out Change: Systemic Innovation In Vocational Education And Training*. Diakses dari [www.oecd.org/publishing/corrigenda](http://www.oecd.org/publishing/corrigenda).
- Pamungkas, A., & Fauziah, P. (2014). Evaluasi program kewirausahaan bengkel pada kejar paket B di PKBM Tunas Bangsa Tugu Semarang. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 136 - 148. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2684>
- Prasetyo, I., Tohani, E., & Sumarno, S. (2014). Pengembangan model life skills 4-H (head, hand, hearth, and health) berbasis kewirausahaan melalui experiential learning guna mengurangi kemiskinan pedesaan. In Y. Suryono & E. Tohani (Eds.), *Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan* (pp. 215–274). Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal. 2009. *Buku Laporan Desa Vokasi*. Semarang
- R.A. Santoso. (1956). *Pendidikan Masyarakat*. Buku I, II, dan III. Bandung: Penerbit Ganoco. N.V.

- Rahmani, Z., Ali Mousavi, S. (2011). Enhancing the innovation capability in the organization. *2<sup>nd</sup> International Conference on Education and Management Technology*. IPEDR Vol.13 (2011), IACSIT Press, Singapore.
- Renatama, P., & Suryono, Y. (2015). Evaluasi pelaksanaan program pelatihan wajib latih dan gladi lapang bagi masyarakat kawasan rawan bencana merapi. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 192 - 202. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6356>
- Roziqoh, R., & Suparno, S. (2014). Pendidikan berperspektif gender pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 86 - 100. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2359>
- Saleh, S., & Sugito, S. (2015). Implementasi metode bermain peran untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun di TK Barunawati. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 85-93. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4845>
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226 - 238. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>
- Shofa, M., & Suparno, S. (2014). Peningkatan keterampilan berbicara anak usia dini melalui permainan sandiwara boneka. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 209 - 222. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2690>
- Steven W. Floyd . 2009. 'Borrowing' Theory: What Does This Mean and When Does It Make Sense in Management Scholarship?. *Journal of Management Studies* 46:6 September 2009
- Steven W. Floyd . 2009. 'Borrowing' Theory: What Does This Mean and When Does It Make Sense in Management Scholarship?. *Journal of Management Studies* 46:6 September 2009

- Sudaresti, S., & Suryono, Y. (2015). Penguasaan keterampilan dan motivasi kerja terhadap tingkat pendapatan ibu rumah tangga di Desa Murtigading Bantul. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 67-84. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4844>
- Sulistiyawati, E., & Sujarwo, S. (2016). Peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui media video compact disc pada anak usia 5– 6 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 28-37. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8064>
- Suryono, Y. (2008). Politik pendidikan nonformal dalam membangun masyarakat belajar yang demokratis. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Suryono, Y., & Fauziah, P. (2015). Model pendidikan karakter bagi anak melalui “sekolah ibu” nonformal di pedesaan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 19(2), 230-242. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/pep.v19i2.5582>
- Suryono, Y., & Tohani, E. (2014). Evaluasi pendidikan nonformal berbasis pendidikan kecakapan hidup dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. In Y. Suryono & E. Tohani (Eds.), *Pendidikan kecakapan Hidup dan Kewirausahaan* (pp. 1–78). Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Suryono, Y., Sumarno, S., & Tohani, E. (2014). Pendidikan nonformal dan pengurangan kemiskinan di pedesaan (Pendekatan pengembangan model program pendidikan kecakapan hidup) Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. In Y. Suryono & Entoh Tohani (Eds.), *Pendidikan kecakapan Hidup dan Kewirausahaan* (pp. 275–319). Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Trisanti, T., & Suryono, Y. (2014). Evaluasi program kecakapan hidup bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 113 - 123. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2361>

- UNESCO. (2002). *Innovations in non-formal education: A review of selected initiatives from the Asia-Pacific region*. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education
- Wahid, S., & Suyanto, S. (2015). Peningkatan keterampilan proses sains melalui percobaan sederhana anak usia 5-6 tahun di TK-IT Albina Ternate. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 55-66.  
doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4843>
- Wahyuningsih, D., & Suyanto, S. (2015). Implementasi kearifan lokal melalui model bcct untuk pengembangan kemampuan sosial anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 10-23.  
doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4840>
- Wenger, E., 2002. *Community of practice*. Harvard: Business School Publishing
- Wenger, E., McDermot, R., Snyder, W.M. 2002. *Cultivating community of practice: A guide to managing knowledge*. Harvard: Business School Publishing
- Whetten, D.A., Feling, T. & King, B. G. (2009). The Practice of Theory Borrowing in Organizational Studies: Current Issues and Future Directions. *Journal of Management / Month XXXX*
- Whetten, D.A., Feling, T. & King, B. G. (2009). The Practice of Theory Borrowing in Organizational Studies: Current Issues and Future Directions. *Journal of Management / Month XXXX*
- Wulansari, B., & Sugito, S. (2016). Pengembangan model pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan kualitas proses belajar anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 16-27.  
doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v3i1.7919>
- Zawislak, P.A, Alves, A.C, Tellogamara, J., Baribeux, D., & Reichert, F.M (2012). Innovation capacity: from technology development to transaction capability. *Journal of Technology Management and Innovation*, Vol. 7, no. 2 Juli 2012.





# INDEK

## A

absorptif, 137,  
Ace Suryadi, 34,  
adult education, 14, 17, 33, 41, 171, 172,  
advantage, 134,  
akreditasi, 39, 55, 56, 62, 83,  
Ali Mousavi, 137, 176,  
aliran, 17, 29, 96, 99, 149,  
analisis, 27, 51, 66, 70, 120, 120, 139, 155, 156, 158, 158, 158,  
APBD, 24, 48,  
APBN, 23, 48,  
asas, 30, 62,  
ASEAN, 30,  
asesmen, 12, 55,  
asimilisi, 137,  
Australia, 59, 64, 65,

## B

Bangladesh, 57, 58, 59,  
bargaining, 137,  
batik, 121, 124, 124, 125, 125, 125, 127, 130,  
budaya, 5, 10, 17, 21, 27, 28, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 70, 74,  
77, 78, 83, 85, 92, 98, 100, 107, 108, 113, 116, 118, 139, 147, 150, 176,  
budidaya, 110, 111, 123, 126,

## C

Calabrese, 143, 171, CBS, 62, 62,  
CEDRW, 60,  
China, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 171,  
Cohort, 30,  
community education, 33, 41, 59,  
complexity, 139,  
CONFINTEA, 33,  
Continuing, 14, 17, 33, 41,  
continuing education, 14, 17, 33, 41,  
Coombs & Ahmed, 19, 25,  
Cunningham, 143, 171,

## D

Dahlman, 93, 171,  
demografi, 32, 37, 38, 118,  
demokratis, 15, 16, 21, 33, 34, 46, 178,  
Depdiknas, 23, 36,  
dependency, 32,  
desentralisasi, 28, 34, 40, 56,  
destruktif, 37,  
development, 14, 15, 33, 34, 41, 59, 60, 136, 179,  
DIKMAS, 35,  
dinamika, 8, 43, 94, 122, 130,  
Ditbinsuslat, 116, 172,  
domain, 88, 104, 142,  
DSS, 145,

## E

education, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 41, 42, 47, 59, 98, 146, 171, 172,  
172, 174, 176, 178,  
eksistensi, 16, 22, 96  
eksperimen, 63, 139,  
emploibilitas, 33,  
etnik, 57, 59,

etnis, 41, 47,  
 evaluasi, 19, 22, 39, 40, 47, 65, 72, 74, 75, 75, 76, 79, 80, 82, 91, 97, 102,  
 103, 111, 117, 121, 153, 156, 162, 164, 171, 172, 173, 173, 173, 175, 176,  
 177, 178,  
 Evans, 19, 20, 25, 27,

## F

Faulo Freire, 60,  
 Filipina, 59,  
 fleksibel, 27, 40, 63, 109,  
 fundamental, 14, 149,  
 fungsional, 27, 54, 57, 59, 77, 78, 79, 81, 89, 93, 126, 126, 159,

## G

Gandhi, 60,  
 GDP, 58, 64,  
 Gellen, 143,  
 Gemawang, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 124, 126, 127, 128, 128, 128,  
 128, 129, 130, 131, 175,  
 gender, 37, 57, 73, 177,  
 geografis, 23, 24, 56, 78, 118,  
 global, 8, 18, 28, 30, 33, 34, 40, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 95, 95, 95, 98,  
 100, 141, 174,  
 GNP, 61, 64,

## H

Hamburg, 33,  
 holistik, 3, 7, 11, 14, 87, 97,  
 Hoppers, 25,

## I

identifikasi, 38, 50, 81, 117, 118, 148,  
 Implementasi, 23, 39, 40, 49, 54, 69, 70, 73, 88, 89, 92, 103, 104, 116, 144,  
 147, 176, 177, 179,

India, 57, 58, 59, 61,  
informasi, 3, 6, 8, 9, 11, 18, 33, 40, 43, 44, 45, 51, 55, 83, 92, 94, 96, 97, 98,  
106, 118, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 147, 149, 157,  
167, 174,  
informasi., 8, 45, 118,  
inovatif, 1, 2, 3, 9, 11, 13, 32, 35, 37, 38, 59, 65, 67, 74, 88, 94, 95, 96, 97, 99,  
103, 107, 133, 135, 137, 139, 147,  
institusi, 39, 52, 55, 57, 97, 156, 157,  
internalisasi, 10, 102, 104, 106, 106, 110,  
inventaris, 120,  
IPM, 5, 58, 61,  
iptek, 1, 2, 9, 55,

## J

jati diri, 36, 37, 38, 80,  
Jepang, 4, 15, 50, 56, 57,  
Jumbish, 61,

## K

karakter, 6, 8, 13, 19, 20, 27, 35, 36, 36, 36, 43, 47, 58, 61, 72, 73, 78, 82,  
89, 94, 95, 106, 109, 113, 114, 117, 118, 140, 142, 142, 150, 158, 174,  
176, 178,  
karakteristik, 6, 8, 13, 19, 20, 43, 58, 61, 78, 82, 89, 106, 109, 113, 114, 117,  
118, 140, 142, 150, 158,  
keaksaraan, 4, 5, 22, 25, 37, 38, 47, 57, 59, 67, 73, 74, 76, 76, 77, 78, 79, 80,  
81, 82, 92, 154, 155, 157, 159,  
kemiskinan, 17, 28, 56, 57, 59, 60, 75, 75, 75, 75, 90, 91, 92, 99, 116, 176,  
178,  
kependidikan, 38, 39, 43, 97,  
kesetaraan, 5, 22, 25, 37, 38, 39, 40, 67, 73, 74, 76, 77, 78,  
keterampilan, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38, 45, 47, 50,  
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 82, 84, 92, 93,  
94, 116, 120, 120, 123, 123, 126, 126, 126, 138, 139, 139, 139, 139,  
139, 140, 141, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 161, 161, 163, 166, 172,  
177, 179,  
KKNI, 1, 1, 2,

KKOD, 26,  
 klasifikasi, 19, 25, 30, 71, klasik, 18, 81,  
 knowledge, 14, 18, 44, 99, 138, 145, 146, 147, 172, 172, 179,  
 koheren, 137,  
 kolaborasi, 63, 94, 94, 139, 143, 150,  
 kominkan, 57,  
 komitmen, 36, 37, 42, 48, 79, 113, 118, 119, 128, 155, 156,  
 komparasi, 6, 49,  
 kompetensi, 2, 8, 9, 32, 39, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 93, 95, 97, 118, 138,  
 141, 155, 165, 169, 173,  
 komPetitif, 50, 51, 93, 134, 135, 147,  
 komprehensif, 6, 8, 13, 40, 46, 53, 68, 78,  
 komunikasi, 8, 51, 51, 54, 71, 92, 93, 94, 94, 94, 94, 109, 111, 112, 136, 137,  
 138, 139, 140, 141, 155,  
 konstelasi, 30,  
 Korea Selatan, 59, 61, 62, 62, 62,  
 korupsi, 41,  
 kualifikasi, 1, 39, 54, 55,  
 kultural, 8, 9, 11, 34, 41, 47, 93, 99, 101, 107, 112, 135, 136, 139,  
 kurikulum, 1, 2, 6, 8, 9, 19, 20, 25, 52, 62, 67, 76, 161, 162, 165, 172,  
 kursus, 5, 26, 37, 38, 39, 62, 63, 65, 65, 65, 74, 82, 83, 84, 116, 172,

## L

La Belle, 24,  
 life long, 14, 21, 142,  
 literasi, 24, 27, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 76, 77, 90, 91,  
 92, 93, 95, 95, 98, 99, 138,  
 Logistik, 136, 137,

## M

M. Sadarjoen Siswomartojo, 43,  
 Magister, 9, 10, 97,  
 makro, 28, 33, 34,  
 Malaysia, 59, 64, 65, 65,  
 manajemen, 8, 55, 60, 63, 97, 120, 121, 133, 136, 136, 137, 145, 145, 145,  
 145, 146, 147, 148, 149, 150,

massif, 21, 52, 65, 107,  
modern, 60,  
multidisipliner, 2, 3,

## N

nutrisi, 60,

## O

OECD, 4, 51, 88, 95, 95, 138,  
okuvasional, 54, 93,  
organisasi, 4, 8, 15, 18, 21, 35, 63, 65, 88, 89, 97, 99, 102, 103, 104, 106,  
108, 108, 109, 111, 118, 128, 129, 129, 134, 135, 136, 136, 137, 138,  
142, 143, 144, 144, 145, 145, 145, 147, 149, 150, 151,  
orientasi, 9, 19, 27, 34, 39, 47, 54, 98, 100, 109, 120, 155, 157,  
outsourcing, 137,

## P

P2PNFI, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 129,  
paradigma, 36, 36, 98, 122,  
PAUD, 35, 38, 44, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 83, 153, 154, 172, 173,  
176,  
PBH, 26, 76,  
Pedagogy, 17, 172, 173,  
pendanaan, 48, 74, 83, 102, 103, 120, 123, 124, 155,  
perilaku, 37, 70, 73, 94, 102, 107, 108, 108, 113, 121, 123, 126, 134, 139, 139,  
139, 143, 149, 175,  
perspektif, 6, 13, 16, 17, 18, 41, 57, 73, 87, 93, 97, 144, 148, 149, 177,  
PKBM, 47, 84, 118, 121, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 161, 163, 165, 176,  
practice, 104, 105, 115, 133, 140, 142, 143, 151, 171, 172, 173, 175,  
179, 179, 179, 179,  
Probes, 148,  
putus sekolah, 5, 6, 23, 29, 30, 52, 59, 60, 61, 159,

**R**

radikal, 17, 134,  
 Rahmani, 134, 137, 176,  
 Rajasthan, 61,  
 rasionalitas, 118,  
 recurrent education, 14, 33, 41,  
 regulasi, 37, 55, 83,  
 rekreasi, 60,  
 residual, 40, resiko, 136, 144,  
 rintisan, 116, 120, 120, 147, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166,  
 167, 168, 169,

**S**

Santoso, 14, 15, 26, 176,  
 Serrat, 140,  
 sertifikasi, 54, 55, 56,  
 silabus, 62, 162,  
 skala, 120, 121,  
 skill, 45, 47, 93, 134, 137, 138, 139, 139, 144, 150, 176,  
 society, 14, 17, 18, 21, 27, 138,  
 spektrum, 37, 38, 116,  
 stimulatif, 60,  
 Sumarno, 27, 34, 73, 75, 75, 84, 173, 176, 177, 178,  
 swadaya, 59, 60, 63, 83,

**T**

teknologi, 8, 28, 29, 51, 54, 56, 60, 92, 93, 94, 95, 118, 134, 135, 136, 136,  
 136, 136, 136, 136, 137, 138, 144, 145, 148, 149, 174,  
 Thailand, 7, 59, 61, 62, 63,  
 Tiongkok, 50, 54, 93,  
 TPR, 26,  
 transformasi, 18, 21, 33, 41, 44, 45, 60, 104, 107, 134, 136, 137, 149,

## U

UNESCO, 4, 33, 58, 90, 91, 99, 178,  
unggulan, 51, 130, 134, 135, 157,  
urgensi, 6, 7, 21, 87, 90, 111, 118,  
usia dini, 16, 22, 25, 35, 37, 44, 47, 60, 67, 70, 72, 73, 79, 172, 173, 174, 175,  
176, 177, 179, 179,

## V

variasi, 23, 24, 32,  
vokasional, 25, 27, 55, 60, 63, 74, 75, 76, 82, 120, 120, 121, 122,  
volunter, 57,

## W

Wartanto, 36,  
Wenger, 140, 142, 143, 144, 179, 179,  
wirausaha, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 44, 75, 75, 76, 93, 95, 119, 120, 120,  
120, 121, 122, 123, 124, 124, 127, 128, 128, 128, 129, 130, 131, 153,  
154, 155, 156, 157, 158, 158, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  
168, 169, 172, 176, 176, 176, 178,

## Y

Yoko Arai, 14, 57,

## Z

Zawilak, 136,  
Zeng, 93, 171,